



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH FIT AND PROPER TEST  
CALON ANGGOTA BPK RI**

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Fit and Proper Test  
Dengan : Calon Anggota BPK RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 5 September 2019  
Waktu : 13.35 WIB s.d 21.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusntara I  
Ketua Rapat : Ir. H. Achmad Hafisz Tohir  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI  
Hadir : CALON ANGGOTA BPK RI.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,  
***Om swastiastu,***  
***Namo budaya,***  
Salam kebajikan.

**Yang terhormat saudara Dr. Tito Sulistiyo, S.E., M.A.F., dan sekaligus juga bersama kita ada saudara Indra Utama sedang menunggu giliran dan juga Dr. Heru Kreshna Reza dan saudara Dr. Reza Suarga, dan Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.,**  
**Yang kami hormati juga seluruh Anggota Komisi XI DPR RI,**  
**Dan hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI daftar hadir telah ditandatangani oleh 19 Anggota dari 52 Anggota, terdiri dari 7 Fraksi dari 10 Fraksi, sehingga ijinlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Calon Anggota BPK RI yang dimaksud Dr. Tito Sulistiyo, S.E., M.A.F. dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.35 WIB)**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, hidayah dan Karunia-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal yang akan kita bicarakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada hari ini dalam uji kepatutan dan uji kelayakan atau fit and propertest Calon Anggota Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia. Uji kepatutan dan uji kelayakan bagi Calon Anggota BPK merupakan pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di luar ruang rapat dan bersama kita telah hadir Dr. Tito Sulistiyo, S.E., M.A.F.
2. Waktu yang kami berikan total 45 menit yang terdiri dari 15 menit paparan presentasi makalah dan 30 dalam tanya jawab dan diskusi pendalaman.

**Bapak dan Ibu sekalian.**

Untuk menyingkat waktu maka kami persilakan kepada Bapak Dr. Tito Sulistiyo, S.E., M.A.F. untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Waktu di jam saya menunjukkan pukul 13.35 WIB dan kita mulai 45 menit kedepan.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. TITO SULISTIYO, S.E., M.A.F.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Salam sejahtera buat kita semua.**

**Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Dewan dari Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Dan para hadirin.**

Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pemikiran apa yang saya pikirkan mengenai BPK di masa kedepan. Dan perkenalkan saya memulai. Agenda saya tiga secara simple, landasan filosofis Badan Pemeriksa Keuangan saat ini dan rekomendasi.

Sebenarnya 1945 walaupun waktu itu 18 Agustus 1945, sudah ada satu pasal mengenai BPK di Undang-Undang Dasar kita. Dan yang jelas walaupun hanya memeriksa tanggungjawab kata-katanya akan tetapi penjelasannya waktu itu masih ada satu badan yang harus terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, jadi badan independent.

BPK sendiri berdiri sebenarnya 1 Januari 1947 waktu itu di Magelang, 12 April 1947 baru aktif dan dipindahkan ke Yogya. Berjalan panjang dan tahun 2001 ada amandemen ketiga dan amandemen ketiga ini adalah kunci perubahan menjadi tonggak reformasi menuju *good government* ini memperkokoh BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri.

Ada dua hal yang penting, tadinya berbicara tanggungjawab sekarang pengelolaan dan tanggungjawab. Jadi bukan hanya berbicara pengelolaan keuangan negara, tertib, taat Peraturan Undang-Undang, ada 7 disitu, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dengan memperhatikan asas keadilan, tapi juga pengelolannya dan ini yang penting adalah pengelolaan kegiatan seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan Undang-Undanganya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Jadi semua pengelolaan itu BPK memeriksa. Yang kedua, satu perencanaan walaupun satu keberadaan mengatakan satu itu satu, tapi satu itu ditekankan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditambahkan lagi professional.

Dan jelas sekali bahwa arahnya satu titik, negara yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur, jelas sekali. Anelia kedua Undang-Undang 2045 dengan tujuannya adalah negara yang terbuka dan bertanggungjawab, nilainya BPK bebas,

mandiri dan profesional untuk memeriksa, mengelola dan bertanggung jawab keuangan negara.

Ada 4 Undang-Undang implementasi tapi yang paling penting terakhir ada satu surat edaran Mahkamah Agung. Dalam rumusan hukum kamar pidana yang mengatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK. Jadi jelas disitu ditekankan BPKP dan yang lainnya tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara.

Jadi sebenarnya pegangan untuk hakim jelas walaupun ini ada satu keputusan MK Nomor 31 Tahun 2011 mengatakan bahwa KPK dapat berkoordinasi bukan hanya dengan BPK, BPKP bahkan dapat memberikan sendiri. Tapi saya berpendapat karena ini yang belakangan, menurut saya ini yang dipakai.

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan, saya harus mengatakan bahwa berdasarkan wewenang yang ada berdasarkan akuntabilitas di audit oleh akuntan publik yang disetujui oleh DPR RI, lalu untuk menjamin mutu pemeriksaannya, pengelolaannya di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara lain. BPK juga sudah ada di tahun 1968 menjadi anggota daripada International Organization of Supreme dan semua tata cara BPK sudah memenuhi menerapkan sesuai international standart, karena masuk dalam standart audit internasional. Bahkan BPK ini dipercaya untuk mengaudit Badan Atom Dunia. Jadi saya katakan bahwa internationaly, BPK itu sudah *acceptable*. Nah, betul penekanan masih laporan keuangan tapi ini benar-benar tapi semua mengatakan bahwa memang ini tarafnya mungkin sekitar 10-5 tahun lagi masih jalan begini.

Rekomendasi belum maksimal diikuti, dipatuhi, ini satu pertanyaan besar. Saya tidak dalam tetapi yang saya dengar sekitar 76% baru diikuti, dipatuhi. Pertanyaannya kenapa, saya akan sampaikan rekomendasinya.

Ada satu pertanyaan memang bagaimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, karena keuangan negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara adalah semua yang, baik barang atau uang ataupun semua kewajiban yang bisa dijadikan uang dan jadi kekayaan negara sedangkan kalau di Undang-Undang BUMN adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Ini memang satu hal yang kadang menjadi beban.

Pertanyaannya rekomendasinya apa, pertama bagaimana selalu berkata kita kurang pegawai. Saya berkata, jika kita bisa memanfaatkan teknologi dan peraturan ada, maka sebenarnya efektifitasnya bisa ditingkatkan dengan biaya yang ada, efektifnya bisa maksimum. Pertama, estimasi regulasi, selalu dikatakan kadang-kadang tidak bisa memeriksa BUMN karena tidak ada orang. Ada satu peraturan di pasar modal yang mengatakan bahwa *public company* dan *riset company*, kalau *public company* itu satu perusahaan yang bertanggungjawab melibatkan publik, misalnya bank walaupun tidak jual saham dia *public company* atau mereka yang sahamnya sudah lebih dari negara tapi *public company*. Dan *public company* itu 6 bulan sekali harus melaporkan laporan keuangan untuk publik dan mempunyai keterbukaan kepada publik.

Saya menganggap BUMN ini milik Bapak-bapak dan milik Ibu-ibu sekalian. pemegang sahamnya 260 juta rakyat Indonesia. BPK sebenarnya menyatakan bahwa BUMN itu public company. Denga menyatakan bahwa BUMN public company karena pemegang saham 260 juta rakyat Indonesia, otomatis OJK pun ikut mengawasi, laporan keuangan wajib dikeluarkan.

Yang kedua adalah digitalisasi, semua berbicara digitalisasi pelaporan, bicara buget. Saya punya pengalaman di bursa efek, kita tahun 2016 sudah pakai namanya XBRL (Extensible Bisnis Reporting Language). Jadi semua akun-akun ekonomi dibuat

sesamaan. Ini adalah satu lembaga di dunia yang lebih kurang 50 ribu riset company sekarang ini di 50 negara. Dan sekarang semua 700 company bisa mengirimkan laporan keuangannya secara digital, bisa ditarik bahkan pakai excel. Dan ini sudah diterapkan Itali itu 11 ribu publik company sudah mulai memakai ini. Dan biayanya gratis Pak, karena XBRL itu ada internasional organization yang nonprofit. Saya percaya sebenarnya 6 bulan bisa di-*apply* di BPK. Digitalisasi pelaporan pakai XBRL.

Lalu apakah perlu setiap ketemu, katakan ke Aceh terbang, Video Call sudah jalan bahkan kalau perlu hologram orang bicaranya. Ini benar-benar bisa meningkatkan efektifitas, bayangkan jika itu *public company* yang kedua adalah digitalisasi pakai XBRL.

Yang ketiga adalah mewajibkan Deli Balanced. Saya percaya BUMN Deli Balanced bisa walaupun angka transaksinya seminggu sebelumnya akan tetapi setiap hari ada *balanced*. Jika itu setiap hari ada *balanced*-nya mereka *public company*, mereka digitalisasi, seharusnya bulan kedua semua laporan sudah dilakukan BPK sebelum tengah tahun BPK sudah bisa memberikan penilaiannya.

Pertanyaan selalu *audity*, karena kalau kita bicara *report* kebelakang, ini sebenarnya banyak sekali di swasta di mana kakeknya komisaris utama, anaknya direktur utama, direktur keuangannya adalah cucunya. Saya menyarankan *audity* itu harus punya *license* yang harus independent dan tidak afiliasi.

Prioritas pemeriksaan, kita memang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, memeriksa LKPP dan LKPD tapi LKKL sebenarnya mungkin bisa berdasarkan priority. BUMN bisa priority dan kita harus mulai memandatkan Kantor Akuntan Publik. Saya percaya efektifitas pemeriksaan bisa ditingkatkan jika 6 hal ini dilakukan.

Yang kedua adalah BPK itu mempunyai fungsi memberikan pendapat kepada lembaga dan mempunyai juga hak wewenang memeriksa perencanaan pelaksanaan. Efisiensi bisa ditingkatkan, perencanaan saya pernah berbicara dengan seorang Ketua Fraksi. Dia bilang kenapa satu lembaga yang besar itu sosialisasinya bisa puluhan kali setahun. Perlu peraturan kenapa Balai Latihan Kerja itu semua bahkan PTP punya masing-masing. Kenapa protokol, feodalisme masih berkembang di sini, kenapa 70 dari 115 BUMN berkantor pusat di Jakarta. BPK bisa memberikan pendapat dan memeriksa perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Jika itu bertambah kepada publik ini sama pentingnya dengan audit kinerja.

Memperkuat satuan periksa untuk tujuan tertentu, artinya begini tidak semua orang talent pun sangat dibutuhkan. Sudah waktunya BPK mempunyai talent orang yang ahli di pertambangan, di property, orang ahli di suatu produk sehingga menjadi kuat.

BPK adalah satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan perkara menghitung keuangan negara. Sudah mengaudit lebih dari 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, sebenarnya big data BPK kalau bisa secara berkala menghitung keuangan negara, bukan kekayaan negara tetapi keuangan negara, BPK punya datanya semua.

Memastikan *clear, clean, correct*, wibawa kelembagaan BPK akan tertantang jika rekomendasi tidak diikuti. Kita dengar, baca, bagaimana kasus besar tidak direkomendasi. Ini terjadi karena 3 hal, bagaimana secara konten itu *auditable, accountable*. *Clean* berbicara profesionalisme, integritas sangat penting, dan ketiga *correct* adalah akurat. *Clear* biasanya ada kesamaan pendapat dengan para *audity* dan BPK. Jika *clear, clean dan correct*, kesamaan pendapat, *auditable*, profesionalism, integrity, dan *correct*, saya percaya semuanya rekomendasinya mau tidak mau diikuti dan dibawah kelembagaan yang lain.

Menurut Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, semua laporan BPK terbuka untuk umum. Tapi sekarang memang tidak ada yang bisa, jika dibuka satu akses digital sambungan di XBRL, XBRL itu bisa dibuka secara oleh publik, maka publik akan menjadi pengawas dari BPK juga. Dan ini secara Undang-Undang dimungkinkan. Jadi semua publik bisa melihat hasil kerja BPK.

Yang ketujuh adalah ada pertanyaan, sebenarnya Kepala Daerah itu nakal atau tidak mengerti. Saya punya satu pendapat, ini adalah buah dari reformasi Pak. Seorang yang maaf-maaf sekali pendidikannya tidak tinggi, tidak mau berubah, tiba-tiba menjadi Walikota. Dan dia memang tidak mengerti, tidak pernah menjadi birokrat. Dan tidak tahu ada seorang gubernur ditangkap dia bicara saya bekas tukang jeruk, masa kasih uang kepada orang susah tidak boleh. BPK mungkin salah satunya mempunyai satu rencana taktis untuk sosialisasi dan edukasi kerja BPK.

Jika 7 hal ini dilakukan saya percaya efektifitas dan wibawa BPK akan meningkat. Oleh karenanya, BPK bertransformasi, laporan keuangan masih lebih banyak, tapi harus mempunyai peran yang lebih strategis. Harus mulai masuk perencanaan, tingkatkan efisien kerja daripada lembaga publik. Yang kedua, BPK bukan hanya sekedar auditor tetapi juga menjadi .... Faktor pertumbuhan ekonomi. Keahlian, talent dari para auditor sudah sangat dibutuhkan dan karenanya ada satu pertanyaan besar, perlukah BPK mempunyai independent dalam perekrutan pegawai dan budget. Artinya ada di APBN akan tetapi di beberapa negara sudah mulai. Ini menjadi pertanyaan.

Yang penting BPK itu partner dan bukan broker, artinya dalam satu principle agent teory memang DPR RI ini mewakili rakyat mempunyai kedaulatan yang besar. Dan agen kelompok kecil Anggota, selalu terjadi konflik dan auditor BPK biasanya menjadi penjemabatan untuk memastikan bahwa informasi kegiatan laporan Pemerintah sudah diuji layak.

Saya melihat satu pasal penjelasan, memang di amandemen keempat tambahan peraturan dikatakan Undang-Undang terdiri dari pasal dan ayat. Apakah artinya penjelasan itu dibuang, tetapi jiwa dari penjelasan ini menurut saya masih ada. Satu jiwa ini mengatakan bahwa DPR RI lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kekuatan rakyat sebagai principle, maka semua harus. Tapi yang penting Pasal 28 mengatakan juga bahwa tanggungjawab Pemerintah itu besar, tapi perlu satu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Jadi kalau pernah ada usulan DPR RI itu tidak milik BPK lagi, saya rasa penjelasan ini jiwanya jelas sekali, perlu ada Undang-Undang.

Karenanya BPK itu...(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Tinggal 1 menit lagi Pak.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. TITO SULISTIYO, S.E., M.A.F.):**

BPK itu partner bukan broker daripada yang diperiksa dan BPK lah alat daripada DPR RI yang memegang kedaulatan rakyat untuk menjembatani bahwa informasi kegiatan laporan menjamin informasi laporan di Pemerintah dan disampaikan sudah diuji layak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, pas waktunya 15 menit.

Kita langsung masuk ke sesi kedua, tadi sudah disampaikan dengan cukup detail dan baik. Kami persilakan dari sisi sebelah kanan Ibu Tuti Kusuma Wardani untuk memulai yang pertama.

Silakan.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Tito Sulistiyo yang saya hormati.**

Tadi Bapak Tito sangat konsen dengan tema, surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang berhak menentukan kerugian negara adalah BPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan laporan keuangan menghasilkan opini. Sedangkan pemeriksaan investigasi, mendeteksi adanya kerugian negara atau korupsi. Saya ingin tahu Pak, bagaimana seandainya nanti Bapak lolos menjadi Anggota BPK bisa menyelaraskan antara temuan dan predikat dalam mengawal keuangan negara ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita pindah ke sisi sebelah kiri Bapak Prof. Hendrawan.

Silakan.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Tito Sulistiyo.**

**Selamat siang dan salam kebangsaan untuk kita semua.**

Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi karena dalam paper dan presentasi Bapak Tito ada aspek filosofis dan historis yang sering diabaikan oleh banyak kandidat.

Yang kedua, saya ingin bertanya Bapak Tito ini uraiannya masih normative menurut saya. BPK harus menjadi partner, bukan broker, tapi aspek positif realitas yang ada sekarang itu seperti apa, jangan-jangan sebagai deller misalnya, apalagi kalau kita menggunakan perspektif industrial. Yang saya lihat Bapak Tito disini memiliki *back ground* yang kuat ...(suara tidak jelas) Pak Tito ini BPK dan BPKP disebut dalam presentasi Bapak Tito, tetapi apakah BPKP jujur, karena ...(suara tidak jelas)

Terima kasih.

Salam kebangsaan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya Bapak Michael Jeno.

**(KASET 2 SUARA TIDAK TEREKAM)**

**KETUA RAPAT:**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,**  
*Om swasti astu,*  
*Namo budaya,*  
**Salam kebajikan.**

**Yang terhormat saudara Indra Utama, S.E., M.M., C.F.E.,  
Yang kami hormati juga seluruh Anggota Komisi XI DPR RI,  
Dan hadirin yang berbahagia.**

Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada hari ini dalam uji kepatutan dan uji kelayakan atau fit and propertest Calon Anggota Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia. Uji kepatutan dan uji kelayakan bagi Calon Anggota BPK merupakan pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di luar ruang rapat dan bersama kita telah hadir saudara Indra Utama, S.E., M.M., C.F.E.
2. Waktu yang kami berikan total 45 menit yang terdiri dari 15 menit paparan presentasi makalah dan 30 dalam tanya jawab dan diskusi pendalaman.

Bapak tolong dimanfaatkan waktu tersebut, mudah-mudahan bisa menjawab semua persoalan.

Baik, Bapak Indra Utama kita langsung masuk ke acaranya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pemaparannya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Pimpinan rapat dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan,  
Serta para hadirin sekalian yang berbahagia.**



Terima kasih saya sampaikan kepada Komisi XI DPR RI karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, pemaparan visi dalam rangka sesi Calon Anggota BPK RI.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya menyampaikan materi dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan berintegritas”. Dari pokok-pokok pemikiran tersebut akan saya uraikan atas 3 pokok permasalahan. Yang pertama, keberadaan, tugas dan wewenang, jenis pemeriksaan dan opini BPK. Yang kedua, saya akan menyoroti kelemahan utama yang ada pada BPK saat ini, yaitu tentunya integritas. Berikutnya, atas permasalahan yang ada pada BPK saat ini saya mencoba apalagi saya diberikan amanah untuk menjadi Anggota BPK, saya punya visi dan misi untuk menjadikan BPK berintegritas. Demikian pokok-pokok pemikiran yang akan saya sampaikan.

### **Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan.**

Sebagaimana kita ketahui, BPK diberikan mandate untuk bertugas oleh konstitusi dan Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab kepada negara. Atas mandate tersebut sedikit saya jelaskan bahwa BPK sudah berdiri di satu landasan yang kokoh. Yang pertama, adanya landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E Angka 1.

Berikutnya, didasari oleh adanya landasan operasional, yaitu adanya 4 Undang-Undang, yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Lanjut, sebagaimana kita ketahui tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK didasari oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dan dalam melakukan pemeriksaan, sudah dilandasi dengan adanya standar pemeriksaan.

Lanjut, sedangkan wewenang BPK dapat saya uraikan. Pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyajikan laporan pemeriksaan, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai kewenangan meminta keterangan dan/atau dokumen dan wajib diberikan oleh setiap orang dan/atau instansi yang mengelola keuangan negara yang sedang dilakukan audit atau dan istilah auditnya *audity*. Yang ketiga, BPK menetapkan standar dan kode etik pemeriksaan. Berikutnya, BPK diberikan wewenang untuk menyatakan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara dan/atau pengelola keuangan negara. Selanjutnya, mempunyai wewenang memberikan pendapat berkaitan dengan pertimbangan masalah kerugian negara.

Lanjut, BPK sendiri mempunyai 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan terakhir pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang outputnya adalah opini. Yang kedua, pemeriksaan kinerja adalah

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dengan tujuan menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas kegiatan atau program instansi Pemerintah. Output dari pemeriksaan kinerja ini adalah temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disingkat dengan PDTT. PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa termasuk adanya pemeriksaan investigative yang outputnya adalah berupa kesimpulan. Bisa dikatakan ini adalah pemeriksaan atas adanya implikasi kecurangan.

Lanjut, terkait dengan pemeriksaan keuangan tadi BPK mempunyai output, yaitu opini. Opini adalah pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasar atas 4 parameter atau kriteria. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah, yang kedua kecukupan pengumpulan data, yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terakhir efektifitas sistem pengendalian internal.

Terdapat 4 jenis opini BPK, yang pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang kedua Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang ketiga Opini Tidak Wajar, terakhir Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau istilahnya disclaimer opinion.

Lanjut, belakangan ini kita sering mendengar istilah WTP, opini WTP yang diterima dari BPK oleh suatu entitas biasanya akan menunjukkan tolak ukur atau sinyal keberhasilan suatu entitas dalam mengelola akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini semua entitas pengelola keuangan tingkat pusat maupun di daerah berlomba-lomba agar memperoleh opini WTP dari BPK. Namun, masyarakat umum sebenarnya harus bisa mendapatkan informasi dari BPK bahwa opini WTP yang diberikan itu sudah dilakukan oleh BPK sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan disimpulkan.

### **Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan.**

Selanjutnya ijin saya memaparkan kondisi terkait kelamahan utama BPK yang ada pada saat ini, yaitu praktik-praktik suap yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk korupsi. Dengan adanya praktik suap ini menimbulkan kepercayaan publik kepada BPK atas opini yang diberikan kepada audity yang diperiksa. Beberapa tahun yang lalu kita sudah menyaksikan drama OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum auditor BPK. Kondisi ini boleh dikatakan karena lemahnya integritas oleh auditor BPK.

Apabila praktik suap seperti ini maka apapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Anggota BPK pasti tidak akan bisa mengantarkan BPK menyampai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Bagaimana pun kapabilitas SDM yang dimiliki BPK, bagaimana pun canggihnya teknologi informasi yang dibangun oleh BPK, bagaimana pun dukungan yang diberikan oleh Pimpinan. Namun, apabila mental dari SDM BPK khususnya auditor maka itu tidak ada gunanya. Karena kita sudah mengetahui bahwa bagaimana dampak dari praktik korupsi ini, tidak hanya yang terkait mengakibatkan kelemahan dari segi keuangan, namun segala lapisan kehidupan akan terpengaruh terhadap praktik korupsi. Masalah HAM, masalah lingkungan, masalah demokratisasi, ini dampak dari bahaya dari praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di semua instansi khususnya di BPK. Oleh karena itu, apabila saya mendapatkan amanah saya ingin mengembalikan integritas BPK.

Ini beberapa contoh praktik korupsi yang sudah inkrah, yang sudah dilakukan oleh auditor BPK dan sudah diproses secara hukum. Yang pertama, pemeriksaan keuangan pada Pemerintah Bekasi yang mengakibatkan audit pada saat itu ada Walikota Bekasi. Yang berikutnya adalah pemeriksaan keuangan pada Kemendes tahun 2017. Yang ketiga, pemeriksaan keuangan pada Dirjen Perhubungan Laut. Berikutnya adalah pemeriksaan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada PT. Jasa Marga tahun 2015-2016.

**Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan,  
Para hadirin yang berbahagia.**

Saya mempunyai pikiran dan ide-ide bagaimana BPK ini tidak lurus berlari kerja. Untuk itu, apabila saya diamanahkan nanti sebagai Anggota BPK saya mempunyai visi, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang berintegritas untuk mendorong terwujudnya keuangan negara yang transparan, akuntabel demi kesejahteraan rakyat.

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, saya tuangkan dalam dua misi. Yang pertama, memberdayakan manajemen kelembagaan atau tata kelola internal. Yang kedua, meningkatkan sinergitas dengan pihak eksternal. Itu misi yang akan saya integrasikan.

**KETUA RAPAT:**

Satu menit lagi Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Untuk mengintegrasikan misi tersebut, pertama saya akan melakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, melakukan tindakan penindakan, besarannya pencegahan, dan yang kedua penindakan. Pencegahan termasuk meningkatkan integritas tadi dan profesionalisme SDM BPK. Melakukan penindakan adalah langsung memproses secara hukum terhadap oknum yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Yang berikutnya meningkatkan sinergitas dengan pihak eksternal diantaranya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, sinergitas dengan DPD, sinergitas dengan lembaga legislative DPR RI dan DPRD, yang terakhir yang utama yang tidak boleh kita abaikan adalah sinergitas dengan melibatkan para masyarakat. Tentunya masyarakat akan berperan sebagai peraturan perundang-undangan.

**Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan,  
Para hadirin yang saya hormati.**

Demikianlah pokok-pokok pemikiran yang bisa saya hadirkan pada forum yang terhormat ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk BPK dan untuk bangsa Indonesia seluruhnya.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Indra Utama kami telah mendengarkan paparan Bapak. Kemudian masuk ke sesi kedua, yaitu pendalaman dan tanya jawab.

Kami persilakan dari sisi sebelah kanan Ibu Indah Kurnia untuk memulai.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI dan Bapak Indra Utama yang kami hormati.**

Bapak coba tampilkan halaman yang pertama, Bapak tadi presentasi yang pertama kali halaman satu. Bapak disitu menuliskan yang nomor tiga khususnya, BPK Integritas. Itu memang dibikin huruf kecil, maksudnya itu hanya untuk keindahan tulisan atau ada makna lain Pak. Sampaikan secara langsung Pak, mohon ijin sedikit saja.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Baik, ini untuk stressing maksudnya integritas sangat penting.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Tapi kenapa dikecilkan, berartikan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Ini stressing Bu, kalau yang besar semua orang itu tidak melihat bahwa integritas itu sangat penting.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Jadi sangat penting bagi BPK adalah membangun integritas.

Terima kasih Bapak Indra.

Pertanyaan berikutnya adalah jika Tuhan mengizinkan Insya Allah dan kami semua mayoritas memilih Bapak Indra Utama sebagai bagian dari BPK yang 9 orang itu. Nah, kira-kira Bapak Indra apakah Bapak mampu melakukan upaya-upaya untuk membangun integritas yang tadi Bapak secara jelas sudah menyampaikan beberapa contoh integritas yang sudah mulai runtuh dengan contoh-contoh kasus itu. Apakah Bapak Indra Utama mampu membangun BPK seperti yang Bapak inginkan di pemaparan Bapak kepada kami ini, khususnya untuk meningkatkan integritas dalam hal bukan hanya pencegahan saja akan tetapi juga penindakan kepada orang-orang atau oknum yang Bapak rasa itu potensi untuk meruntuhkan integritas dari BPK.

Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Ibu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Maaf Pak, maksud saya caranya bagaimana.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Saya jawab langsung atau bagaimana.

**KETUA RAPAT:**

Bapak kumpulkan semua pertanyaan nanti dijawab.  
Silakan Bapak Lili Asdjuredja, senior kita dari Komisi VI DPR RI.

**F-PG (Ir. H. LILI ASDJUREDJA, S.E.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Indra yang saya hormati.**

Tadi Bapak Indra menyampaikan runtuhnya integritas BPK, disebutkan disini kasus-kasus yang pada akhir-akhir ini di BUMN, kemudian Bupati, Walikota, padahal di dalamnya dia opininya sudah WTP. Kira-kira apa sebetulnya yang sering terjadi seolah-olah tadi yang disebutkan oleh Bapak Indra runtuhnya integritas BPK, kira-kira apa yang menyebabkan. Kemudian yang kedua, coba dijelaskan mengenai audit BPK atau investigasi BPK bila digugat oleh pihak ketiga. Bagaimana pendapat Bapak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Dr. Lili.  
Pindah sebelah kanan Ibu Tuti Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Indra Utama yang saya hormati.**

Tadi dalam presentasi Bapak Bapak sangat konsen sekali terhadap opini WTP vs kasus korupsi ya Pak, dengan banyak contoh-contoh tadi yang Bapak sudah paparkan. Memang seharusnya dengan opini WTP yang diberikan oleh BPK itu berarti sistem pengendalian yang diinternal harusnya sudah terbangun dengan baik, sehingga sulit sekali untuk terjadi penyimpangan. Namun, banyak sekali Kepala Daerah yang menjadi tersangka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPK menjadi tergerus.

Seandainya nanti Bapak terpilih menjadi Anggota BPK, langkah-langkah konkrit apa yang akan Bapak ambil. Karena sebenarnya keputusan yang ada di BPK

adalah kolektif kolegial, apakah mampu Bapak dengan idealism Bapak dengan seorang diri nanti di tengah-tengah yang lain memberikan keputusan yang berbeda.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Tutik.  
Selanjutnya kepada Ibu Elviana silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Indra Utama, S.E., M.M., C.F.E. yang juga saya hormati.**

Pertama, selamat setidaknya pernah mengikuti Calon Anggota BPK sebelum Bapak terpilih.

Dan saya lihat dari sekian banyak makalah yang sudah masuk kepada kami, Bapak sudah berusaha paham betul fungsi BPK, wewenang BPK, kelemahan BPK. Yang saya ingin dapat pendalaman dari Bapak supaya Bapak terpilih, Bapak sudah menjadi auditor sejak tahun 1987 di Kementerian Keuangan, jadi soal mengaudit sudah cakap ya. Tapi tidak bisa dipungkiri Pak, di Kementerian Keuangan itu SDM-nya cukup, sementara di lembaga yang akan Bapak masuki itu jumlah auditornya sangat kurang, satu tahun itu sekitar 32% yang bisa mereka audit dari seharusnya 100%. Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan terhadap kondisi BPK seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terakhir kami persilakan kepada Ibu Hj. Lilis Santika.

**F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Indra Utama yang saya hormati.**

Alhamdulillah Bapak di dalam fit and propertest ini dan mudah-mudahan adalah sesuatu yang berharga untuk bangsa ini di mana pemikiran-pemikiran Bapak sebagai auditor yang sudah cukup mumpuni. Mungkin disini yang saya ingin tahu dari Bapak bahwa sebagai calon yang mudah-mudahan tentu Bapak berharap bisa di posisi ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk masa depan bangsa ini agar BUMN-

BUMN ini bersih dari tangan korup. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa klasifikasi dari opini BPK ini ada yang WTP tapi memang masih bermasalah. Kita butuh kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN-BUMN dan anak perusahaannya dengan pengalaman kerja yang sudah Bapak dapatkan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Nambah satu Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

**Bapak Indra Utama yang saya hormati.**

Saya tertarik dengan kalimat dengan integritas Pak, jadi saya hanya ingin membuat pernyataan yang saya minta disikapi oleh Bapak Indra. Ada banyak orang yang kemudian berkesimpulan bahwa penyimpangan dilakukan oleh siapa pun terutama oleh auditor itu terkait dengan belum cukupnya kesejahteraan yang dimiliki oleh para auditor. Bapak menyikapinya seperti apa Pak, terkait dengan hal tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, ada 6 pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Indra Utama untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Terima kasih.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

Yang sudah menyampaikan pertanyaan terhadap pemaparan saya, moga-moga saya bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab dari Ibu Indah Kurnia yang tadi sudah saya jawab mengenai huruf kapital atau huruf kecil.

Yang kedua, mampukah untuk menjaga integritas, di sini ditanyakan adanya kegiatan pencegahan dan penindakan. Insya Allah dengan niat yang baik, moga-moga dengan leadership transformasional yang kita miliki kita akan mengupayakan adanya peningkatan integritas SDM BPK secara umum khususnya auditor BPK. Peningkatan upaya tersebut, baik kita lakukan dengan pencegahan maupun

penindakan dan peningkatan profesionalisme SDM dan auditor BPK. Dan tentunya untuk peningkatan profesionalisme ini akan adanya pendidikan yang berkelanjutan. Kita akan upayakan terus membangun sistem yang transparan. Insya Allah kita mampu dengan dukungan seluruh SDM dan stakeholder. Itu jawaban yang pertama, tadi menanyakan apakah kita mampu, Insya Allah kita mampu.

Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Dr. Lili Asdjudiredja. Ada dua pertanyaan dari Bapak, terkait dengan adanya opini WTP, namun di atas audit atau lembaga yang sudah dilakukan OTT tersebut kenapa terjadi korupsi. Itu yang pertama yang saya tangkap tadi. Yang kedua, adanya hasil audit investigasi BPK yang digugat oleh pihak ketiga, itu bagaimana pendapatnya.

Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa ada suatu audit baik itu Pemda, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, yang sudah mendapatkan WTP ternyata pejabatnya kena OTT BPK. Nah, tadi saya sudah jelaskan jenis pemeriksaan BPK itu ada tiga, yang pertama pemeriksaan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja dan terakhir pemeriksaan investigative. Nah, WTP ini dalam konteks melaksanakan pemeriksaan keuangan. Substansinya opini yang diberikan BPK itu tidak menilai kebenaran kegiatan. Namun, kepada kewajaran informasi yang sudah disampaikan dalam laporan keuangannya. Jadi tidak ada korelasi antara korupsi dengan opini WTP, karena opini WTP itu dilakukan dan berdasarkan mungkin ibaratnya ini tata kelola administrasi keuangannya, di dasarkan kepada empat parameter yang tadi sudah saya sampaikan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah, bagaimana kecukupan pengungkapan data, bagaimana SPI handal atau tidak, yang keempat kegiatan yang dilakukan oleh audit tersebut melanggar aturan Undang-Undang atau tidak. Kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan itu dia dapat WTP.

Secara umum dalam dunia audit untuk melakukan pemeriksaan tidak semua kegiatan itu diperiksa, namun dilakukan sampling atas bukti-bukti. Dan untuk menentukan sampling itu ada formulanya. Nah, pada saat auditor BPK melakukan audit keuangan dilakukan sampling untuk suatu kegiatan itu dengan metode yang sudah dirumuskan. Ternyata dari sampling tadi ternyata tidak ada masalah parameter yang empat tadi sudah sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah, wajar BPK memberikan opini WTP.

Namun, di luar itu ternyata ada indikasi penyimpangan. Nah, seharusnya itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan PDTT tadi Pak. Jadi ada informasi kecurangan, seharusnya Anggota BPK memberdayakan tim untuk mengecek kecurangan tadi, yang tadi diluar pemeriksaan keuangan Pak. Jadi korelasi antara korupsi dengan WTP seperti itu.

Yang kedua, adanya hasil audit investigasi yang juga oleh pihak ketiga. Nah, tentunya hasil audit investigasi yang sudah dilakukan auditor BPK dilakukan berdasarkan bukti, dilakukan quality assurance, sudah dibikin kesimpulan yang tentunya akan direview berjenjang, sudah ada sistem pengendalian mutunya. Artinya, dengan bukti-bukti yang sudah valid, itu bisa diangkat sebagai kesimpulan dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada di BPK. Dan itu tentunya kalau sudah berdasarkan bukti dan fakta, itu secara resmi bisa untuk di-*follow up* atau disampaikan kepada aparat penegak hukum.

**F-PG (Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E.):**

Barangkali interupsi.



Jadi tadi disebutkan investigasi BPK atas dasar itu tersangka yang diperiksa kemudian digugat, jadi bagaimana ini.

### **CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Tentunya BPK bisa nanti sebenarnya menurut hemat saya kesimpulan laporan BPK itu kan tentunya berjenjang dari tim dilapangan, Anggota tim merumuskan ke Anggota, kepada Ketua Tim, ada supervisor, tentunya ada Anggota yang mereview yang lebih lanjut.

Sebagai gambaran Pak, di BPK itu kan sekarang sudah ada unit investigative, sudah ada struktur khusus. Mohon maaf saya tahun 2014 di forum ini Pak, pernah juga menyampaikan ide untuk dibentuk unit investigative setingkat minimal eselon II di BPK, karena pada tahun 2014 ada unit yang structural. Namun, diperkembangan jalan sekira tahun 2017 sudah ada struktur organisasi BPK. Artinya, pemikiran saya yang dulu itu terimplementasikan.

Nah, terkait dengan yang tadi itu saya yakin setiap laporan hasil investigative yang sudah diformalkan oleh BPK itu sudah memberikan bukti yang layak. Kalaupun digugat oleh pihak ketiga itu hal yang wajar, apakah pihak ketiga itu punya bukti yang cukup. Terima kasih Bapak Lili.

Menjawab pertanyaan Ibu Tutik Kusuma Wardani. Ini mungkin pertanyaan tadi sama dengan menjawab pertanyaan Bapak Lili terkait dengan opini WTP dan Kepala Daerahnya tengah kena OTT. Sepertinya sudah terjawab tadi ya Ibu.

Yang berikutnya mengenai keputusan BPK itu kolektif kolegial. Bagaimana apakah bisa mengimplementasikan, Insya Allah dari 9 Anggota BPK memang mereka itu punya *leadership* yang kolektif kolegial. Keputusan pun diambil secara bersama, walaupun ada satu Anggota yang berbeda pendapat tentunya dimusyawarahkan secara mufakat. Namun, keluar hasil keputusan tersebut itulah keputusan akhir BPK. Nah, kita bagaimana bisa meyakinkan sesama teman itu karena kerja kita di BPK ini bukan hanya masalah kerja dunia tapi kerja akhirat juga, artinya nawaitu kita itu ibadah.

Jadi 9 Anggota BPK memang mempunyai visi dan misi yang sama, niatnya kerjanya ikhlas tuntas dan cepat, jadi kalau pun ada perbedaan ya dimusyawarahkan. Tentunya masing-masing Anggota itu karena mereka itu *leadership* di BPK tentunya harus mempunyai transformasional leadership bagaimana mengambil keputusan yang bulat, terbaik tentunya akan masing-masing Anggota itu nanti punya pandangan BPK seperti ini, kekuatan BPK begini, tantangan BPK kedepan, inilah peluang-peluang BPK. Mudah-mudahan dengan begitu keputusan kolektif kolegial akan tercapai. Saya kira begitu Ibu.

Berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Elviana walaupun Ibu Elviana sedang keluar. Mungkin saya akan menjawab, terkait dengan pertanyaan Ibu Elviana intinya menanyakan bagaimana kuantitas auditor BPK yang kurang. Beliau mengatakan kalau di tempat kami auditornya cukup, dengan pengalaman yang sekian, sedangkan BPK-nya kurang, apa yang harus saya lakukan. Ini pemikiran saya kalau saya duduk di Gedung BPK, dapat amanah dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan ridho Allah SWT, walaupun saya hanya berikhtiar di sini.

Dengan jumlah auditor BPK yang terbatas, dengan audit yang begitu banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di semua KL, Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya dengan kondisi yang ada ini harus dibikin dulu kondisinya yang sesaat dan singkat, dibikin skala prioritas untuk melakukan audit, tidak semua audit itu akan dilakukan pemeriksaan. Kedepannya dilakukan penambahan SDM BPK,

auditor BPK, tentunya untuk penambahan SDM BPK tentunya harus ada kerja sama dengan Kemanpan RB atau BAKN.

Yang berikutnya tentunya kita harus memberdayakan karena tadi Ibu mengatakan auditornya kurang dan auditynya banyak. Nah, tentunya harus diberdayakan kerja sama. Nah, inilah kita sinergitas itu artinya komunikasi dan kerja sama dengan audity yang ada, kerja sama ini tentunya harmonis dalam rangka tujuan yang lebih besar, lebih cepat dan efektif. Nah, bisa kita manfaatkan BPK itu sebagai auditor negara, aparat eksternal, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan aktif untuk mengatasi SDM BPK yang kurang tadi. Bisa bekerja sama dengan yang ada di Kementerian atau lembaga, bisa bekerja sama dengan unit SPI yang ada di BUMN. Nah, itu yang bisa dilakukan, saya kira begitu Ibu.

Berikutnya saya akan mencoba menjawab...(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Waktu tinggal dua menit lagi Pak.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Ini tinggal satu lagi Pak, Ibu Lilis Santika sebagai Anggota BPK apa yang akan dilakukan WTP ini, konsep WTP ini. Nah, sepertinya karena menyangkut WTP tadi saya sudah mengulas menjawab pada saat pertanyaan yang pertama. Bagaimana konsep WTP, hubungannya dengan korupsi.

Bagaimana melakukan audit BUMN sesuai dengan pengalaman. Kebetulan saya ini memang auditor, sekolah saya memang sekolah auditor dari STAN dan langsung dunia auditor dari awal sampai sekarang. Namun, karena saya ditempatkan di Kementerian kami tidak melakukan audit kepada BUMN, jadi saya belum ada pengalaman, terus terang saya zero terhadap BUMN. Kami melakukan audit terhadap aparat yang ada di Kementerian Keuangan, kalau BUMN itu mungkin yang audit itu BPKP atay SPI mereka. Jadi kalau untuk audit BUMN saya sampai saat ini nol, saya terus terang saja karena institusi kami hanya mengaudit. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu mengamanahkan kepada saya di Gedung BPK akan saya audit itu BUMN, nanti saya akan bisa cerita kepada Ibu bagaimana cara mengaudit. Terima kasih.

Kepada Bapak Purnamasidi yang terakhir, kurang kesejahteraan auditor intinya begitu ya Pak. Bagaimana mensiasati kurang kesejahteraan auditor, tentunya setiap auditor yang ada di suatu KL, di suatu entitas, BPK, tentunya dari awal sudah menerima kondisi yang akan dimasuki. Auditor BPK itukan tentunya akan menerima kesejahteraan sesuai dengan golongan gaji mereka, tunjangan mungkin masing-masing beda ya Pak. Jadi auditor harus menerima kesejahteraan yang sudah ditetapkan oleh negara Pak. demikian Bapak Purnamasidi serta Bapak Hafisz sebagai Pimpinan dan Bapak, Ibu yang lain saya sudah menjawab semua pertanyaan dari Bapak-bapak. Mudah-mudahan terjawab semuanya, kalau ada kurang saya mungkin bisa menjawab secara tertulis. Tapi saya kira sudah terjawab dengan paripurna Pak.

Sekian Pak, terima kasih.

#### **F-PKS (H. ECKY AWAL MUHARAM):**

Interupsi Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Ecky.

**F-PKS (H. ECKY AWAL MUHARAM):**

Terus terang saya termasuk yang memperhatikan, membaca semua makalah akan tetapi jarang bertanya dan pertanyaan dari selama sekian banyak baru sekarang saya berkomen. Tapi sayang saya tidak bertanya, saya memberikan statement saja. Jadi seorang auditor apakah itu auditor di Pemerintahan yang dikenal dengan APIP, apakah dia internal auditor sebagai SPI, tetapi dia punya *background* auditor ketika ditanya mau apa. Kita punya tantangan tadi dicontohkan salah seorang penanya, terkait dengan BUMN. Dia harus punya *view* jadi pengalaman dan pengetahuannya sebagai auditor dia akan mengapain. Dan ketika seorang mau maju jadi Calon Anggota BPK dia tahu bahwa calon-calon auditynya itu adalah KL, termasuk BUMN. Dia harus mengenali dan kemudian pengetahuan dan pengalamannya apalagi dia sebagai auditor yang bukan auditor saja berani memberian sebuah opsi-opsi apa yang akan dia lakukan terkait dengan di BUMN, di kementerian dan sebagainya, apalagi dia seorang auditor. Kasihan yang profesi auditor ini, auditor ini kayak begini gitu kan.

Jadi saya sangat menyayangkan Pak, harusnya punya keberanian. Memang jujur tetapi kejujuran yang karena ketidaktahuan, harusnya punya vision, ketika dia menulis dan dia maju sebagai Calon Anggota BPK yang disitu harus tahu seperti apa BPK itu dan seperti apa audity itu, problemnya apa, kemudian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dia punya opsi-opsi untuk bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana kalau saya di sana menjadi Anggota BPK akan begini-begini termasuk salah satunya permasalahan di BUMN.

Saya sedih, saya tidak bertanya tapi menggelitik karena saya juga auditor puluhan tahun juga dan tidak begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Ecky.

Bapak mempunyai satu menit untuk closing statement sekaligus Bapak campaign. Kesempatan satu menit untuk mengakhiri dengan baik, kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (INDRA UTAMA, S.E., M.M., C.F.E.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya muliakan.**

Saya akan menutup presentasi saya ini, pertama mohon ijin, mohon maaf Bapak Ecky saya tidak untuk kita saling berdebat atau apa, artinya tidak mengomentari pernyataan Bapak. Cuma saya tadi menjawab pertanyaan dari Ibu, bahwa apa pengalaman Bapak, bukan pendapat Bapak. Kalau pengalaman artinya apa yang sudah saya lakukan selama ini Pak, tadi menurut saya kalau ditanya pengetahuan saya akan jawab teoritis.

Yang kedua, saya akan membikin kesimpulan atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Intinya pertama, apabila saya diamanahkan untuk menjadi Anggota BPK

saya akan mengembalikan integritas BPK, karena saya saat ini lemah integritasnya. Yang kedua, tentunya untuk mengendalikan integritas itu saya punya visi dan misi baik untuk internal atau eksternal. Ketiga, tentunya saya akan melakukan kerja sama, koordinasi dan sinergitas dengan semua pihak eksternal terutama dengan Bapak-bapak yang ada di DPR RI.

Demikian kesimpulan dari presentasi saya Pak.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Berikan *applause* kepada Bapak Indra Utama.

**Bapak dan Ibu sekalian.**

Bapak Indra Utama terima kasih atas paparan dan tanggapan terhadap pertanyaan dari seluruh Anggota Komisi XI DPR RI tadi yang Bapak sampaikan. Untuk itu, kami persilakan dengan hormat Bapak meninggalkan ruangan, silakan kalau mau berjabat tangan.

Bapak dan Ibu sekalian, rapat kita skors 5-6 menit.

**(RAPAT DISKORS)**

**KETUA RAPAT:**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,**

*Om swasti astu,*

*Namo budaya,*

**Salam kebajikan.**

Selamat datang Bapak Dr. Heru Kreshna Reza, Bapak nomor tiga untuk memberikan paparan tentang isi makalah Bapak. Sampaikan dengan singkat, padat dan jelas.

Mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di luar ruang rapat dan bersama kita telah hadir saudara Dr. Heru Kreshna Reza.
2. Waktu yang kami berikan total 45 menit yang terdiri dari 15 menit paparan presentasi makalah dan 30 menit dalam tanya jawab dan diskusi pendalaman. Nanti diakhir acara Bapak diberikan kesempatan 1 menit untuk memberikan *closing statement*.

Untuk mempersingkat waktu maka kami persilakan langsung Bapak Dr. Heru Kreshna Reza untuk membawakan makalahnya. Waktu dan tempat kami persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

**Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swasti Astu,  
Salam kebajikan.*

Mohon ijin untuk menyampaikan paparan makalah sederhana dari saya dengan judul "Membangun BPK yang responsive dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel melalui pemeriksaan yang sinergis, antisipatif, modern dan kohesif".

Adapun ada 3mpat agenda yang akan kami jelaskan, yang pertama latar belakang, kedua tantangan dan perubahan, ketiga langkah-langkah menghadapi tantangan dan perubahan, keempat kesimpulan.

Latar belakang adalah mengingat urgency BPK yang responsive, adaptif terhadap perubahan tantangan dan perubahan lingkungan. Kedua, mandate BPK sesuai Pasal 23E, F, G Undang-Undang 1945, yang ketiga peningkatan kualitas dan manfaat pemeriksaan sesuai Renstra, yang keempat inisiatif strategis BPK terhadap tantangan dan perubahan lingkungan.

Lanjut, kami mencoba memetakan dengan analisa yang sederhana untuk melihat dari kekuatan dari BPK, yaitu SDM yang kompeten, struktur organisasi yang memadai, memiliki SPKN dan SOP yang baku, keempat mandate konstitusi dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan .... Adalah keterbatasan SDM dihadapkan dengan cakupan pemeriksaan, rentang kendali yang panjang, dan sampling pemeriksaan yang terbatas.

Dari sisi oportunitis bahwa optimalisasi pemanfaatan LHP bagi stakeholder, partner DPR RI dalam optimalisasi peran pengawasan. Peran BPK memberikan alternative pilihan kebijakan publik dan peran aktif dalam penguatan regulasi dan sistem keuangan negara. Adapun *track*-nya adalah menurunnya kepercayaan dari lembaga perwakilan atau masyarakat atau *stakeholder*. Reputasion risk terkait dengan pemanfaat dan kualitas pemeriksaan dan penyalahgunaan hasil pemeriksaan BPK oleh *stakeholder*.

Lanjut, dari begitu banyak tantangan dan perubahan dalam masalah sederhana ini kami hanya memetakan 4 saja, yaitu yang pertama adalah harapan atas pemeriksaan BPK, bahwa diketahui dari hasil independent surveyor dari sisi optimalisasi manfaat dan komunikasi kepuasaan *stakeholder* masih belum mencapai target.

Oleh karena itu, ini secara langsung memperlambat atau mengganggu terbentuknya sinergitas antara BPK selaku fungsi pemeriksaan dan juga DPR RI selaku fungsi pengawasan. Yang pada akhirnya juga memperlambat terwujudnya *good government* dan *good governance*. Dan tentu saja pada akhirnya juga memperlambat untuk mencapai tujuan bernegara.

BPK selaku fungsi pemeriksa mempunyai diagram kematangan yang sampai sekarang BPK masih dalam taraf *overside* atau masih berkuat dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi atau bisa naik setingkat atau dalam pemeriksaan kinerja, yaitu ekonomis, efisien dan efektif atau dalam hal menjamin terlaksananya akuntabilitas. Jadi masih dalam taraf *inside*. Hal ini juga

kematangan organisasi disini juga sangat tergantung dari kesiapan Pemerintah di dalam kualitas pertanggungjawaban keuangan negaranya.

Lanjut, tantangan dan perubahan adalah BPK saat ini dihadapkan pada satu tantangan. Di satu sisi adalah jumlah entitas sebanyak 86 Kementerian atau Lembaga, 542 Pemda, 115 BUMN. Dihadapkan dengan jumlah pemeriksa sebanyak 3.231 orang. Oleh karena itu, kita terjadi atau kekurangan pemeriksa lebih kurang 2.900 sekian. Dan hal ini juga memperkecil cakupan pemeriksaan. Selain itu juga peran atau kematangan organisasi sulit untuk dicapai.

Nah, selama ini BPK telah mengambil solusi atau telah melaksanakan alternative untuk mengurangi atau untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu salah satunya dengan *risk base audit*. *Risk base audit* adalah satu metode yang kita memperhitungkan dulu tingkat resiko yang akan dihadapi pada waktu sebelum pemeriksaan akan dilakukan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang rawan masalah itu bisa kita eliminir dan juga pemeriksaan tematik. Dengan tidak pemeriksaan tematik, pemeriksaan itu menjadi sporadic. Dengan pemeriksaan tematik kita bisa lingkup seluruh Indonesia dan ini telah dilakukan.

Lanjut, yang ketiga tantangannya adalah kemajuan teknologi informasi bahwa kita tidak terlepas dalam kondisi revolusi industry 4.0 di mana ketersediaan informasi langsung bisa real time bisa tersaji tetapi dari sisi BPK sendiri kita masih ada risk independent surveyor belum mencapai kepuasan pegawai dalam pemanfaatan IT. Dan dari sisi optimalisasi penyediaan sarana dan juga dari optimalisasi pemanfaatan aplikasi terkait dengan pemeriksaan. Harapan dari kami adalah terjadi otomatisasi proses pemeriksaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi. Yang kedua, pemanfaatan big data dari analitik dan yang ketiga penyediaan dan pemanfaatan sarana kerja TI.

Tantangan yang keempat ini adalah di dalam pemeriksaan kita menggunakan metode pengendali mutu atau quality control dan penjaminan mutu. Pengendalian mutu adalah dilaksanakan oleh Anggota yang bersangkutan sampai tingkat penanggungjawab, jadi yang langsung terlibat dalam pemeriksaan. Sedangkan penjaminan mutu adalah dilakukan oleh yang diluar dari pemeriksaan, sebagai contoh pejabat structural pemeriksa aparat pengawas internal BPK dalam hal ini dan di-review oleh BPK dunia.

Kesemua ini untuk satu tujuan, yaitu peningkatan kualitas pemeriksaan. Hal yang baru mohon ijin yang ingin kami sampaikan adalah di masa datang hendaknya pimpinan kolejal ini dapat juga turut serta langsung dalam hal penjaminan mutu. Dengan demikian akan tercipta mitigasi resiko pemeriksaan dan terjadi percepatan peningkatan kualitas pemeriksaan.

Lanjut, dan ini juga inisiatif strategy kami lakukan ada empat sesuai dengan tantangan dan perubahan. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi dan akses lembaga perwakilan dan pemeriksa BPK. Yang pertama adalah peningkatan efektifitas komunikasi dan akses informasi BPK dengan DPR RI, penyempurnaan peraturan bersama antara BPK dan DPR RI, strategi komunikasi dengan DPR RI dalam peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan yang efektif, sinergi dalam perumusan bahan pendapat dan pertimbangan hukum. Terakhir, mendorong pelatihan bersama BPK dan BAKN, DPR RI.

Inisiatif strategis yang kedua adalah ini juga sesuatu yang baru Pak, untuk mengatasi kesenjangan auditor yang saat ini, yaitu kami mencoba melakukan dengan pola partisipatoring audit. Ciri khasnya adalah melibatkan masyarakat dalam pemeriksaan kinerja, memperkaya informasi dari pengguna langsung dari layanan public, mengatasi terbatasnya SDM pemeriksa serta memperluas cakupan pemeriksa. Hal tersebut sudah dilakukan di negara Selandia Baru, Philipina dan India.

Dan selain itu, dengan digunakannya ... (suara tidak jelas) audit Pak, rencana kedepan itu difokuskan kepada pemeriksaan laporan keuangan. Nah, sumberdaya auditor itu bisa dialihkan untuk pemeriksaan kinerja yang ini sangat konsen dari kami untuk memperbanyak presentasi dari pemeriksaan kinerja. Selama ini kita sudah terjebak 6 bulan pertama kita harus melakukan mandatori audit, yaitu melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Secara total auditor kita habis malah kekurangan Pak.

Lanjut, ini bisa kami lihat untuk nanti 2019 untuk pemeriksaan tahun 2020 Pak. Dengan keterbatasan anggaran, kami hanya tersedia anggaran untuk 21 entitas Pak. Jadi semakin berkurang dibandingkan tahun 2017 dan 2018, karena keterbatasan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengatasi atau kemajuan perubahan lingkungan yang IT 4.0. Dari BPK telah menyiapkan menjawab tantangan tersebut adalah melalui atau proses bisnis dan pengembangan aplikasi pemeriksaan, antara lain aplikasi SIAP laporan keuangan, SNP, SIKAT, dan SIPTL. Yang kedua adalah integrasi berbagai aplikasi-aplikasi tersebut di atas kami rangkum menjadi satu tapi saling berintegrasi di dalam portal BPK. Kedepan dengan percepatan kemajuan IT BPK, kami juga hendak melakukan pemeriksaan sisten dan teknologi informasi di kelembagaan atau non kelembagaan.

Lanjut, ini yang kami katakan yang terbaru bahwa di dalam optimalisasi kepemimpinan kolektif kolegial untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Latar belakang kami adalah upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan. Kedua, mengurangi *conflict of interest*. Dan yang ketiga, memitigasi resiko pemeriksaan. Nah, untuk melakukan atau kolektif kolegial itu meliputi dari aspek manajemen dari perencanaan, dari pelaksanaan, pelaporan dan sampai pelaksanaan tindaklanjut pemeriksaan. Jadi siklus dari pemeriksaan itu harus diketahui oleh kolegial, oleh badan. Dan ini juga penting untuk suatu pengambilan keputusan kolegial dalam arti sesungguhnya.

Lanjut, mohon ijin tadi pembahasan-pembahasan tadi kami mencoba merangkum menjadi satu lembar yang kami beri judul *frame work* atau alur pikir. Latar belakang dan tantangan perubahan kami menggarisbawahi mengenai harapan tuntutan *stakeholder*, yaitu adalah peningkatan kualitas komunikasi dengan khususnya di lembaga perwakilan. Jadi ada kami lihat ada banyak hal-hal yang harus kita kembangkan lagi di dalam komunikasi dengan lembaga perwakilan.

Yang kedua, benang merahnya adalah yang berperan kepemimpinan kolektif kolegial. Manfaat yang akan dicapai harapan kami adalah hasil pemeriksaan dan rekomendasi bersifat holistic. Jadi ini untuk mengeliminir rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Dan ini menjadi masalah tersendiri memang untuk rekomendasi. Yang kedua, sinkronisasi perlakuan. Permasalahan yang sama terkadang perlakuannya berbeda. Nah, ini salah satu upaya dilakukannya kepemimpinan kolektif kolegial.

Dan yang terakhir adalah peningkatan professional manner, bahwa Anggota badan tidak melulu diwakili oleh yang berlatar belakang akuntan dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, dengan adanya professional manner maka paling tidak secara periodic diberikan satu cara atau suatu bekal bahwa untuk menjadi Anggota BPK paling tidak kita mengetahui mengenai SPKN atau mengenai pedoman manajemen pemeriksaan dan sebagainya.

Lanjut, dan kesimpulan adalah untuk membangun BPK yang responsive bila perlu dilakukan inisiatif strategis. Pertama, optimalisasi peningkatan akses dan komunikasi atas hasil pemeriksaan BPK. Kedua, peneratan partisipator audit dan

penggunaan kantor akuntan publik. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Keempat, penguatan kepemimpinan BPK dengan pola kolektif kolegial.

Demikian untuk sementara yang bisa kami tampilkan. Mohon arahan, mohon kritikan yang konstruktif untuk kelengkapan makalah.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bapak 15 menit tepat sekali Pak, saya apresiasi.

Baik, kita sampai pada sesi kedua yaitu kami persilakan kepada Anggota Komisi XI DPR RI yang ingin memberikan tanggapan atau pendalaman terhadap pemaparan yang tadi disampaikan. Di meja saya sudah ada daftar, kita mulai dari sisi sebelah kanan Ibu Elviana sudah siap.

Silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Dr. Heru Kreshana Reza yang juga saya hormati.**

Pertama, selamat dan mudah-mudahan nanti Bapak akan berhasil, sekarang eselon I di BPK. Jadi baik dan buruknya Anggota 9 itu Bapak sudah tahu. Saya sangat tertarik dengan cerita soal otomasi terus mengikuti perkembangan, revolusi industry 4.0. Tentu saja kemajuan-kemajuan teknologi ini kita tidak bisa di kantor pusat saja, saya kira nanti Bapak sudah mulai dengan konsep untuk menerapkan big data, menerapkan IT dan segala macam. Bagaimana dengan pelaporan keuangan yang disusun oleh tim-tim dilapangan, seperti di kantor bupati misalnya. Bapak nanti dapat Anggota berapa itu yang 5 dan 6 itu, atau di Kemendikbud begitu banyak dana BOS misalnya dipegang oleh para kepala sekolah. Jadi bagaimana sinerginya itu Pak, pengembangan IT di pusat dengan harus sejalan dengan pengembangan IT di lapangan dan perlu anggaran berapa.

Saya juga kaget tadi ketika karena itu bersangkutan dengan kami, 2018 itu turun separuh karena keterbatasan anggaran. Itu tidak pernah terungkap di sini keterbatasan itu efek kepada jumlah objek yang diaudit. Kami kira dipotong hanya BPK goes to campus yang melibatkan DPR RI, rupanya yang dipotong kesitu.

Terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ibu Elviana.

Kita pindah ke sisi sebelah kiri, kita persilakan Bapak Sarmuji.



**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

Saya tertarik pada makalah ini, menurut saya inti makalah ini terutama pada partisipatori audit. Tadi Bapak Heru sudah menjelaskan tentang partisipatori audit, jadi kalau ini bisa berjalan sebenarnya ini langkah yang sangat baik. Tapi melihat sumber daya BPK sekarang saya terus terang belum berani optimis partisipatori audit ini bisa dilakukan dengan baik dengan sumber daya BPK sekarang. Karena sumber daya BPK sekarang ini mayoritasnya itu akuntan, sedangkan partisipatori audit menurut saya itu juga membutuhkan keahlian yang lain di luar keahlian pelaporan keuangan dan pemeriksaan keuangan. Dan ini berhubungan dengan institusi sosial dengan Ormas, dengan individu, dengan masyarakat yang mau diajak untuk berpartisipasi dalam partisipatori audit.

Nah, kira-kira menurut Bapak Heru dalam konteks ini apa yang harus dilakukan oleh BPK melihat ada sumber daya yang menurut saya yang kapasitas utamanya itu ada di keuangan. Dan keuangan itu biasanya orang-orang yang kadang-kadang dalam tanda kutub kutu buku, terus kita mau lompat ke partisipatori audit. Itu yang pertama

Yang kedua, saya gembira di paparan ini juga Bapak Heru juga meningkatkan efektifitas komunikasi dan akses informasi BPK dengan DPR RI. Mengapa ini saya sebut menggembirakan, karena temuan-temuan BPK itu kemudian ada jaminan tindaklanjutnya dalam proses pengawasan. Temuan BPK selama ini saya yakin banyak sekali tetapi tindaklanjut dari temuan BPK yang akhirnya memberikan kegunaan untuk rakyat itu, itu seperti terputus. Kalau itu berlanjut ke DPR RI sekurang-kurangnya DPR RI bisa meningkatkan pengawasan atau DPR RI barangkali dalam proses penyusunan anggaran bersama Pemerintah. Nanti kalau analisisnya BPK itu matang kita bisa temukan bagaimana proses penyusunan anggaran yang paling efektif untuk kesejahteraan rakyat. Hasil dari komunikasi bersama dengan BPK tentu harus dianalisis lebih lanjut.

Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Salah satu kelebihan di KPK itu memberikan analisis lanjutan. Kemarin saya sebutkan misalkan tentang partai politik, bagaimana parati politik yang baik, yang responsif dan parsipatif hadir buat kajian-kajiannya. BPK dengan temuan-temuan yang banyak itu saya harap juga begitu, bagaimana anggaran pendidikan yang nilainya itu semakin lama semakin besar itu bisa lebih efektif dengan memajukan pendidikan di Indonesia, karena anggaran pendidikan naik terus ternyata kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia itu cenderung stagnan. Ditunjukkan kemarin saya contohkan perguruan tinggi kita dengan anggaran sedemikian besar itu yang masuk 500 besar dunia bisa dihitung dengan jari. Bahkan kalau kita bandingkan swasta dengan negeri, negeri yang mendapatkbn suntikan besar-besaran ternyata kualitasnya ada yang jauh lebih rendah daripada pendidikan swasta kita. Inikan sebenarnya sesuatu yang paradoks, artinya anggaran kita ternyata belum. Nah, tindak lanjut itulah yang menurut saya harus dikuatkan dan saya minta penjelasan lebih lanjut dari Bapak Heru kira-kira ide ini bagaimana bisa kita teruskan dengan BPK kalau Bapak Heru ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi Anggota BPK.

Barangkali itu, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Sarmuji.  
Kita lanjut sisi kanan silakan Bapak Michael Jeno.

## F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

### **Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya banggakan, Bapak Heru inikan orang dalam di BPK.**

Ada beberapa konsen saya tadi sama dengan Bapak Sarmuji, korelasi antara pengawasan di DPR RI dengan BPK sebagai pemeriksa mungkin dielaborasi. Yang kedua, sama juga partisipasi audit hanya saya nyambungnyanya begini, tadi saya tanggap waktu Bapak mengelaborasi mengenai pemeriksaan yang melibatkan publik, partisipasi audit. Yang saya tangkap itu dengan partisipasi audit sehingga resources yang ada di internal BPK itu bisa lebih fokus kepada penilaian kinerja. Arahnya kesana ya Pak, terus pertanyaannya saya balik konsen saya justru korelasinya adalah bahwa kelihatannya selama ini untuk kinerjanya kan punya kompetensi-kompetensi khusus, industry spesialis kalau kita bisa korelasi harus ada industry spesialis. Misalnya kalau kita mau memeriksa kebijakan mengenai Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itukan *policy* ya Pak. Kita mau buat *performance audit*, kita mau lihat kinerjanya kan harus orang-orang yang mengerti mengenai hal-hal seperti itu. Asumsi Bapak kan nanti kalau partisipasi audit ini tadi yang audit keuangan yang biar di partisipasi audit *resources* internalnya BPK lebih banyak ke *audit performance* yang saya tangkap tadi Pak.

Justru pertanyaannya *resources*-nya siap tidak kalau BPK untuk audit *performance*. Tadi yang disampaikan Bapak Sarmuji juga dan kita selama beberapa hari *fit and proptest* ini kita melihatnya kapasitas SDM-nya masih terbatas. *Industrial expert*-nya di BPK untuk *performance audit* itu yang kita masih belum *confident* bahwa itu *resources*nya ada. Saya mohon eksplorasinya Pak.

Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi saya dulu punya perusahaan IT Pak, jadi ada ngerti sedikit walaupun bukan secara teknis ya. Saya membayangkan *reporting* itu tidak susah secara teknologi misalnya kalau kita mau bcaranya efektifitas mempercepat pemeriksaan karena BPK *resources*nya terbatas, auditor terbatas, Pemda atau lembaga yang harus diperiksa sangat banyak. Saya bicara laporan keuangan yang Pak, itukan tidak susah Pak, saya pasang satu *templet* untuk laporan keuangan di satu kabupaten katakanlah saya sebarakan ke 542 kabupaten itu saya bisa langsung periksa.

Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak pernah dilakukan BPK yang sudah sekian lama. Secara teknis itu tidak susah, secara teknis itu bukan sesuatu yang susah, kita tidak perlu memerlukan suatu aplikasi IT yang seperti katakanlah diperbankan atau di telekomunikasi itu tidak susah, ini sekedar *reporting*, paling datanya saja yang banyak, tapi saya yakin datanya juga tidak banyak Pak. Belanja katakanlah 1 kabupaten 5 triliun, *item*-nya juga tidak banyak. Pertanyaan saya justru Bapak internal di BPK eselon I, pertanyaannya sederhana kenapa ini yang secara teknis tidak terlalu susah kalau kita bicara dari segi IT. Dan saya tidak perlu juga infrastruktur yang canggih-canggih, walaupun itu ada di Papua sana cukup pakai Bappeda di sana atau Pemda di sana bisa dikirimkan. Kenapa tidak dilakukan, itu pertanyaannya Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, pindah ke sisi kiri Ibu Dra. Lilis Santika silakan.

**F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Terima kasih Dr. Heru Kreshna Reza, saya disini menemukan tiga kata lebih yang diulang-ulang, yaitu area yang beresiko tinggi. Ketika BPK ini menghadapi pelaksanaan tugasnya menghadapi 86 kementerian dan lembaga di pusat, 542 Pemda, Provinsi, Kabupaten Kota, 115 BUMN, belum termasuk anak perusahaan dan ratusan BUMD. Terus Bapak disini kalau nanti Allah takdirkan Bapak nanti menjadi Ketua BPK, coba titik-titik area yang beresiko tinggi ini sementara disini juga dinyatakan bahwa keterbatasan SDM, sehingga nanti BPK akan melakukan upaya alternative melalui penerapatan pemeriksaan berbasis resiko dengan pendekatan atau sampling pada area yang beresiko tinggi ini apa yang mungkin Bapak maksud supaya lebih spesifik lagi. Dan apa yang akan Bapak Dr. Heru ini lakukan, sehingga betul-betul nanti Bapak Heru ini menjadi seorang yang mampu diandalkan untuk BPK ini.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Dari sisi kanan Ibu Tutik Kusuma Wardani silakan.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Heru Kreshna yang saya hormati.**

Jadi pengalaman Bapak sebagai auditor untuk maju sebagai calon Anggota BPK sangat saya apresiasi Pak, kemampuan tidak diragukan lagi. Tadi Bapak menyinggung masalah teknologi informasi dan sekarang kita sudah masuk pada industry 4.0 ya Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, karena Bapak sudah ada di dalam juga apakah dengan adanya implementasi teknologi 4.0 ini kualitas pemeriksaan DJK atas opini dan pemeriksaan secara sampling dapat menekan kerugian negara yang selama ini menjadi temuan dari BPK.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Tutik.

Kita pindah ke sisi kiri Bapak Dr. Lili Asdjudiredja.

**F-PG (Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya baca di sini Bapak Heru beberapa manfaat yang diperoleh dengan pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, antara lain 10 lembaga. Dalam pemeriksaan keuangan selama ini mengambil keputusan secara kolektif kolegial dilakukan secara terbatas pada pemberian opini atas 10 KL. Apakah ini berlaku untuk seluruh departemen atau lembaga atau hanya bidang itu saja. Kalau memang ada bagusnya ada mungkin sisi negatifnya mengenai rekomendasi bersifat holistic ... **(rekaman terputus)** ... audit investigasi BPK.

Kemudian hasil itu oleh KPK ditindaklanjuti kemudian tersanggah. Sesudah tersangka kemudian digugat keputusan daripada BPK ini diinikan oleh pihak ketiga. Tadi saya tanyakan kepada kandidat yang lain, tapi saya belum puas mengenai jawaban tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Lili.  
Yang terakhir Ibu Anarulita, silakan.

**F-P. NASDEM (dr. NARULITA MUCHTAR):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Heru Kreshna Reza, aslinya dari mana ini Pak, pertama tanya dulu aslinya dari mana lalu tanya alamatnya.

Tadikan Bapak banyak memaparkan mengenai perubahan kinerja dari BPK sendiri, seperti di point-point ini peningkatan komunikasi, akses antar lembaga, skema pemeriksaan yang melibatkan publik dan lain sebagainya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah selama ini sudah tertuang dalam Undang-Undang BPK yang lama. Dan kebetulan kita juga akan membahas masuk ke jadwal perubahan Undang-Undang BPK mungkin periode yang akan datang. Saya ingin tanyakan seberapa pentingnya atau *urgency*-nya perubahan Undang-Undang ini menurut Bapak, karena kalau saya lihat banyak sekali di badan BPK yang harus diperbaiki. Jadi sebesar apa perlunya Rancangan Undang-Undang BPK ini untuk dibahas di DPR RI.

Mungkin itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada satu lagi, silakan Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

## **Bapak Dr. Heru Kreshna yang saya hormati.**

Mungkin saya tidak mengajukan pertanyaan tapi harapan saja Pak, seluruh kandidat yang masuk kepada ruangan sejak hari Senin yang lalu jumlah total sampai hari ini sekitar 30 orang. Itukan kemungkinannya hanya 3 Pak, dia tidak terpilih, dia belum terpilih, atau dia terpilih. Nah, pertanyaan saya andaikata Dr. Heru Kreshna terpilih kami yakin tentu pesannya ada merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan untuk dimasukkan kepada program BPK kedepan agar benar-benar menjadi BPK yang seperti yang diharapkan, handal, professional, akuntable dan lain-lain.

Tadi sudah disampaikan antara kondisi real saat ini sumberdayanya sangat terbatas dibandingkan dengan entitas yang diperiksa di seluruh Republik ini. Nah, kalau seandainya belum terpilih untuk kali ini apakah kan ada beberapa internal BPK yang mendaftar dari kemarin ada Bambang Pamungkas, ada Bapak Hendra, ada Bapak Heru dan mungkin yang lain saya tidak ingat. Apakah itu bisa tidak gagasan dan ide yang baik tadi tidak hanya disampaikan atau bisa dilaksanakan pada saat anda menjadi Pimpinan BPK. Tapi di posisi yang saat inipun kalau bersama-sama itu ide dan gagasan yang menarik itu diusulkan oleh pengambil atau pemangku kepentingan yang berkompeten untuk membuat keputusan untuk melaksanakan ide dasar tersebut, saya pikir BPK kedepan akan lebih baik lagi.

Itu saja harapan saya Pimpinan.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik Bapak Heru Kreshna Reza.

Kita telah menyelesaikan 8 pertanyaan dari para Anggota, kini saatnya Bapak diberikan waktu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat, jelas dan bisa dipahami.

Waktu dan tempat kami persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Baik Pak, mohon ijin untuk mencoba menjawab. Pertama dari Ibu Elviana tentang teknologi industry. Menanyakan bagaimana sinergi antara daerah dan pusat. Sampai saat ini untuk menjawab tantangan TI yang 4.0 kami telah mempunyai big data di BPK, artinya semua data itu terekam nanti sesuai dengan keinginan dengan tujuan pemeriksaan itu bisa langsung diakses oleh auditor. Dan itu digagas oleh mantan Ketua BPK periode 2009-2014 Bapak Hadi Poernomo dengan menamakannya e-audit. Jadi semua big data disitu semua ada, jadi kita tinggal mengambil mau apa. Dan itu otomatis online dengan pusat, jadi untuk sampai sekarang artinya kalau dengan asumsi jaringan bagus mudah-mudahan itu tidak terjadi kesulitan-kesulitan tersebut.

Potongan mengenai anggaran Pak, memang ini salah satu yang sangat menakutkan Pak, terlebih kalau kami mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI. Mudah-mudahan ini tidak dipotong, karena yang dipotong Pak, jantungnya kita Pak. Artinya, uang perjalanan jadi kami ...(suara tidak jelas)

## **KETUA RAPAT:**

Pak Heru, rasanya Komisi XI DPR RI tidak pernah motong Pak, mungkin di tempat lain.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Dari Pemerintah Pak, jadi Pemerintah maksudnya mohon maaf. Mudah-mudahan kami ditambah itu harapan kami Pak. Jadi salah satu ilustrasi kami membawahi Polhukam, kami anggaran menyampaikan 80 tapi untuk tahun sekarang hanya disetujui 22 Pak. Jadi otomatis kami tidak bisa berbuat apa-apa, jadi begitu laporan keuangan selesai kami istirahat Pak, karena memang hanya itu Pak, perjalanan dinas, artinya perjalanan dinas ini menjadi ruh kami Pak. Nah, ini salah satunya dan belum lagi catatan perjalanan dinas misalnya kami melakukan perjalanan dinas ke Papua, itu tidak bisa dipakai darat Pak, pasti pesawat. Nah, ini kita argumentasi dengan keuangan supaya dikeluarkan tetapi anggaran tidak cukup. Jadi begitu kita anggaran sudah dapat dipagu ini dapat segini, ini dapat segini. Itulah Pak, terkadang kita tidak bisa bergerak secara leluasa Pak.

## **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin Pimpinan, interupsi.

Pak Heru, untuk informasi saja Bapak kan auditor di sana. Kami pun DPR RI salah satu objek yang diaudit oleh BPK, kami pun mengalami hal yang sama Pak. Jadi kami pun juga dipotongnya tidak tanggung-tanggung, mungkin kalau BPK hampor 50% kami sudah lebih dari 50%, 55% Pak. Jadi kalau soal pengelolaan anggaran bagi kami, kami ini yang pergi misalnya keluar daerah itu kadang-kadang kalau menggunakan standar biaya umum yang benar untuk menggunakan bisnis dan sebagainya kawan-kawan itu nombok kalau untuk naik pesawat. Kondisinya kita lebih ironis lagi.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Baik Bu, jadi kita sama-sama ironis. Kami pun demikian Bu, untuk perjalanan misalnya pemeriksaan keluar negeri ke Brasil itu kita naik ekonomi, tapi ya kita terima sajalah yang penting kita bisa melakukan audit, itu saja Bu. Sampai titik bahwa kita sudah tidak bisa berangkat lagi karena sudah tidak ada lagi. Jadi artinya ya sudahlah *survive*.

Untuk Bapak Sarmuji, mohon ijin kami mencoba untuk menjawab, parsitipatori audit ini kami optimis Pak, bisa dilakukan. Artinya, kami melihat lembaga atau NGO dari tiap daerah kami melihat ada tidak yang mempunyai kemampuan untuk berkontribusi untuk melakukan pemeriksaan tapi dalam skoop kinerja Pak. Jadi *on be helf*, jadi atas nama BPK mereka nanti yang bisa nanti kita melakukan tahapan-tahapan selanjutnya apakah dia bisa dilakukan. Jadi otomatis paling tidak hanya satu orang auditor kami yang disana atau bahkan pun tidak. Karena kami melihat dampak dari dilakukannya parsitipatori audit ini adalah masyarakat setempat bisa *sense of belonging*-nya tinggi. Jadi mereka juga sekaligus dididik agar mereka juga belajar tidak menyalahkan BPK, ini pemeriksaannya begini dan sebagainya. Jadi tidak menchalange terus tapi mereka tahu betapa susahnyanya dan ini psikologi efeknya mereka bisa saling memilih, karena mereka dilingkungan mereka itulah. Dan ini contohnya

sudah bisa dilakukan di Selandia Baru, Philipina dan India. Justru salah satu parsitipatori audit itu adalah kita bisa menambah cakupan, contoh dana desa. Dana desa kalau kita lihat hampir 70 triliun besar sekali, tapi berapa ribu auditor yang harus kita siapkan untuk di desa. Nah, kenapa kita tidak pakai elemen-elemen masyarakat yang memang mempunyai kecakapan sedikit baru kita nanti kita didik, tetapi skoopnya memang di kinerja tidak diaudit keuangan.

Meningkatkan komunikasi BPK Pak, jadi memang salah satu dilematiknya memang ada beberapa pertanyaan misalnya tidak di dalam forum ini Pak, kok BPK belum pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap Raskin atau dan sebagainya, padahal kami sudah melakukan. Nah, ini salah satu betapa belum efektifnya pola komunikasi yang terjalin antara BPK dengan DPR RI. Salah satunya adalah mengenai penyempurnaan peraturan bersama, peraturan bersama ini kami mempunyai konsep lebih ditingkatkan misalnya penyampaian dan akses atas hasil pemeriksaan yang memuat rahasia negara itu kita kecualikan.

Kedua, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian kualitas pelaporan agar kami mendapatkan check and balance di tingkat tataran konsep. Jadi kami bisa menata kembali. Dan juga pertemuan konsultasi yang lebih insentif lagi. Apakah nanti LHP bisa diakses misalnya oleh DPR RI dengan mencantumkan kode tertentu agar supaya bisa dan juga desiminasi laporan. Jadi nanti kita publish untuk pemeriksaan-pemeriksaan khususnya tematik dan juga yang sangat menyentuh atau melibatkan masyarakat banyak.

Nah, rekomendasi ini memang menjadi sorotan Pak, kami menyadari sekali. Malah ada yang tahun 1900, ada yang tahun 2000 awal, hal itu dilatarbelakangi pertama karena Kementerian atau institusinya sudah bubar atau sudah berubah atau ada bencana. Nah, oleh karena itu salah satu sisi kami mengajukan kolektif kolegial karena kami melihat ini sampai saat ini minimal belum ada konsen dari Anggota atau dari Pimpinan BPK untuk melakukan semacam FGD atau pertemuan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi di statusnya di ... (suara tidak jelas) HP sesuai dengan peraturan BPK kalau tidak salah nomor 1 tahun 2018 ada 4 status, yang pertama sesuai dengan rekomendasi, yang kedua belum sesuai dan yang ketiga tidak sesuai dan yang keempat tidak bisa ditindaklanjuti. Dan ini ribuan jumlahnya, karena kumulatif dari beberapa tahun.

Dan juga tingkat penyelesaiannya sampai sekarang pun hanya mencapai 60 sekian persen dan waktu berjalan terus Bu, inikan kumulatif terus. Nah, oleh karena itu harus ada terobosan dari kepemimpinan badan untuk nomor 4 itu karena domainnya dari Anggota BPK untuk menghapuskan. Jadi itu dihapuskan sah menurut karena tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah hanya preogratif beliau. Nah, beliau ini harus duduk bersama-sama, kami dilapis bawahnya mensupport datanya. Nah, ini baru parsial katakan saya di AKN 1 dengan Bapak Agung ya sudah dengan Bapak Agung saja, tapi yang lain kan belum Pak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami dengan kolegial maksud kami duduk bersama ya sudah harus kita selesaikan ini karena jumlahnya semakin lama semakin banyak Pak. Itu mengenai yang di usulkan Pak.

Bapak Michael, untuk pemeriksaan kinerja memang saat ini di BPK masih campur. Jadi tadi pertanyaan Bapak sangat benar sekali, bahwa di kita ini sebenarnya auditor super power kalau dibandingkan dunia Pak, karena laporan keuangan dia, laporan kinerja perusahaan ke dia, laporan dengan tujuan tertentu sampai investigasi juga bersangkutan, jadi itu sangat luar biasa Pak. Nah, tetapi saat ini dari BPK sudah dibuatkan semacam talent untuk menjadi spesialisasi kinerja atau keuangan atau yang PDTT, ini sudah bergerak maju BPK.

Dan juga tingkat keahliannya itu juga secara berjenjang diberikan untuk kinerja dan kami malah melihat pemeriksaan kinerja ini sebenarnya harus senang entitas yang diperiksa kinerja karena mereka belajar Pak. Dan bagi kita itu juga bukan pemeriksaan tetapi riset Pak, karena kita banyak wawancara, banyak membuat menyempurnakan SOP, kalau tidak ada SOP-nya kita buat kriteria-kriteria agar mereka berjalan semuanya di bawah aturan, karena mereka sudah organisasi besar.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Sebentar Pak, karena Bapak Heru inikan internal ya kalau sederhana saja sebagai *bancmark* menurut Bapak itu sudah berapa persen secara sederhana *achievement* yang tadi kondisi ideal dengan yang sekarang *current condition* di BPK untuk audit kinerjanya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Sebenarnya Pak, dengan berbagai keterbatasan sangat tidak berbanding Pak, pemeriksaan kinerja saat ini dengan pemeriksaan lainnya Pak. Karena memang dihadapkan, kita kembali lagi kepada anggaran Pak, karena di negara luar *best practice*-nya itu pemeriksaan kinerja minimal 6 bulan Pak, sampai 9 bulan itu di Amerika Pak, di kita 2 bulan Pak. auditor kita juga bukan auditor yang ahli di dalam ini, jadi belajar mereka. Artinya, di sisi positifnya mereka banyak belajar dan kami lihat auditor saya sangat luar biasa untuk mencari tahu. Tetapi apa yang bisa dihasilkan 2 bulan, karena pola anggaran kita di pemeriksaan sudah salah Pak, kalau menurut saya. Di patok Pak, segini ya cukup tidak cukup ya sudah, laporan jadi tidak mungkin tidak jadi, karena produknya memang laporan. Tetapi kalau kita melihat lebih kedalaman Pak, agak ironis karena banyak hal-hal yang harus digali Pak, terutama mengenai luasnya cakupan pemeriksaan.

Nah, untuk itulah diantisipasi sama kita diakali bagaimana mensiasatinya itu. Jadi di saat-saat moment-moment kita kekurangan anggaran, kekurangan SDM kita efek positifnya kita kreatif dengan berbagai cara untuk melihat bagaimana. Ini juga belum bicara kalau kita meng-*hire* seorang ahli *expertice* kalau memang kita ada pemeriksaan jembatan itu diluar lagi biayanya. Dan itu misalnya pembangunan infrastruktur di Papua itu bagaimana lagi. Itulah Pak, salah satu kendala. Tapi itulah tadi sama Ibu sudah sama nasib dipotong juga.

**F-PAN (JON ERIZAL, M.B.A.):**

Pimpinan, interupsi.

Maaf Bapak Heru saya interupsi.

Menarik ini yang Bapak sampaikan soal anggaran, kan Bapak sudah lama ini sudah sampai mentok di BPK kan. Saya tidak lihat itu Bapak Heru ngomong soal anggaran di depan kita, saya berkali-kali mancing mana dong ini, inikan sangat strategis. Apa yang dibutuhkan oleh BPK ini karena mengawasi 2000 triliun lebih inikan tidak sepele. Bapak tidak cukup dengan ya irit-iritan sajalah, kita cari, laporan jadi, ya tidak bisa asal-asalan gitu Pak. BPK inikan setara sama DPR RI, sama Presiden dan seterusnya. Kenapa tidak bunyi pada saat mengajukan anggaran bahkan kita lihat Kementerian lain luar biasa dan BPK ini selalu *soft*. Dipotong ya oke, kita yang *fight* malah.



Jadi saya ingin tahu juga upaya Bapak pada saat Bapak menjadi sampai auditor utama ini, apa upaya untuk meningkatkan anggaran itu. Karena saya sendiri tidak melihat pada saat rapat-rapat dengan kesekjenan mungkin ada yang datang juga auditor utama tetapi tidak lihat bunyinya. Kalau upaya itu seperti apa yang sudah dilakukan dan kalau Bapak duduk apakah bisa nanti Bapak meningkatkan anggaran sesuai dengan target kerja yang dicapai. Kita targetnya kan jelas Pak, ukurannya kan kalau menurut saya mudah saja di antaranya ukurannya adalah kalau pengawasan ini efektif, efisien bukan hemat Pak, efektif dan efisien otomatis hal-hal yang berkaitan dengan KPK itu berkurang Pak. Dia pasti berbanding berbalik kan itu, ini maju terus ini berkurang, tapi inikan tidak. Artinya, mungkin tadi menyebabkan utamanya anggaran.

Nah, ini yang ingin saya tanyakan kalau Bapak duduk apa mungkin ini nanti bisa kita naikkan atau usulan paling tidak dari BPK meyakinkan kami di DPR RI untuk ini kita perjuangkan bersama.

Terima kasih Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Ijin, apakah kami mengurutkan dulu apa langsung menjawab.

**KETUA RAPAT:**

Bapak sebetulnya sudah habis waktu, kita kasih special 2 menit untuk menjelaskan semuanya, karena ini internal BPK.

Silakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Iya Pak, mengenai keterbatasan anggaran itu juga disikapi oleh review dari negara Polandia. Dan itu sangat mengkritisi bahwa BPK harus independent di dalam anggaran dan di dalam menentukan SDM. Selama itu masih ketergantungan sama Pemerintah, kemungkinan akan mengalami kesulitan seperti itu, kemungkinan. Dan juga Pak, kesekjenan jadi kami dalam posisi AKN 1 sampai 7 itu diberikan porsi oleh Biro Keuangan jatah ini, jatah ini, dan kami masih bisa minta tetapi jumlahnya tetap tidak cukup, selama ini begitu Pak. Jadi memang ada hal-hal yang biasanya kami meminta kepada Bapak Agung anggota kami "Pak, ini kurang karena anggaran kita begini-begini", gitu Pak. Itu masih yang artinya generik, belum itu nanti oncall dari DPR RI, itu kita harus cari anggaran, biasanya itu dana cadangan di kelola oleh Sekjen.

Sebenarnya Pak, kami tahun 2013 kami sudah mencoba, saya pribadi dengan teman-teman yang sangat konsen dengan keterbatasan anggaran ini mencoba untuk membuat satu IT yang dibuat oleh teman-teman kita. Ini untuk mengantisipasi Pak, tahun 2013 Pak. Jadi saya pernah tahun 2013 mencoba untuk membuat satu aplikasi oleh teman-teman kami yang auditor yang kami sebut IDAMAN (Informasi Dalam Genggaman). Khayalan saya pada waktu itu Pak, kami bisa duduk...(suara tidak jelas)

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Sorry Pak Heru, ini buat internal ya?

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Iya, karena untuk menjawab kita kekurangan biaya dan kekurangan SDM. Jadi saya mencoba untuk ini dan ini tanpa bayar waktu itu Pak. Membuat ini Pak, jadi ini...(suara tidak jelas)

**F-PAN (JON ERIZAL, M.B.A.):**

Maaf Pak Heru, saya tidak mengarah kepada apa yang Bapak lakukan buat efisiensi tadi. Bikin sistem sendiri, itu bukan pointnya, bukan point buat saya artinya bukan itu tugas BPK. Tugas yang lebih penting ini banyak, Bapak perlu dana apa untuk mencapai target sesuatu itu yang saya maksud. Jadi bukan Bapak melakukan karena kami ini bisa jalan dengan, bukan itu Pak. Tugas Bapak bikin IT itu sudah salah besar kalau menurut saya, Bapak ini lebih mengawasi keuangan yang dikeluarkan oleh negara ini 2000 triliun lebih Pak. Bapak nanti habiskan waktu buat IT yang tidak penting walaupun itu menjawab karena keterbatasan dana, bukan itu pointnya.

Jadi maksud saya kalau Bapak duduk ini bagaimana upaya Bapak nanti mencocokkan kebutuhan dana sehingga target pengawasan terhadap anggaran yang dikurcurkan itu betul-betul efektif. Itu yang ingin saya dengarkan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Ijin Pak, tadi memang saya pikir pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Dan saya mengakomodir dari...(suara tidak jelas)

**KETUA RAPAT:**

Kita tambah 1 menit, 2 menit lagi.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Untuk menjawab yang lainnya Pak, maka saya menceritakan untuk menjawab itu Pak. Jadi memang inilah Pak, peran kalau menurut kami sinergisitas antara kami selaku fungsi pemeriksaan dengan DPR RI selaku fungsi pengawasan. Kita dengan bersinergi kami bisa nanti di dalam Rapat Dengar Pendapat kami mengemukakan ini loh konsen kita, sehingga kami ada anggaran sekian-sekian untuk melakukan pemeriksaan yang Bapak bilang tadi ada sekitar 2000 triliun APBN.

Jadi paling tidak kita bisa berkomunikasi dalam bentuk apapun, sehingga konsep-konsep dalam tataran kebijakan kita sudah bisa kerjakan, yang penting DPR RI tahu persis bahwa kita kekurangan dana sedangkan kita dengan harapan akan melakukan pemeriksaan ini dan ini. Paling tidak kami bisa lebih dalam lagi mengemukakan pada waktu kami Rapat Dengar Pendapat.

Terima kasih.

**F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA):**

Pimpinan, boleh sedikit Pimpinan, menambahkan.

## **KETUA RAPAT:**

Saya kira sudah selesai tinggal Bapak memberikan *closing statement*. Kita sudah lewat waktu lumayan banyak Pak, nanti melanggar Tatib kita. Saya kira Bapak bisa menyimpulkan dalam satu menit.

Silakan Pak.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. HERU KRESHNA REZA):**

Siap, ijin menyampaikan.

Meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh BPK, untuk menata kelembagaan, untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Namun, sejalan dengan kondisi eksternal yang secara dinamis terus berubah dan berkembang. BPK dituntut untuk lebih responsive dalam menjawab tantangan dan perubahan. Dengan menjadi institusi responsive, BPK dapat mengoptimalkan semua peluang yang ada, meminimalkan kelemahan, mengantisipasi ancaman, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi *stakeholder*.

BPK bisa menjadi partner yang berkualitas dan terpercaya bagi DPR RI dan juga sekaligus untuk menjawab keterbatasan anggaran yang selama ini kami rasakan. Dan juga BPK harus menjadi penggerak utama dalam tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara melalui evolusi peran BPK, yang tidak hanya sebagai *overside* tetapi juga *inside*. Dengan begitu ancaman BPK, yaitu menurunnya kepercayaan dan reputasi dapat dimitigasi dengan 4 strategi.

Perbaikan yang berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan bagi BPK dan saya berharap dapat berkontribusi lebih maksimal dalam mendorong tata kelola BPK yang lebih responsive dalam 5 tahun kedepan.

Demikian kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan saya bisa duduk disini untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Dan memaparkan inisiatif-inisiatif strategis dihadapan majelis yang saya hormati. Dan saya juga sekaligus dibukakan pintu maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian.

Demikian *akhirulkalam*.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan.

Kita berikan *applause* sekali lagi atas Bapak Heru Kreshna.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan agenda kita yang ketiga. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Heru Kreshna Reza bisa meninggalkan tempat dan dipersilakan untuk berjabat tangan sebelumnya.

Terima kasih.

## **(RAPAT DISKORS)**

Skors saya cabut.

**Yang kami hormati Bapak Dr. Reza Suarga, B.A., M.M.**

Peserta nomor 4 pada siang hari ini dan rapat tadi sudah kami sampaikan beberapa Tatib yang perlu Bapak ketahui adalah, yang pertama waktu yang kami berikan total 45 menit, yang terdiri dari 15 menit paparan presentasi makalah dan 30 dalam tanya jawab dan diskusi pendalaman, 1 menit untuk menutup *speech*-nya. Presentasi ini diupayakan tepat waktu Pak, karena nanti akan panjang pertanyaan dan tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Reza Suarga, B.A., M.M. untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran dari makalah tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami banggakan Pimpinan beserta Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama ijin kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ingin langsung saja karena tadi cuma 15 menit. Yang saya angkat mungkin hari ini kepada Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat. Saya mengangkat judul *beyond audit* karena saya percaya bahwa era sekarang adalah era yang multi dimensi, multi masalah tidak cukup sekedar audit teknis biasa tetapi dibutuhkan keterampilan-keterampilan paripurna yang dimiliki oleh lembaga badan ataupun auditor seperti BPK ini.

Lanjut, saya mungkin ingin sedikit saja mengingatkan surat ... (suara tidak jelas) Bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar. Jadi mungkin ini saya angkat supaya mengingatkan kita betapa pentingnya peran BPK dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Lanjut, dasar dan latar belakang yang ingin saya angkat kemudian masalah, tentu Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A tentang BPK itu jelas disampaikan bahwa bagaimana peran BPK tersebut kemudian tentu Undang-Undang yang mengaturnya antara lain Undang-Undang Nomor 15 jelas fungsi dan tugasnya, Pasal 9 Ayat (1) tentang kewenangannya bagaimana BPK ini sebetulnya memiliki kewenangan yang tugas yang luas untuk memang bisa menjangkau badan-badan, kementerian, lembaga yang mengelola keuangan maupun aset-aset negara.

Latar belakang tentu yang tadi saya sampaikan bahwa tantangan bernegara di era persaingan global dan keterbukaan informasi ini memang membutuhkan kesiapan yang luar biasa dan paripurna sehingga orang auditor maupun Pimpinan BPK nanti diharapkan tidak sekedar mengerjakan apa hal yang rutin akan tetapi sudah multi taskin, kira-kira begitu.

Masalahnya mungkin karena problem yang saya sebut dengan infolusi istilah yang saya ambil dari antropolog bahwa infolusi itu adalah sesuatu yang rutin, yang kita tidak sadar seolah-olah BPK ini sudah baik tetapi kok banyak suara-suara yang mengatakan seperti contohnya WTP begitu banyak diberikan tetapi tidak linier dengan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi itu malah saya kutib dari pidato Ketua BPK yang lalu Bang Hari Azhar pada satu sesi di UGM, sehingga itu yang kemudian timbul dan menyeret persoalan BPK dan lemahnya penanganan komunikasi publik dan sebagainya.

Lanjut, masalah audit teknis yang saya temukan di lapangan. Kalau saya mewawancarai 100 auditor, 120 itu bilang teknik auditor itu memang lain-lain. Masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri termasuk sampling yang digunakan dan seterusnya.

Kemudian opinion audit, WTP itu boleh dikatakan opinion audit itu memang sangat rawan, ajang jual beli, jangankan di Indonesia, contoh diluar negeri krisis di Amerika, Arthur Andersen itu bubar karena kasus enron dan seterusnya karena ini opinion audit yang memang rawan sehingga tidak boleh dianggap sesuatu yang bisa membuat rawan atau tidak steril terhadap objektivitas dari suatu objek.

Kemudian auditor senior yang saya pernah wawancara mengatakan kalau dia sudah tidak memilih opinion audit tetapi lebih memilih operational audit, management audit, tanpa opinion audit karena itu lebih membumi dan bisa mengetahui persoalan unit kerja yang diaudit sehingga potensi-potensi yang ada bisa digali dan bisa diperoleh bukan sekedar mengaudit rutin. Kalau mengaudit rutin mungkin istilah dia ibu-ibu rumah tangga pun bisa tanpa mengecilkan peran ibu rumah tangga yang luar biasa.

Lanjut, visi dan misi saya rasa kita sama bahwa kita ingin BPK kedepan yang bermartabat, professional, bersih dan tentu siap menghadapi tantangan global. Misinya saya ingin memberikan satu tekanan bahwa BPK ini mengaudit tapi punya prinsip kewirausahaan, sehingga potensi unit kerja baik itu daerah, kementerian, maupun badan usaha milik negara itu betul-betul bukan sekedar diaudit procurement-nya saja yang rutin akan tetapi potensi apa sih yang dimiliki supaya keuangan negara ataupun potensi penerimaan negara yang lebih besar bisa cepat diperoleh.

Kemudian kita ingin juga dalam beyond audit ini saya ingin lakukan semacam audit sosial. Audit sosial itu adalah melihat bagaimana dampak masyarakat ketika misalnya ada satu pembangunan di satu daerah kita bisa wawancara langsung dampaknya itu seperti apa, terasa atau tidak, apa keluhannya dan seterusnya. Ini satu model audit sosial yang sudah mulai populer di dunia internasional dan sudah dipraktekkan dengan metode yang disesuaikan dengan teknologi.

Target utama saya ada 5 sebetulnya, pertama mungkin ijin BPK harus bisa menjadi dalam tanda kutip alat dan mitra sentimental DPR RI, kenapa? Karena kita tahu DPR RI punya fungsi salah satunya pengawasan tapi karena kesibukan dari para Anggota Dewan yang terhormat mungkin itu agak banyak juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga seperti BPK. Jadi Insya Allah kalau saya terpilih saya tidak segan-segan sowan ke DPR RI istilah, ayo mana yang bisa kami bantu, karena kita bisa jadi mitra sentimental dan alat DPR RI tadi dalam tanda kutip yang positif.

Kemudian yang kedua, kita tahu tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana yang harus ditemukan. Dan institusi yang menemukan tindak pidana korupsi itu secara Undang-Undang cuma 4, antara lain ya BPK.

Yang ketiga, saya ingin kita tidak bisa tidak harus masuk kepenerapan audit 4.0 ada banyak cara teknik-tekniknya yang sekarang mungkin dikenal dengan RPA (Robotic Process Automation) dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi tanpa melakukan ini kita sudah ketinggalan sebetulnya. Oleh karena itu, suka tidak suka kita memang harus menerapkan ini. Kita mau tetap dengan cara konvensional tetapi kita akan pasti tergerus karena akan terdesak. Kita tidak pernah tahu ojek sekarang sudah ada ojek online, padahal ojek itu kan sesuatu yang non formal akan tetapi sudah diterobos oleh teknologi sehingga itu yang terjadi. Audit sosial yang terakhir tadi saya sampaikan untuk bisa mengetahui dan dirasakan.

Lanjut, audit 4.0 itu saya tidak ingin terlalu detail akan tetapi ada 3 prasyarat seorang auditor itu harus menguasai 3 hal, technology anable dia harus mampu

menguasai teknologi, dia harus punya integritas, dan harus confident percaya diri mengerjakan sesuatu yang benar, bukan percaya diri seperti yang tidak terukur.

Lanjut, dengan *activision intelligent* tentu kita bisa membuat satu pemeriksaan keuangan itu akan jauh lebih mudah. Sebetulnya Pimpinan BPK itu tidak perlu lagi sibuk dengan angka-angka, angka-angka itu penting akan tetapi kualitasnya lebih penting, tapi interpretasinya yang tadi saya bilang. Bahwa interpretasi dari suatu pemeriksaan itu akan menjadi satu bahan pemutusan bahkan bisa memberikan satu gambaran bagaimana kedepan Pemerintah misalnya kita bisa berikan kepada mitra Pemerintah untuk mengambil keputusan dalam menyusun APBN dan sebagainya.

Lanjut, kalau kita perhatikan auditor yang lalu itu ada sebelah kiri, auditor yang akan datang itu sebetulnya lebih sedikit memang *works*-nya akan tetapi karena ini satu model yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar jadi digital auditor itu lebih memberikan Pemerintah atau siapa saja yang membutuhkan DPR RI misalnya, akan lebih tahu *know how*-nya dibandingkan *works* yang dilakukan audit satu per satu.

Lanjut, ini yang disebut *disclosure owner* ... (suara tidak jelas) Kalau misalnya konvensional. Dan ini adalah masa depan, sederhana akan tetapi kualitas dari data itu yang penting. Kalau data itu kualitasnya jelek tentu memang segala hal yang berhubungan dengan audit 4.0 ini juga akan mustahil kita bisa dapatkan hasil yang optimal.

Lanjut, saya ambil kasus karena tadi kita ingin melihat bagaimana sebetulnya kerja itu secara positif, prospeknya, bukan kita sekedar mengaudit rutin. Jadi mungkin Bapak-bapak lebih paham dari saya bagaimana kondisi pemilik NPWP kita hanya sekitar 11% tetapi ini data agak lama mungkin sekarang sudah lebih baru. Di bandingkan dengan kondisi di negara lain di mana *gap tax deviation* itu cenderung kecil dibandingkan kita yang hampir 80%, kira-kira begitu, sehingga kita perlu ekstensifikasi bukan intensifikasi pajak. Bagaimana bisa meningkatkan satu perolehan negara dengan inovasi-inovasi. Dan itu BPK harus hadir disitu kalau memang kelihatan kenapa kok seperti ini terus dari tahun ke tahun, kira-kira begitu. Akan tetapi kita memberikan solusi jangan hanya menemukan masalah saja.

Lanjut, ini contoh seperti kemarin yang terjadi tax amnesti bagaimana negara lain itu sebetulnya sangat takut. Dan saya kaitkan sebetulnya dengan nilai tukar Rupiah bagaimana tax amnesti kok Rupiahnya kita tahu tidak menguat malah Rp13.000, malah sekarang lebih melemah Rp14.000 ini ada apa, gitu kan. Saya melihat memang ada anomali-anomali yang terjadi yang memang harus ada kewenangan yang bisa diturunkan disitu, yang kita mesti pelajari apa persoalannya, dan secara Undang-Undang, secara aturan BPK punya kewenangan untuk itu.

Lanjut, ini yang tadi saya sampaikan kasus Bank Indonesia bagaimana mata uang sejak krisis 1998 sampai sekarang, kemudian bagaimana Australia sebagai contoh yang memang komunitasnya itu, exportnya sama seperti kita, dia export Nikel, batubara dan gas tetapi posisi Dolar dibiarkan menguat seiring dengan demand terhadap komoditas, dibandingkan dengan kita justru terbalik. Komoditas kita demandnya tinggi tetapi Rupiahnya dibiarkan terseok-seok. Inikan perlu ada satu upaya kenapa ini terjadi, kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa tetapi secara professional BPK bisa masuk dan bisa melihat meskipun ada Undang-Undang BI yang mungkin memangari bahwa mereka tidak masuk akan tetapi kita BPK itu amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8A itu menyebutkan khusus tentang BPK, tidak menyebutkan Bank Sentral. Dan tugas dan wewenangnya jelas, siapa pun harus bisa diperiksa oleh BPK sepanjang itu melakukan atau mengelola keuangan negara.

Lanjut, ini saya lewat saja ini kasus yang lain di KLHK. Lanjut, audit sosial yang tadi saya sampaikan adalah sebuah terobosan baru dan sekarang sudah mulai dan

sudah dijalankan oleh negara-negara khususnya negara maju. Dan perusahaan-perusahaan multi nasional bagaimana dampak sosial, dampak yang dirasakan oleh kalau kasus kita misalnya masyarakat pun terkena dampak. Ketika ada pembangunan di satu kabupaten APBN digelontorkan, APBD digelontorkan, apa manfaatnya. Nah, ini sudah ada harusnya *key performance indeks* yang bisa kita berikan, kita lakukan.

*Next*, di dunia ini adalah contoh sertifikasi audit sosial disebut lembaga CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance) hubungannya memang dengan lingkungan hidup tetapi mereka betul-betul mengaudit bagaimana misalnya sebuah perusahaan yang bergerak disektor sumber daya alam bisa memberikan sesuatu manfaat bagi masyarakat dan masyarakat itu diinterview langsung tidak boleh ada kehadiran perusahaan sehingga auditor itu mendengar sendiri bahwa keluhannya apa. Kemudian setelah itu, setelah tatap muka, diberi satu sesi yang disebut dengan *nonconformist* ...(suara tidak jelas) Di mana publik melalui website maupun itu diberikan waktu untuk memberikan tanggapan. Unit kerja yang diperiksa itu harus menjawab untuk mengklarifikasi. Jadi ini adalah contoh-contoh yang audit sosial yang sudah berkembang, sehingga ini harus menjadi satu terobosan beyond audit yang saya tawarkan untuk konsen kedepan.

Lanjut, ini contoh bagaimana perusahaan yang pernah juga melakukan audit sosial. Komunikasi ini di Papua Selatan sehingga itu didengar langsung bagaimana pembangunan perusahaan di sana, seperti apa tanggapan masyarakat. Hal kecil apapun kita harus dengar.

Jadi pemetaan partisipatif bagaimana masyarakat itu betul-betul memberikan satu *mapping social* bagaimana dusun sagu mereka ada dimana, tanah mereka ada dimana, sehingga perusahaan tidak akan bertabrakan dan bersinggungan sehingga konflik sosial akan terhindari.

Lanjut, ini pemetaannya lanjut saja, lanjut lagi. Yang bisa kita dapat jadi contoh tadi pemetaan partisipatif menyangkut aspek sosial dan budaya itu bisa diterapkan pada proses audit, termasuk mapping internal. Karyawan BPK sendiri mungkin tidak pernah dengar keluh kesahnya, tetapi dengan audit sosial kita bisa dengar dan tentu mereka punya keluh kesah, sehingga Pimpinan itu bisa tahu apa perbaikan kedepan. Sehingga WTP itu kedepan saya harapkan WTP plus-plus saya istilahkan. Jadi unit kerja itu harus bisa kita dorong untuk bisa memberikan manfaat dan *income* penerimaan negara yang lebih baik.

Lanjut, rencana aksi tentu BPK kedepan harus mengisi kekurangan-kekurangan dengan Anggota yang mampu menjawab persoalan seperti yang tadi saya sampaikan. Punya kemampuan entrepreneurship, punya pemahaman kelola sosial, komunikasi publik dan tentu paham rambu-rambu perundangan yang berlaku. Dan mengoptimalkan hasil audit ini sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah-langkah nyata yang realistis.

#### **KETUA RAPAT:**

Satu menit lagi Pak.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

Ini sudah terakhir, memberdayakan tentu aspek-aspek pusat analisa ekonominya, penanganan komunikasi publik.

Lanjut, dan kesimpulan jadi beyond audit itu memang ada satu prinsip-prinsip kewirausahaan yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas. Penguasaan tehnik

audit sosial juga sudah harus bisa dikuasai. Dan itulah yang kita harapkan untuk menjangkau lebih luas dari sekedar tehnik audit.

Lanjut, dan mungkin *closing*-nya kalau boleh saya agak berpantun sedikit. Beli ember di Ciampelas naik mobil antik joknya kulit busa, yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ternyata memang luar biasa. Terakhir, ikan mujaer ikan tenggiri, yang mulia para Anggota DPR RI jangan ragu pilih Reza untuk BPK RI.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Nanti kita balas, kita selesai dahulu tugas-tugas utama kita.

Terima kasih Bapak Dr. Reza Suarga yang telah menampilkan BPK secara sisi lain. Kita lebih banyak melihat makro tetapi luar biasa presentasi anda agak berbeda dari yang lainnya. Mungkin ini bagus buat pengayaan kita.

Di meja saya sudah ada beberapa calon penanya. Dari sisi sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 2, kita mulai dari sebelah kiri Bapak Prof. Hendrawan.

Silakan.

#### **F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Dr. Reza Suarga.**

Saya meneruskan apa yang disampaikan Pimpinan tadi, berkali-kali saya melakukan uji kelayakan seperti ini dan baru kali ini saya mendapatkan *paper* yang *indept understanding, inside full analysis* terhadap sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan.

Saya ingat sejumlah korporat Amerika Serikat yang paling sukses ceo-nya lulusan antropolog secara pendekatannya betul-betul *grounded research*. Kemudian narasinya diskripsi yang penuh. Itu sebabnya saya ingin mengapresiasi Pak Reza Suarga paper anda ini *scientifically publishable*. Hanya saya khawatir ini agak pesimis dengan BPK ketika anda mengutip di halaman 17, pengakuan informan anda ini yang mengatakan sejak tahun 2000 atau berhenti melakukan audit yang memberikan opini, sebab ngasih opini ini perlu idealism yang luar biasa tinggi dan saya tidak yakin manusia bisa seperti itu apalagi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa faktor yang paling langka adalah kejujuran, idealism. Itu yang berkali-kali saya katakan pada akhirnya memang manusia yang setengah gila yang berani dan bisa melakukan perubahan.

Nah, kalau kondisinya seperti itu sementara menurut Undang-Undang, BPK harus menyatakan opini. Terus apa ini kalau pendekatan sosial budaya, cultural inikan memakan waktu yang begitu lama Pak. Untuk menjadi bangsa dengan etos kerja yang tinggi kalau penelitian-penelitian sosial cultural itukan membutuhkan beberapa generasi.

Di Jepang, sehingga Jepang memiliki etos kerja seperti sekarang itu setelah melalui sekian generasi dengan penderitaan kolektif yang mencapai titik yang membuat orang begitu melakukan katarsis sosial. Ini Bapak pendekatannya pertobatan dan pendekatan yang luar biasa tetapi efektifitas dalam waktu, kan



seorang menjabat itu tidak lebih dari 5 tahun Pak. Tolong saya diberikan resep yang cespleng.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Prof, ini sudah cocok Profesor lawan Doktor ini.  
Kita pindah sebelah kanan Pak Michael Jeno.  
Silakan.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Bapak Dr. Reza terima kasih pemaparannya sama dengan Prof. ini berbeda dengan yang lain. Ini judulnya juga beyond audit, jadi dari awal juga positioningnya sudah berbeda. Saya lihat sepintas ini curriculum vitaenya memang sepintas Bapak memang bukan background sebagai auditor kalau saya lihat ya. Korporasinya banyak di *resource base*, saya lihat ini mengelola ijin usaha hutan, saya juga penasehat HPAI sekarang. Bapak dulu ada di HPAI saya lihat mengelola ijin usaha untuk energi terbarukan sepertinya, gambut dan segala macam. Memang kalau lihat tadi paparannya juga related dengan itu.

Memang sama seperti Prof. ini memperkaya kita dalam fit and propertest ini, Cuma kemudian ya Bapak Reza kan secara sadar hadir kesini untuk melamar menjadi salah satu Anggota BPK tentu Bapak tahu BPK itu perannya apa dan segala macam, ada audit keuangan, ada audit kinerja, ada audit pemeriksaan tertentu dan saya yakin Bapak pasti sudah mempelajari itu. Kemudian Bapak menawarkan yang beyond audit ini. Saya ingin menanyakan dalam positioning BPK sesuai Undang-Undang perannya seperti sesuai Undang-Undang. Pak Reza ini ingin memperkaya BPK itu disisi mananya, *positioning*-nya nanti kalau seandainya Pak Reza terpilih diantara 9 katakanlah Anggota itu, Pak Reza pasti sudah tahu masing-masing 1-9 masing-masing ada responsibility-nya. Bapak ingin positioning yang dimana, karena dengan latar belakang paper Bapak seperti ini.

Yang kedua, tadi Bapak singgung-singgung mengenai nyambung dengan audit sosial. Bisa dielaborasi lebih jauh tidak itu frame worknya seperti apa atau indikator-indikator apa yang Bapak audit nanti. Yang namanya kita audit kita pasti tahu, saya mau audit indikator ini *achiavement*-nya berapa, *improvement*-nya seperti apa, itu realnya seperti apa. Bisa dikasih sedikit elaborasi atau ilustrasi yang lebih real dan konkrit bayangkan Bapak beyond audit ini salah satunya adalah audit sosial bagaimana itu memperkaya peran BPK, tentu sekali lagi sesuai dengan Undang-Undang BPK.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Michael Jeno.  
Kita kembali ke sisi kiri, silakan Ibu Dra. Hj. Lilis Santika.

**F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Bapak Ketua dan juga rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Bapak Reza Suarga, punya istri? Tapi tidak dicantumkan disini ya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

Sudah pernah punya istri.

**F-PKB (Dra. Hj. LILIS SANTIKA):**

Sudah pernah ya, jawabannya itu diplomatis banget ya, tidak masalah. Maaf ya ditanya, biasanya itu ada CV disini, Bapak Reza tidak masukkan.

Saya papernya ini bugil akan tetapi tidak masalah ya bobotnya luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini untuk menghantarkan Bapak Dr. Reza sendiri menuju harapan yang memang diinginkan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa BPK itu sebagai audit tunggal, pertanyaan saya tidak banyak hanya satu saja dan nanti kalau Bapak terpilih sebagai auditor ya nanti Bapak menduduki di posisi BPK ini. Saya mau tanya Bapak Reza berani tidak untuk mengaudit KPK.

Itu saja, karena tadi diawali dengan pantun saya juga akan melawan dengan pantun. Riang gembira rakyat Papua, dapat durian di kota Penang, Reza Suarga kandidat BPK dapat pujian hatinya senang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Waduh, ternyata Ibu ini pandai juga, terima kasih Ibu sudah membalasnya, sehingga beban Ketua menjadi lebih ringan.

Kita pindah ke sisi kanan, sudah siap Ibu Elviana silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.SI.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Dr. Reza Suarga yang juga saya hormati.**

Selamat ya Pak, sudah masuk daftar calon Anggota BPK RI, mudah-mudahan terpilih, aamiin.

Ini judul Bapak bahaya ini, solusi permanen menghindari proses infolusi di BPK. Saya minta Bapak cerita pendek nanti seperti apa sih infolusi itu terjadi di BPK. Ini menurut pandangan Bapak, yang saya lihat latar belakangnya, baik pendidikan dan pekerjaan tidak ada bersentuhan dengan tugas seorang BPK.

Itu saja Pimpinan, dijawab nanti ya tidak menjawab keseluruhan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.  
Ibu Siti Mufattahah.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak dan Ibu sekalian.**

Terima kasih Bapak Reza Suarga, tidak banyak sih yang ingin saya tanyakan. Tetapi ini sangat penting bagi saya untuk mengetahui bagaimana visi dan misi Bapak dalam menjalankan tugasnya nanti sebagai Pimpinan BPK. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak tadi, Bapak menyampaikan bahwa audit itu sangat penting. Di BPK audit memang tugas utama BPK, tapi yang perlu saya tekankan disini adalah kalau saya bilang sudah jagonya BPK itu. Orang-orang ahli disitu jago audit semuanya tetapi yang paling penting disini adalah bagaimana tindaklanjut dari hasil audit itu yang sampai saat ini masih belum kelihatan gebrakan dari BPK untuk menjalankan tindaklanjut itu. Sehingga uang yang ratusan triliun itu masih menjadi tanda tanya apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, karena kalau tidak ditindaklanjuti maka itu dianggap selesai. Nah, sementara negara dirugikan oleh hal itu.

Nah, itu yang ingin saya tanyakan apa yang akan dilakukan Bapak untuk mengatasi masalah ini. Jangan hanya idealism saja, saya paham kalau idealism Cuma jawabannya "siap Bu, saya akan melakukan gebrakan", tapi gebrakannya seperti apa nanti. Tolong diperjelas kepada kami sehingga kami yakin Bapak bisa melakukan gebrakan itu.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan saya belum melihat mungki yang Bapak sampaikan itu adalah idealism saja. Idealisme Bapak untuk melakukan tugas Bapak sebagai Pimpinan BPK. Tapi saya melihat kalau hanya menjalankan idealisme itu saja sama hasilnya sampai saat ini. BPK itu sama sudah melakukan idealism mereka.

Saya harapkan BPK yang berikutnya di bawah kepemimpinan orang yang baru ini mendapatkan satu hasil kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan disini langkah, terobosan yang betul-betul *pure*, betul-betul terbaru dan tidak dilakukan sebelumnya sehingga bisa target itu bisa optimal.

Terima kasih Bapak, mungkin itu yang saya sampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada lagi kiri dan kanan.

Sebelum di jawab Bapak Suarga ada sedikit saya tertarik Bapak mengaudit sosial itu. Saya juga ingin melihat bahwa ratio pajak kita inikan selalu tidak tercapai, kalau world bank mengatakan yang ideal itu 13% sampai 16%, tapi hari inikan hanya

11 koma, 10, 5 kadang-kadang. Sehingga kami kemarin terpaksa bersama dengan Pemerintah memperbaharui Undang-Undang PNPB untuk menggenjot penerimaan negara. Di situ kita juga melihat bahwa seperti yang Bapak sampaikan tujuan bernegara kita adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ada beberapa yang penerimaan negara yang seharusnya tidak dipungut dan ada yang seharusnya dipungut lebih besar daripada itu. Contohnya misalnya orang mengambil batubara tinggal digali dan kemudian dijual keluar negeri. Itu kita hanya mendapatkan royalty yang tidak besar sedangkan kerusakan lingkungan itu luar biasa. Begitu juga dengan Freeport, saya punya sahabat Dr. Lili Asdjudiredja dia pernah melakukan audit di Freeport dan ternyata kandungan emasnya lebih tinggi daripada yang dilaporkan.

Nah, saya ingin meminta Bapak sampai sejauhmana kalau Bapak itu nanti bisa duduk disalah satu dari posisi BPK tersebut, bisa memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, karena tadi yang disampaikan bahwa memang kita selalu dalam 5 tahun terakhir inikan selalu defisit penerimaan negara kita dibandingkan dengan APBN yang keluar. Sehingga peran BPK pun disini begitu penting, apalagi kita mempunyai BUMN dengan kekayaan 5000 triliun yang harus diawasi setiap tahun, APBN yang 2400 triliun satu tahun.

Saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan sebagai masukan bagi kami untuk menentukan nanti siapa-siapa yang patut untuk kita pilih mewakili Republik ini diposisi BPK.

Terima kasih.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin Pimpinan, mohon maaf.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Reza.

**Dr. Reza yang kami hormati.**

Pemaparannya tadi kami terima kasih memang selama 3 hari ini kita terus melakukan fit and proper test dan kita mendapatkan banyak sekali masukan dari para kandidat. Dan tadi kesimpulan beyond audit ini yang terakhir Pak, menjangkau lebih luas dari sekedar tehnik audit atau beyond audit merupakan solusi BPK RI dalam menjawab tantangan tugas kedepan yang penuh dinamika multi dimensi.

Bapak tentu tahu memang beberapa kandidat berasal dari dalam Pak, internal BPK dan Bapak Reza dari luar. Bahwa tantangan BPK RI itu ada keterbatasan anggaran dan SDM. Sementara entitas yang mereka itu Pak, RKAKL-nya 86 kemudian LKPD-nya 542 tersebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu tantangannya. Bagaimana kalau seandainya kita kan semua yang duduk di depan kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Maka kalau Dr. Reza kalau seandainya diijinkan oleh Tuhan dan dipilih oleh mayoritas kami kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan bahwa pemeriksaan itu bukan hanya sekedar

untuk memastikan governancy dari Pemerintahan itu, tetapi pemeriksaan itu bisa berdampak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Itu dari saya Pimpinan, dan terakhir tadi saya juga ingin menjawab pantun Bapak yang indah tadi dengan satu pantun yang sempat saya coret sedikit disini. Sore hari kota Jakarta semakin padat, sehingga harus bersabar menata hati dan menjaga amarah, Dr. Reza yang terhormat niat tulus disertai ridho Tuhan, Insya Allah jadi berkah bagi bangsa dan negara.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, ada 7 pertanyaan dari total semuanya.

Silakan Bapak Reza Suarga untuk menjawab secara lengkap dan komprehensif sehingga bisa memuaskan semua yang kami hadir disini.

Waktu dan tempat kami persilakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang saya muliakan.**

Dari Prof. Hendrawan, memang tadi kelihatannya paper ini bagus katanya tapi terlalu mengawang-awang kurang membumi. Saya memang berangkat dari *background* pengusaha yang memang tidak pernah terima anggaran APBN, salah satu contoh begitu. Jadi saya harus cari sendiri, jadi saya sudah biasa digebukin, ditolak, dimaki-maki, pinjam uang juga dikejar-kejar. Jadi tadi kebetyulan auditor senior yang saya wawancara yang Pak Hendrawan tanyakan memang langka juga yang kebetulan beliau dosen di Universitas Indonesia. Opinion audit yang beliau sampaikan karena tentu tidak bisa mengelak, karena kalau bukan kantor akuntan publik pun kalau tidak kasih opinion audit tidak dibayar. Tetapi beliau uniknya karena saya bersahabat dengan beliau kalau opinion audit dia kasih ke rekan KAP, tetapi beliau melakukan indeks audit secara manajemen dan operasional.

Tujuannya apa? dari hasil manajemen audit dan operasional audit itu beliau bisa membuat mapping terhadap problem perusahaan yang diaudit tersebut. Makanya yang saya usulkan tadi mungkin di awal target utama mungkin kalau bisa kembali di slide yang awal-awal ada target utama mohon kalau boleh kembali. Itu saya bilang target utamanya adalah WTP plus-plus, karena WTP plus-plus itu kita tidak ingin menafikan keahlian tadi mungkin kalau Ibu Mufattahah tadi sampaikan auditor ini memang sudah klotokan, saya tidak menyangkal. Tapi mungkin karena saking teknisnya dia mungkin juga sudah tidak merasakan dimana salahnya, mungkin orang luar kayak saya bisa melihat di sini kelemahannya.

Nah, WTP plus-plus ini saya harapkan karena pengalaman saya juga melakukan manajemen audit dan operasional audit ke berbagai perusahaan-perusahaan yang saya ambil alih melakukan kerugian, itu kita bisa temukan satu peluang-peluang yang sekecil apapun sehingga potensi dari unit kerja, entah itu kementerian, entah itu Pemerintah Daerah, sehingga kedepan itu tidak sekedar procurement audit istilahnya, mungkin audit-audit rutin saja tetapi bagaimana potensi-potensi itu bisa digali dan bisa dikejar.

Saya ambil contoh di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Mungkin Bapak Pimpinan, saya dengan bangga sekarang sedang

mengelola kawasan hutan di kampungnya Bapak di Musi Banyuasin seluas 22 ribu hektar. Saya tidak terbang, saya konservasi, mungkin dulu Bapak pernah dengar karbon kredit sekarang saya sudah ada pembelinya. Saya sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan-perusahaan multi nasional, sudah ada investor yang menggarap. Jadi 22 ribu hektar itu di Musi Banyuasin tahun 2015 habis terbakar, sisa 250 hektar, sekarang *alhamdulillah* sudah hijau kembali, saya lakukan kanal bloking dan *alhamdulillah* saya sudah mendapatkan investor dan pembeli dari karbon kredit itu. Tetapi hutan itu harus disertifikasi, dan namanya *verified carbon standard*.

Apa yang ingin saya sampaikan, ini karena berdasarkan pengalaman saya audit yang mereka lakukan itu Cuma 1 orang di Amerika, tetapi kita base auditnya berbulan-bulan, tukar menukar data. Ketika datang dua minggu, betul-betul komprehensif. Tadi pajak CCBA itu audit sosialnya Pak, jadi audit sosial di lahan saya itu dia minta diantar ke kampung ada dua dusun, Dusun Merang dan Kepayang. Disitu mereka saya antar tetapi saya tidak boleh ikut, dia betul-betul wawancara itu masyarakat. Ini perusahaannya manfaatnya apa buat kamu, keluhan kamu apa, ini apa, ini apa, detail sekali. Setelah itu saya dipublikan di website di sana semua orang seluruh dunia boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh mencaci maki dan saya wajib mengklarifikasi. Setiap caci maki, setiap pertanyaan, setiap keluhan, termasuk ada satu masyarakat yang sebetulnya merambah hutan saya di tanami sawit seluas 2 hektar tapi dia complain kepada auditor itu katanya sudah tidak bisa tangkap ikan, karena di kanal bloking yang saya lakukan. Sebenarnya kanal bloking itu bermanfaat untuk membasahi kembali lahan gambut yang sudah kena ...(suara tidak jelas) Itu tapi beliau sendiri pada waktu itu bilang bahwa ini tidak terlalu signifikan.

Tapi saya bisa menyelesaikan persoalan itu dengan saya rangkul si petani itu, sehingga malah saya pekerjaan sebagai...(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Mohon dipersingkat, karena waktunya sudah tinggal 1 menit.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

Jadi pekerjaan gitu.

Ini adalah contoh dari Prof. Hendrawan, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana audit sosial dengan *activision intelligent* sebetulnya. Tadi kalau mungkin bisa saya rangkum saja pertanyaan yang begitu banyak tadi. *activision intelligent* sebetulnyakan bisa dari hal yang paling sederhana. Absensi misalnya, sekarang absensi itu tidak perlu lagi harus cap jempol ataupun finger print sebetulnya dari HP saja bisa ketahuan. Kalau karyawan kita nanti misalnya ngakunya masuk tetapi ternyata lagi makan di Plaza Senayan atau Senayan City saya sebagai Pimpinan sebetulnya sudah bisa, karena saya bisa melihat gadget yang dia punya kepada unit-unit pemeriksa yang mungkin pengawas-pengawasan internal, sehingga efektifitas mungkin dari hal yang kecil seperti itu saja setidaknya jumlah jam kerja itu bisa kita efisienkan.

Tentu masih banyak hal-hal *activision intelligent* yang kita bisa lakukan, dan komponen-komponen dari *activision intelligent* itu sendiri sangat sekarang sudah tidak mahal, jadi kalau tadi dibilang *under budget*, *under human resource* saya termasuk orang yang tidak suka nambah karyawan, meskipun pasti saya dikutuk nanti kalau tidak bisa memberikan lapangan kerja yang banyak, tapi menambah karyawan itu harus yang ahli jangan menambah karyawan yang tidak *qualified*, lebih bagus

karyawan-karyawan yang memang tadi. syaratnya kan 3, technology anable, memiliki accountability, dan yang terakhir adalah confident menyangkut dalam kebaikan.

Untuk Ibu Lilis mungkin saya harus jawab, karena sama-sama dari Jawa Barat. Jadi ketika terpilih berani tidak mengaudit KPK. Saya rasa harus, saya siap dan berani karena bagaimana pun mereka kan menggunakan uang negara. Kalau tidak diperiksa kwalat saya, kan kira-kira begitu Bu. Jadi bagaimana cara masuknya, saya rasa Undang-Undang Dasar dan 4 Undang-Undang lain juga memberikan kewenangan dan tugas kepada BPK untuk melakukan hal-hal itu.

Saya sudah kelamaan mungkin, meskipun masih banyak yang harus dijawab.

**KETUA RAPAT:**

Kami persilakan *closing statement*.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. REZA SUARGA, B.A., M.M.):**

Baik, sungguh luar biasa kesempatan yang diberikan. Saya rasanya mungkin menang kalah bukan menjadi soal, tetapi ijin saya karena Bapak dan Ibu akan memilih 5 nama. Saya tidak perlu nomor satu, tetapi nomor lima sudah cukup.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Baik, Ibu dan Bapak sekalian kita berikan *applause* sekali lagi kepada Bapak Dr. Reza Suarga, kami ucapkan terima kasih. Dari Bandung ke Jakarta jangan lupa mampir Bekasi, kepada Dr. Reza Suarga kami ucapkan terima kasih.

Rapat kita skors 5 menit dan kepada Bapak Dr. Reza Suarga kami persilakan untuk meninggalkan ruangan, silakan berjabat tangan kalau mau.

**(RAPAT DISKORS)**

Skors kita cabut.

**Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang kami banggakan.**

Kita telah kedatangan Bapak Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.

**Para Anggota Komisi XI DPR RI dan hadirin sekalian.**

Bapak adalah undangan kami yang kelima untuk menyampaikan paparan tentang visi dan misi, serta pemikiran daripada BPK RI yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan tata tertibnya adalah Bapak diberikan waktu total 45 menit maksimal lebih kurangnya 15 menit paparan dan 30 menit tanya jawab dan jawaban Bapak sendiri sudah masuk di 30 menit tersebut.

Untuk mempersingkat waktu supaya kita bisa mengejar Magrib, kami persilakan langsung Bapak menyampaikan paparannya, sambil dipersiapkan peralatannya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

Mohon ijin Bapak Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama saya haturkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk saya boleh dapat memaparkan atau menyampaikan makalah yang sudah saya sampaikan kepada Komisi XI DPR RI dalam rangka proses pencalonan menjadi Anggota BPK RI.

Adapun makalah yang sudah saya sampaikan berjudul “transformasi organisasi BPK RI dalam rangka peningkatan peran strategis BPK RI untuk peningkatan kesejahteraan rakyat”. Makalah ini di latarbelakangi pada dua hal penting. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita memiliki modal dasar pembangunan yang sangat besar, yaitu memiliki daratan dan lautan yang sangat luas, memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah, memiliki sumberdaya manusia yang sangat banyak, kemudian juga terletak dari antar dua Samudra dan dua benua, sehingga kita memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Dan setelah 74 tahun kita merdeka harusnya dengan modal besar tersebut, negara kita bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun, yang terjadi adalah sebagaimana kita ketahui bersama banyak sekali PR-PR yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Diantaranya adalah misalkan masih tingginya tingkat korupsi, kualitas SDM yang masih rendah, kualitas infrastruktur yang buruk, iklim investasi yang kurang kondusif, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan juga tingkat ketimpangan pemerataan gini ratio yang relative masih cukup besar.

Yang kedua, yang menjadi latar belakang pemikiran saya mengajukan makalah ini adalah kita ketahui bersama juga bahwa pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini masih tergantung pada belanja negara, yaitu melalui APBN. Jadi besaran APBN ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan dana yang ada maka Pemerintah bisa melakukan 3 fungsi ekonomi, yaitu baik fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Dan karena ini APBN ini adalah bagian daripada keuangan negara, maka keuangan negara dan penggunaan APBN ataupun realisasi daripada APBN ini harus bisa diawasi dengan baik. Disinilah BPK bersama dengan lembaga perwakilan dan juga dengan aparaturnya yang lain memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa penggunaan uangan negara ini sesuai dengan maksud dan tujuannya.

**Bapak, Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa sebagai satu institusi BPK RI memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu kita ketahui BPK RI itu termasuk di dalam Bab 8A Pasal 23 E, 23F, 23G dari amandeman Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga BPK RI dibekali dengan 4 Undang-Undang turunan daripada Undang-



Undang Dasar 1945 tersebut, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dan BPK memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Kewenangan BPK ada 10 dan dengan kewenangan tersebut BPK bisa melakukan tugasnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) dan juga Pasal 11, yaitu yang pertama adalah BPK mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU dan BUMD. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan di dalam Pasal 11 dikatakan BPK juga punya tugas untuk memberikan pendapat. Kemudian juga memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara dan juga memberikan keterangan ahli dalam persidangan. Dengan tugas dan kewenangan ini maka BPK berperan strategis sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tujuan bernegara.

### **Bapak, Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Setelah 74 tahun lembaga ini berdiri, banyak sekali pencapaian yang dicapai oleh BPK. Dan pada sore hari ini saya ingin sampaikan ada 8 hal yang cukup penting yang sudah dicapai oleh BPK. Yang pertama, adalah kita ketahui bersama bahwa opini, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah, LKPP maupun LKPD yang memperoleh opini WTP itu semakin lama semakin banyak dan yang TMP semakin sedikit.

Yang kedua adalah hasil penilaian daripada reformasi birokrasi BPK itu baik, kemudian yang ketiga jumlah pemeriksaan kinerja juga sudah mulai meningkat, walaupun pada tahun 2017 sedikit menurun. Kemudian yang keempat adalah BPK juga mereview oleh SAI internasional, yaitu SAI Polandia, Estonia dan juga SAI Norwegia.

Kemudian juga hasil Lakip BPK itu sangat baik, bahkan sejak tahun 2011. Kemudian jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga mulai banyak dan meningkat. Kemudian profil SDM BPK itu sangat baik. Jadi dengan 6000-an SDM yang ada di BPK yang saya amati ini SDM-SDM yang sangat baik, yang sangat mumpuni dan hampir 4000 itu mereka berprofesi ataupun bertugas sebagai pejabat fungsional auditor. Kemudian yang terakhir adalah BPK dipercaya menjadi eksternal auditor dari Badan Tenaga Atom Dunia.

Berikutnya adalah beberapa tantangan yang menjadi PR bagi BPK, ada 5 disini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah tingkat korupsi di Indonesia ini masih tinggi dengan skors IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 38 ranking 89 dari 189 negara. Yang kedua adalah tunggakan dari tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga ini masih besar. Dan juga intinya kerugian negara daerah yang belum selesai dari tahun 2005 sampai dengan 2018 masih ada sekitar 2,8 triliun dan yang masih tersisa 1,62 triliun atau sebesar 58%.

Yang keempat adalah BPK saat ini fokus pemeriksaannya masih pada pemeriksaan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah BPK ditantang untuk bisa melakukan audit yang berkualitas dan bermanfaat bagi para *stakeholder*. Berdasarkan tantangan ini maka pada sore hari ini saya mencoba mengusulkan

kepada Bapak dan Ibu Pimpinan Dewan yang terhormat, bahwa agar BPK yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Maka dibutuhkan atau perlu dilakukan yang namanya transformasi organisasi BPK. Dan meminjam teori daripada .... Transformasi organisasi dikatakan sebagai satu perubahan yang menyeluruh dari organisasi, baik yang bersifat mendasar dan strategis yang tujuannya agar organisasi tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Untuk melakukan transformasi organisasi ini dilakukan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu 4R. Yang pertama ada reframing, yang kedua adalah restructuring, yang ketiga adalah revitalisasi, dan yang keempat adalah renewal. Dan saya usulkan disini terkait dengan 4R tersebut, terkait dengan reframing maka transformasi organisasi BPK ini dilakukan yang namanya mainsetting, yaitu perubahan pola pikir dari seluruh lapisan, baik tingkat Pimpinan sampai dengan tingkat yang kebawah.

Kemudian perlu memperkuat visi dan misi tujuan organisasi berdasarkan analisis swatch yang dilakukan. Kemudian juga perlu dilakukan pengembangan manajemen kinerja dengan indikator-indikator pengukuran yang jelas. Dari aspek infrastructure ini maka disini dibutuhkan ataupun perlu dilakukan yang namanya penataan dan penguatan organisasi, penyusunan tata kelola yang baik dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Dan revitalisasi ini dalam teori ...(suara tidak jelas) Dikatakan bagaimana satu organisasi itu menciptakan bisnis yang baru ataupun layanan yang baru. Di sini pada sore hari ini saya mengusulkan ada 7 hal, yang pertama adalah agar BPK ini tidak fokus tidak hanya pada audit laporan keuangan tetapi BPK juga mulai melakukan yang namanya audit tematik termasuk audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu. Jadi dilakukan yang namanya integrated audit, supaya apa? supaya audit ini tidak bolak balik diperiksa, tapi mereka kalau diperiksa keuangan, diperiksa kinerja, diperiksa dan seterusnya nanti kapan kerjanya. Mungkin nanti perlu dilakukah yang namanya integrated audit.

Yang kedua adalah audit tematik disini berdasarkan yang namanya SDG's sebagaimana kita ketahui bahwa kita juga Pemerintah Indonesia harus melakukan yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan daripada NDG's. Kemudian yang ketiga adalah audit laporan keuangan, Pemerintah Pusat hanya dilakukan pada laporan keuangan Pemerintah Pusat saja, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Artinya, laporan keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Nah, selama ini Bapak dan Ibu, mungkin kita tahu bahwa yang dilakukan audit ini pemberian opini itu diberikan kepada semua KL yang ada, semua kementerian, semua lembaga itu diberikan opini. Dari Undang-Undang yang saya baca, yang saya pelajari dari 4 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa BPK ini menyerahkan laporan itu hanya kepada Presiden dan kepada Kepala Daerah, tidak dikatakan memberikan laporan itu kepada Menteri atau kepada Kepala Badan. Jadi mungkin ini selama inikan eforia yang ada mungkin tidak perlu lagi.

Kemudian yang kedua adalah agar resources yang ada di BPK ini bisa dipakai atau digunakan untuk melakukan audit yang lain, jadi bukan hanya audit keuangan saja. Kemudian yang keempat adalah kita memanfaatkan information technology dan kemudian big data dan juga data analitik untuk melakukan yang namanya integrated audit BPK tadi. Dan juga saya mengusulkan perlu dibuat yang namanya dashboard untuk menyampaikan laporan hasil penelitian dan juga dashboard untuk melihat tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sehingga dengan demikian komunikasi antara BPK dengan lembaga perwakilan bukan hanya melalui forum atau rapat-rapat konsultasi saja, tetapi dengan pemanfaatan dashboard yang ada, maka bisa

membantu lembaga perwakilan untuk bisa membuat ataupun melakukan analisis kebijakan di dalam rapat-rapat konsultasi dengan Pemerintah.

Kemudian juga memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah, lembaga perwakilan untuk evaluasi dan juga untuk forside pengambilan kebijakan kedepan. Dan memberdayakan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan audit untuk atas dan nama BPK di dalam melakukan audit tersebut.

Dan yang terakhir annual disini peningkatan kapasitas lembaga, kapabilitas dan juga integritas daripada SDM BPK, menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif menjadikan dan menerapkan BPK sebagai *learning organization* dan *knowledge management*. Dan yang terakhir adalah kalau saya terpilih, saya akan memimpin dengan contoh *leading by example*, yaitu sebagai pemimpin harus independent, punya integritas dan professional menjadi teladan dan juga beretika di dalam kepemimpinan yang ada.

### **Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya yakin dengan transformasi tersebut akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan negara yang menjadi lebih ekonomis, lebih efisien, lebih efektif, lebih transparan, lebih akuntable, yang akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan kesejahteraan rakyat disini bisa kita lihat daripada misalkan indikator-indikator dalam SDG's yang ada, misalkan angka kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, kemudian tingkat pendidikan meningkat, tingkat kesehatan meningkat dan lain sebagainya.

Dan sebagai penutup, maka apabila saya diberikan kesempatan untuk menjadi Anggota BPK. Di dalam PasaL 7 Ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara dikatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dan tentu sebagai Anggota nanti, maka saya akan dengan sekuat tenaga saya, dengan sekuat hati saya, saya akan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri, berintegritas dan professional. Dan saya akan menjalankan transformasi organisasi ini sehingga BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara yang bermanfaat bagi tujuan bernegara. Melalui apa? melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dan pada akhirnya, maka cita-cita NKRI mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sejahtera itu bisa tercapai.

Demikian Bapak dan Ibu Pimpinan, Anggota Dewan yang saya hormati.

Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga kesabaran Bapak dan Ibu mendengarkan paparan saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Prof. Dr. Candra Wijaya.

Paparan Bapak pas 15 menit, selanjutnya kami masuk sesi kedua yaitu mendengarkan tanggapan atau pendalaman terhadap paparan yang Bapak sampaikan. Di meja kami sudah ada daftar penanya dari sisi sebelah kiri kami persilakan Bapak Misbakhun.

Silakan Pak.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. sebagai bakal calon Anggota BPK RI yang  
saya hormati.**

Pertama, saya memberikan apresiasi atas paparan yang begitu bagus. Yang kedua, saya ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan soal pertama tantangan BPK RI tingkat korupsi masih tinggi, IPK kita rangking 89 dari 189 negara. Soal persepsi IPK ini saya termasuk yang paling tidak setuju di rangking di seluruh dunia. Karena apa? Undang-Undang mengenai korupsi di tempat kita, di negara kita, kalau diterapkan di Amerika maka seluruh pejabat di Amerika itu koruptor. Kalau Undang-Undang di Amerika diterapkan di Indonesia kita semuanya ini bebas melenggang. Anggota DPR RI di Amerika boleh menerima uang dari para lobbies dan kita tidak. Kita menerima uang berapa pun itu akan menjadi sebuah pasal korupsi, tidak menerima pun akan menjadi turut serta dan sebagainya. Dan ini kemudian mau dipakai apakah ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena tugasnya BPK itu adalah bukan memberantas korupsi, kita harus kalibrasi pemahaman kita tentang ini.

Yang utama pemeriksaan itu tidak indentik dengan bagaimana kita memberantas korupsi. Kemudian sama dengan tesis, WTP tapi masih ada korupsi itu saya juga bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Tetapi keinginan mengenai tadi bagaimana daya serap APBN masuk ke APBD, bagaimana penggunaan dan sebagainya itu saya setuju dengan apa yang menjadi prinsip dasar pemikiran yang disampaikan oleh Profesor.

Satu lagi yang saya tanyakan, Profesor menyampaikan bahwa ada 4 Undang-Undang yang Profesor sampaikan berkaitan dengan BPK, bahwa opini itu hanya adalah di LKPP. Yang ingin saya tahu apakah kemudian kalau BPK itu memberikn opini terhadap masing-masing segmen kementerian/lembaga, kemudian apakah itu menjadi sebuah kesalahan, apakah ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengatur itu.

Itu saja yang ingin saya tanyakan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Misbakhun.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

Pimpinan, saya langsung jawab atau tampung dulu.

**KETUA RAPAT:**

Kita tampung Pak, tidak terlalu banyak pertanyaannya.

Kita lanjut dengan Bapak Prof. Hendrawan.

**F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Prof. Dr. Chandra Wijaya yang saya hormati.**

Jadi saya mengapresiasi karena paper ini sangat sistematis. Jadi semuanya disentuh dan topiknya juga sangat relevan, karena ujungnya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Saya hanya mengagumi CV yang panjang dan sistematis seperti ini, ini membuktikan dokumentas yang bagus, administrasi yang bagus, saya lihat ternyata lulusan Fakultas Adminstrasi jadi mengadminstrasikanya rapi. Saya senang karena Profesor juga menyingung persoalan penerapan *knowledge management, learning organization* dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan dan meminta klarifikasi adalah yang butir 4, mainseting seluruh pegawai terutama auditor. Jadi rupa-rupanya Profesor Chandra sudah menganggap atau menilai auditor ini titik lemah integritas dari BPK. Terus penjelasannya atau aktifitasnya pelatihan mainseting untuk membuka mental block, ini apa yang dimaksud dengan mental block, karena bisa juga moral block, bisa juga integrity block. Nah, ini kami minta klarifikasi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita pindah ke sisi kanan Ibu Elviana sudah siap?  
Silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. yang saya hormati.**

Semakin lama kami disini semakin bertambah juga pengetahuan kami. Kalau tadi solusi permanen menghindari proses infolusi BPK, kemarin mau menerapkan revolusi industry 4.0. Sekarang Bapak mau menawarkan transformasi organisasi BPK RI. Yang saya tanyakan semoga saja Bapak terpilih, Bapak lulus dalam uji kelayakan pada sore hari ini. Ada tidak pasal-pasal di Undang-Undang BPK yang sekarang akan menghambat transformasi organisasi BPK RI, sehingga nanti hal itu diusulkan diubah baru Bapak bisa menerapkan rencana yang Bapak tuangkan dalam paper Bapak pada sore hari ini.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Baik, lanjut Ibu Siti Mufattahah.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, PSI.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan sekalian, Prof. Chandra.**

*Alhamdulillah* Prof. sudah sampai disini. Dari paparan Prof. saya melihat cukup banyak hal-hal ideal yang disampaikan oleh Prof, sehingga harapannya itu akan memberikan perubahan terhadap kinerja BPK nantinya. Namun, seperti dengan yang lainnya saya ingin menanyakan secara teknis pemikiran Prof, untuk menangani kelemahan BPK saat itu, yaitu bagaimana BPK ini sampai saat ini masih belum bisa memberikan tindaklanjut terhadap hasil temuan-temuan BPK. Sementara temuan-temuan BPK itu bisa dikatakan itu sebenarnya sangat bisa membantu pemasukan negara yang 100 triliun itu. Nah, bagaimana terobosan Prof. nantinya, karena sampai saat ini BPK belum bisa menindaklanjuti itu. Tentunya Prof, harus memberikan terobosan yang bisa digunakan yang tidak biasa yang sudah dilakukan oleh BPK. Itu yang pertama.

Kemudia yang kedua, berkaitan dengan kondisi saat ini juga anggaran dari BPK itu bisa dikatakan tergolong kecil. Tapi bagaimana Prof, bisa memberikan, menunjukkan kinerja yang terbaik untuk mencapai kinerja yang optimal. Saya ingin bertanya Prof, menurut anda mana yang dipilih *budget base on program* atau *program base on budget*. Jadi saya ingin memahami dari situ agar saya bisa tahu, kalau memang *budget base on program* kenapa, apa alasannya. Dan yang sebaliknya kalau *program base on budget* terus harus bagaimana. Mungkin perlu ditindaklanjuti masalah itu.

Dan yang ketiga, yang sangat penting ingin saya tanyakan adalah seperti yang disampaikan rekan yang lainnya untuk mempertegas saja bahwa saat ini banyak BPK memberikan lebeling WTP, tapi setelah itu ternyata terjadi OTT. Nah, ini bagaimana dengan kemampuan dari BPK ini menentukan WTP itu dengan kriteria apa. Bisa menjamin WTP itu hasil WTP itu bisa dijamin seperti apa, karena kalau misalnya masih terjadi seperti ini berarti kinerja BPK tidak bisa pertanggungjawabkan dan itu masih banyak terjadi di negara ini.

Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam.*

Terakhir Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang masih setia dan bertahan melakukan tugas konstitusi fit and propertest untuk kandidat Anggota BPK RI, 5 orang yang akan kami pilih dari sementara ini masih ada 30 sampai hari ini yang akan kami lakukan fit and propertest.

**Prof. Chandra yang kami hormati.**

Terima kasih untuk pemaparan yang disampaikan kepada kami, kami merasakan sejak Senin sampai sekarang menjadi orang yang lebih pintar dan lebih tahu banyak dari para kandidat yang memaparkan seluruh materi kepada kami. Dan mengingat tugas BPK yang begitu strategis, yang perannya begitu strategis bagi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk agar sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang Prof paparkan kepada kami.

Kita tahu bahwa BPK termasuk juga DPR RI, kami itu semua tantangannya adalah keterbatasan anggaran dan kalau di BPK ditambahkan lagi keterbatasan SDM. Terus kemudian Prof Chandra menyampaikan strategi untuk mentransformasi BPK sesuai dengan harapan dan ide yang Bapak paparkan kepada kami. Apabila Bapak diijinkan oleh Tuhan dan dipilih oleh mayoritas dari kami menjadi salah satu dari 5 orang yang kami pilih pada kesempatan kali ini, maka saya ingin menyoroti tentang strategi yang ada di point 3 dalam kelompok 3 nomor urut yang 3, yaitu audit laporan keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP hanya dilakukan pada laporan keuangan Pemerintah Pusat atau RI saja. Itu mungkin adalah upaya Prof. Chandra untuk menggunakan atau mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran dan SDM yang dianggap sebagai tantangan kita yang terbatas tadi. Itu yang pertama.

Kemudian dengan memanfaatkan IT, big data, data analitik untuk integrated audit BPK. Dan kemudian dashboard hasil pemeriksaan berikut tindaklanjutnya. Tolong bisa didetailkan sedikit kepada kami bagaimana kira-kira kedua upaya atau strategi yang telah disiapkan itu. Jadi mengauditnya hanya LKPP, pusat saja, sementara LKKL dan LKPD-nya yang terlalu banyak itu bisa dirandom atau disampling saja. Kemudian memanfaatkan IT untuk integrated audit BPK dan dashboard hasil pemeriksaan berikut tindaklanjutnya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, demikian posisi kiri masih ada saudara kita Bapak Purnamasidi.  
Silakan.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Singkat saja terkait dengan Bapak Prof. Chandra terkait dengan transformasi organisasi BPK RI, salah satunya adalah dilakukannya restrukturisasi. Saya hanya

ingin mendapatkan gambaran dilakukannya transformasi organisasi ini khusus untuk organisasi ini berubah seperti apa Pak, dari yang sekarang kemudian kedepan kira-kira seperti apa.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, demikian Bapak Profesor Chandra, kita ada 6 pertanyaan.

Silakan Bapak jawab 6 pertanyaan tersebut, waktu yang tersedia masih 10 menit.

Silakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan juga merespon makalah yang sudah saya sampaikan.

Ijinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, satu per satu. Pertama, tadi Bapak Misbakhun mengatakan bahwa indikator di dalam Indeks Persepsi Korupsi yang berlaku ataupun yang diterapkan pada adapun oleh transparansi internasional itu memang tidak sesuai yang menjadi *culture* atau kebiasaan kita.

Saya sependapat Pak, dengan pendapat Bapak tersebut tetapi ini saya angkat, kenapa? Karena ada persepsi di masyarakat luas bahwa yang namanya tingkat korupsi ini banyak terjadi pada pejabat negara atau kepada birokrasi. Dan terkait dengan birokrasi yang ada tentunya di sinikan menjadi domain daripada BPK. Maka ada harapan ataupun tantangan dan harapan dari masyarakat agar BPK dapat berperan lebih agar IPK ini menjadi berkurang ataupun skorsnya meningkat, sehingga kita menjadi lebih baik lagi di mata dunia internasional.

Yang bisa kita lakukan adalah kalau nanti saya di BPK, saya akan dorong agar yang namanya sistem pengendalian internal yang ada di dalam instansi KL Pusat maupun Daerah itu ditingkatkan lagi, sehingga peluang mereka untuk melakukan korupsi itu menjadi sangat minim. Dan saya setuju bahwa audit ini bukan untuk memberantas korupsi karena memang kita kalau audit disinikan ada audit keuangan, audit kinerja dan juga audit dengan tujuan tertentu.

Kemudian tadi yang kedua Bapak Misbakhun juga menanyakan apakah pemberian opini pada KL yang ada selama ini, itu salah atau tidak. Saya pikir sepanjang tidak dilarang itu tidak salah, tetapi pada sore hari ini jadi perlu saya angkat, tadi sejalan juga dengan pernyataan dari Ibu Indah dan pertanyaan dari Ibu Siti. BPK memiliki *resources* yang terbatas Pak, dana dan juga auditor yang terbatas. Jadi BPK tidak bisa melakukan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan kinerja dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti kedepannya bukan KL lagi diberikan opini, karena nanti daerah juga nanti misalkan Dinas Kehutanan saya minta opini juga, Dinas Perhubungan minta opini juga, nah ini habis *resources* yang ada.

Jadi mungkin kalau menurut amanat Undang-Undang ini hanya BPK menyerahkan laporan kepada Presiden dan kepada Kepala Daerah, dan lembaga



perwakilan tentunya. Kepada Lembaga Perwakilan dulu baru nanti ditembuskan kepada Presiden dan juga kepada Kepala Daerah.

Yang kedua, dari Profesor Hendrawan terkait dengan mainseting mental block. Mohon maaf ini Prof, mungkin kalau misalkan ini ada persepsi tanda petik yang kurang baik dari orang luar terhadap auditor yang ada. misalkan dibidang korup, mempersulitlah, harus negosiasi dan lain sebagainya. Mungkin mainset ini harus dirubah bahwa BPK ini punya peluang untuk bekerja dengan baik dan pekerjaan ini menjadi amal ibadahnya. Dengan cara apa? mereka bisa mendorong agar pengelolaan keuangan negara ini bermanfaat sesuai dengan tujuan bernegara. Mainset ini yang harus kita rubah begitu, bahwa mereka ini harus bekerja baik dan benar. Itu yang mungkin kebayang di saya.

Kemudian juga learning organization dan knowledge management. Jadi mungkin saya melihat bahwa BPK ini punya SDM yang bagus tetapi pasif dan explicit knowledge ini tersebar. Jadi bagaimana yang pasif knowledge ini kesampai juga ke yang lain, diketahui oleh yang lain. Jadi ini perlu kita manage gitu Pak.

#### **F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Satu menit, jadi pendekatannya ini Prof. Chandra Wijaya pendekatan plato, sementara historis materialism dan Aristoteles.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

Terima kasih Prof.

Kemudian yang ketiga, Ibu Elviana tadi menanyakan bahwa usulan saya ini kira-kira bertabrakan tidak dengan Undang-Undang yang ada. *alhamdulillah* tidak ada Ibu, jadi saya sudah baca semua. Jadi saya tidak berani mengusulkan yang tidak bisa diimplementasikan. Jadi aman ini Bu, bisa diterapkan semua.

Kemudian juga Ibu Siti tadi menanyakan terkait dengan tindaklanjut yang masih belum ditindaklanjuti. Saya pikir begini Bu, kalau misalkan nanti kita buat satu dashboard. Dashboard ini diketahui bukan hanya di kami akan tetapi juga diketahui dilihat kapan waktu setiap waktu oleh lembaga perwakilan. Maka kita sama-sama bisa *mem-follow up* itu. Kemudian yang kedua, kita juga kalau misalkan memang ada unsur Tipikor, BPK tidak boleh segan-segan untuk melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa BPK dengan lembaga perwakilan dan aparaturnya Gakum ini kita sama-sama mengawasi.

Kemudian yang kedua, mengenai opini. Jadi opini inikan adalah pendapat ataupun pendapat dari seorang auditor terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Ada 4 kriteria yang menjadi dasar seorang auditor itu memberikan opini. Yang pertama adalah apakah transaksi yang terjadi itu dicatat sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua adalah apakah data ataupun informasi itu sudah diungkapkan dengan penuh. Jadi kalau misalkan dia tidak mengungkapkan secara umum ini menjadi catatan buat auditor. Yang ketiga adalah peraturan yang berlaku pada instansi atau KL tersebut itu dipatuhi atau tidak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana internal kontrolnya, sistem pengendalian internalnya.

Nah, empat ini menjadi dasar auditor untuk memberikan opini. Jadi kalau misalkan ada satu daerah, dia mendapat opini WTP atau WDP atau apapun kriterianya berdasarkan 4 kriteria tadi. Tapi misalkan dia kena OTT ini adalah perilaku koruptif daripada pejabat tersebut. Jadi tidak bisa misalkan dikaitkan kalau WTP

sudah pasti tidak kena OTT. Mungkin yang tidak diketahui oleh masyarakat luas mengenai opini tersebut.

Kemudian yang ketiga adalah mengenai anggaran yang kecil, tentu memang di mana-mana pasti semua itu yang namanya *resources* pasti terbatas. Tadi Ibu Indah katakan SDM terbatas, sarana dan prasarana terbatas, kemudian juga dana terbatas. Sampai kapan pun dimana pun ini pasti selalu jadi masalah. Maka peran daripada seorang Pimpinan dengan keterbatasan *resources* yang ada ini coba dioptimalkan. Agar apa? agar visi dan misi, tujuan organisasinya itu bisa dicapai. Tapi kalau misalkan untuk mencapai visi dan misi, tujuan organisasi SDM-nya harus banyak, anggaran harus berlimpah, sarana dan prasarana harus terpenuhi semua ya itu sulit. Di mana-mana semua pasti terbatas.

Mungkin itu Pimpinan jawaban dari saya.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Profesor.

Sebelum kita sudahi acaranya, kami memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan pesan-pesan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

Mohon ijin Pak, ada satu yang belum dijawab.

Jadi begini Bapak, restrukturisasi ini tentu tidak boleh sembarangan. Tentu dengan transformasi yang saya sampaikan bahwa fokus audit itu tidak hanya pada laporan keuangan tetapi pada kinerja, pada audit dengan tujuan tertentu. Apakah itu compliance, apakah itu investigative dan sebagainya. Pasti ini punya implikasi Pak, apakah sistem yang ada sekarang ini pembagian tugas yang ada dengan AKN 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu tepat atau tidak mungkin perlu diuji kembali dengan usulan yang ada seperti ini.

Tapi kalau misalkan yang ada ini berjalan apakah bisa, saya agak khawatir agak sulit ya Pak, kalau misalkan kita ngomong tematik, tematik inikan sudah lintas Pak. Kalau kita ngomong misalkan masalah kemiskinan tanggungjawab siapa, masalah pengangguran tanggungjawab siapa, masalah kepemudaan tanggungjawab siapa. Nah, ini pasti cross Pak.

Demikian Bapak, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Prof. silakan *closing statement* sekaligus *campaign* sebelum kita akhiri.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., M.M.):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Pimpinan yang saya hormati.

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan tentu saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Dan kalau misalkan tadi Tuhan mengijinkan, Bapak dan Ibu memberikan

kesempatan kepada saya, maka saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan terapkan apa yang sudah saya sampaikan dan saya berjanji kita akan menjadi mitra yang baik. Dengan cara apa? dengan cara meningkatkan konsultasi dan membuat *dashboard* dan lain sebagainya, sehingga BPK ini bisa menjadi pendorong, pengelolaan keuangan negara yang baik dan efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntable, sehingga tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

Demikian Bapak Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kita berikan applause.

#### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Dengan demikian selesai sudah paparan dari Bapak Profesor Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Untuk itu kami persilakan Bapak dengan hormat meninggalkan ruangan dan silakan untuk berjabat tangan sebelum kita akhiri. Rapat kita skors sampai Sholat Magrib dan selesai Sholat Isya Pukul 19.10 WIB.

#### **(RAPAT DISKORS)**

Skors saya cabut.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

*Om swasti astu,*  
*Namo budaya,*  
**Salam kebajikan.**

**Yang terhormat saudara Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu, M.Ec.**  
**Yang kami hormati juga ada dua lagi di belakang Bapak nanti, yaitu Ir. H. Tjatur Sapto Edi, M.T. dan saudara Ruslan Abdul Gani, S.E., MAK., Ak., CA.**

Dari ketiga nama tersebut Bapak mendapat nomor urut satu.

**Yang kami hormati juga dan kami banggakan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang telah hadir bersama kita,**  
**Hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat, daftar hadir Rapat Dengar Pendapat Umum ditandatangani oleh 19 orang dari 52 Anggota Komisi XI DPR RI yang terdiri atas 7 Fraksi dari 10 Fraksi, 1 orang ijin, sehingga ijinlah kami membuak Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI ini calon Anggota BPK RI dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **(RAPAT DIBUKA PUKUL ... WIB)**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada malam hari ini dalam rangka uji kepatutan dan uji kelayakan atau fit and propertest Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di mana uji kepatutan dan uji kelayakan bagi Calon Anggota BPK RI merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan menyebutkan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Di mana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK RI ini dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain menunggu diluar ruang rapat.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, yang terdiri atas:
  - a. 15 menit calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya.
  - b. 30 menit dalam sesi tanya jawab.

### **Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.**

Untuk menyingkat waktu, maka kami persilakan kepada Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu, M.Ec. untuk menyampaikan makalah dan visi dan misinya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. SAHALA BENNY PASARIBU, M.Ec.):**

Terima kasih.

### **Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya cintai dan muliakan.**

Saya berterima kasih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti fit and propertest ini. Dan saya berharap acara kita ini bisa berjalan dengan lancar.

### **Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Sebenarnya visi dan misi tertulis di sini ini sudah merupakan rangkuman dari apa yang saya pelajari dan informasi yang saya dapat dari dokumen-dokumen yang ada dan juga peraturan-peraturan, peraturan perundang-undangan yang mendasari pikiran-pikiran ini, landasan-landasan yang ada di dalam paper ini.

Nomor satu, yang kami mau sampaikan bahwa keberhasilan membangun bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bernegara adalah merupakan hasil kolaborasi dari seluruh lembaga negara tidak terkecuali Presiden, MPR, DPR, DPD,

BPK, MA, MK, dan seterusnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan negara ini tidak hanya satu lembaga negara yang perlu lebih menonjol daripada yang lain.

Kami melihat peranan BPK RI juga sama pentingnya di dalam mencapai tujuan bernegara terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, yang mau kita lihat kedepan adalah Indonesia yang maju, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana sudah dituangkan di dalam tujuan bernegara kita dan juga rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah. Yang kemudian di dalam RKP dan APBN yang tiap tahun. Khusus dalam periode ini RPJMN itu diisi dengan konsep Presiden tentang Nawacita. Dan di dalam RKP biasanya ada semacam masukan dari Musrenbang mulai dari desa sampai dengan kabupaten, provinsi dan nasional. Kemudian dari RKP itu dituangkan di dalam APBN dan kemudian kita mengatakan APBN itu adalah wujud pengelolaan keuangan negara.

BPK RI ini tugasnya tidak ada yang lain adalah untuk menjamin adanya pengelolaan keuangan negara dan tanggungjawab keuangan negara yang mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya ingin melihat bahwa tantangan utama bangsa saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing global.

Di sini saya melihat bahwa daya saing global ini sangat terkait dengan semangat dan jiwa kekeluargaan, kegotongroyongan. Ini menyangkut juga efisiensi dan produktifitas, keserakahan dan korupsi, perijinan dan good governance, kemampuan SDM dan Iptek kita, pemanfaatan sumber daya alam dan produk unggulan daerah, konsep hilirisasi dan industrialisasi.

Barangkali inilah menjadi tantangan kita untuk meningkatkan daya saing global ini termasuk diantaranya yang punya dampak langsung untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan harkat dan martabat rakyat. Di sini ada unsur-unsur pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pendidikan dan kesehatan.

Lalu disini kita sampaikan juga bahwa pada sasaran-sasaran pembangunan yang kemudian ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kita, termasuk ada 17 unsur SDG's yang kesemuanya ini adalah sudah diatur di dalam rencana pembangunan jangka menengah atau sekarang ini dengan Nawacita dengan 7 agenda prioritas pembangunan.

Saya ingin kembali mengatakan posisi dan peran strategis BPK RI itu adalah satu diantara lembaga negara yang juga ikut bertanggungjawab atas keberhasilan membawa bangsa ini maju dan membawa warganya, rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Sama dengan lembaga negara lainnya, sudah saya katakan tadi Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY dan seterusnya.

Oleh sebab itu, BPK sebenarnya tidak hanya melihat di hilir saja, tidak hanya melihat hanya pemeriksaan keuangan saja akan tetapi harus melihatnya dari hulu sampai hilir, mulai dari proses perencanaan pembangunannya termasuk bisnis proses di masing-masing kementerian dalam mewujudkan perencanaan itu. Baru kemudian dari sisi penerimaan dan belanja negara kita maupun mulai dari pusat sampai dengan daerah, termasuk diantaranya BUMN dan BUMD.

Saya kira ini peran strategis BPK yang tidak bisa kita melihat ini sebelah mata, begitu pentingnya BPK ini maka saya merasa terpanggil untuk hadir memberikan pikiran dan waktu, energi mengembangkan BPK ini supaya menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang mandiri, professional, kredible, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di berbagai negara ada kecenderungan bahwa BPK itu atau supreme audit, utority atau board. Ini bertransformasi mulai dari sebagai overside institusi yang melihat lebih banyak aspek keuangannya sampai pada masalah-masalah inside, yaitu mendalami masalah kebijakan dan masalah publik sampai kepada membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternative, masa depan, dan cara-cara kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Untuk itu, saya menyampaikan di sini visi dan misi, ada kurang lebih 5 misi saya, yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualitas, tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah korupsi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan kinerja khususnya termasuk domentasi menyangkut kebijakan dan masalah publik.
4. Meningkatkan monitoring dan efektifitas tindak lanjut rekomendasi BPK.
5. Meningkatkan hubungan kolaboratif antara BPK RI dengan DPR RI, DPD RI, lembaga negara lainnya, penegak hukum dan stakeholder.

Saya kira kondisi saat ini semua kita tahu BPK RI tentu telah berbuat banyak akan tetapi masih banyak juga yang mengkritisi, yang memberikan tanggapan terhadap beberapa kinerja dari BPK RI. Kita juga sering mendengar citra dari BPK RI Ini terutama ketika keluar WTP tapi masih ada yang OTT dan sebagainya itu. Barangkali ini semua harus kita dudukan pada proporsinya.

Saya kira BPK telah berbuat banyak tapi kita melihat masih banyak di sana-sini yang perlu kita perbaiki. Terutama di bidang kelembagaan, di bidang SDM, infrastruktur, dan teknologinya ini terutama bisnis process ini dan tehnologi ini saling terkait bagaimana supaya bisa lebih cepat, efisien dalam melaksanakan tugasnya, dan juga masalah pembiayaan.

Untuk itu, tantangannya juga adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan termasuk SDM mempermudah proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital 4.0 yang secure, karena sekarang ini dengan cyber security system bisa mengamankan teknologi ini akan tetapi tanpa security saya kira jangan coba-coba masuk ke revolusi industry 4,0 ini karena sangat berbahaya. Kenapa? Karena BPK ini memiliki segudang data, hampir isi perut di republik ini ada di BPK. Kalau sampai ini kena cyber itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu harus secure tidak semudah kita mengatakan harus menerapkan teknologi 4.0 ini.

Untuk itu, ada 3 strategi pokok yang tadi di sampaikan untuk mencapai itu:

1. Membangun sistem kepatuhan.
2. Melakukan pemeriksaan yang fokus pada pemeriksaan kinerja tentu kita melakukan pemeriksaan keuangan dan tujuan tertentu lainnya.
3. Mengembangkan kapabilitas internal.

Dalam strategi pertama ini dalam membangun sistem kepatuhan, *compliance* oleh audity kita akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap standart akuntansi dan pelaporan keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui latihan, konsultasi, dan sebagainya. Jangan sampai lembaga-lembaga negara dan semua lembaga yang diaudit oleh BPK merasa ketakutan atau takut kepada BPK tetapi BPK bisa lebih bersahabat, sehingga mengrah kepada pencegahan. Harus membuka diri untuk berdiskusi untuk melakukan *improvement* di sana-sini daripada

sekedar untuk menghukum. Jadi pelatihan dan konsultasi saya kira harus diperbanyak.

Nomor dua, mendorong para audit ini untuk meningkatkan penerapan teknologi digital terkini yang secure, mulai dari proses pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan, tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara ini sehingga bagi BPK akan lebih mudah untuk mengkroscek angka-angka, data atau informasi yang ada di masing-masing unit atau lembaga melalui teknologi digital tersebut. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara melalui rekomendasi yang konstruktif dan tindaklanjut yang efektif.

Keempat, mendorong peningkatan pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana korupsi. Nomor lima, meningkatkan kolaborasi dengan instansi berwenang. Enam, perbanyak ... (suara tidak jelas) Dan *expertice gathering*, ini saya kira penekanan kami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi tersebut. Jadi BPK harus lebih terbuka, lebih transparan terhadap media, *expertice*, public tentang hasil pemeriksaannya dan termasuk rekomendasi yang diberikan. Hanya dalam memberikan rekomendasi itu perlu kami catat itu tidak boleh dalam ruang tertutup. Rekomendasi itu bisa diajak lebih dahulu lembaga yang diaudit atau yang akan diberikan rekomendasi supaya sama-sama memahami sehingga nanti teknis pelaksanaannya akan lebih mudah dilakukan, baru kemudian akan kita monitor, kita awasi pelaksanaannya.

Selanjutnya melakukan rapat konsultatif secara priodik dengan lembaga perwakilan termasuk DPR RI. Nomor delapan, meningkatkan kordinasi dengan aparat penegak hukum atas temuan tindak pidana korupsi.

#### **KETUA RAPAT:**

Waktu tinggal 1 menit.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. SAHALA BENNY PASARIBU, M.Ec.):**

Oke baik, dengan juga dengan strategi kedua melakukan pemeriksaan yang difokuskan pada pemeriksaan kinerja ada kurang lebih 6 point disini, yang keenam itu penting sekali kita akan membentuk satuan kerja baru sebagai pusat analisis kebijakan publik yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan *expertice*. Strategi ketiga adalah mengembangkan kapabilitas internal, saya kira ini mulai dari kualitas jumlah auditor, tehnologi yang dipakai, komptensi SDM-nya, dan seterusnya.

Maka kembali kami sampaikan sebagai kata penutup tiada lain yang bisa kami sampaikan bahwa BPK ini berpedan strategis dan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan bangsa ini, negara ini memberikan kesejahteraan kepada warganya. Sama seperti lembaga tinggi negara lainnya tinggal bagaimana BPK ini menjadi lembaga yang kredible dan punya kompetensi dan transparansi.

Saya kira itu yang menjadi point-point yang kami bisa sampaikan.

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kita telah mendengarkan paparan tadi dari Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu, M.Ec. Langsung saja kita persilakan kepada Anggota Komisi XI DPR RI

yang akan memberikan pertanyaan. Di meja kami sudah ada beberapa penanya, kita mulai dari sisi sebelah kanan.

Silakan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu yang saya hormati.**

Di era digitalisasi industry 4.0 ini Bapak menekankan bahwa optimalisasi e-audit yang dilengkapi dengan cyber operation security system. Yang ingin saya tanyakan apakah dengan implementasi teknologi 4.0 ini kualitas pemeriksaan dari BPK atas opini dengan pemeriksaan menggunakan metode sampling dapat menekan kerugian negara yang selama ini menjadi temuan dari BPK itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita pindah ke sisi kiri ada Bapak Prof. Hendrawan silakan Pak.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Benny Pasaribu.**

Saya ingin mengapresiasi karena papernya sangat lengkap dari landasan ideologis sampai hal-hal yang sistemik. Jadi ini luar biasa, ini satu presentasi yang komprehensif dari hulu sampai hilir dalam persoalan keuangan negara.

Kami juga mengapresiasi karena Bapak Benny Pasaribu dulu Ketua Komisi XI DPR RI, dulu namanya Komisi IX DPR RI, pernah menjadi Ketua Panitia Anggaran dan jadi itu sebabnya pengetahuannya dan pengalamannya saya kira sangat memadai. Hanya saya ingin tanya ini, antara aktor dengan structure, Bapak Benny mengatakan kita harus menjadikan BPK sentral .... Tentu jawaban yang paling mudah apabila aktornya dan sistemnya sama-sama berkualitas hebat. Tapi persoalannya menurut Bapak Benny inikan ayam telur, tapi kalau diharuskan untuk memilih dan waktu yang tersedia bagi kita tidak banyak, apalagi masa jabatan BPK inikan 5 tahun. Itu apa prioritas yang akan dilakukan.

Itu saja terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Indah Kurnia kami persilakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,  
Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu yang saya hormati.**



Terima kasih atas pemaparannya Pak, dan kami juga mengapresiasi karena CV Bapak ini dan Bapak juga pernah ada disini. Dan kita semua berharap nanti kalau Tuhan iijinkan dan mayoritas dari kami memilih, maka Bapak akan bisa menerapkan ide dan gagasan sesuai dengan visi dan misi yang Bapak sampaikan pada pemaparan pada malam hari ini.

Kita ketahui bahwa BPK adalah bagian dari sistem pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dan kita sepakat bahwa pemeriksaan BPK kan bukan hanya tentang governance dalam Pemerintahan, tapi lebih daripada itu kita berharap bahwa hasil pemeriksaan BPK itu bisa menjadi wujud atau upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa ini sesuai dengan tujuan kita di dalam bernegara.

Dalam pemapara Bapak juga Bapak mengidentifikasi kondisi BPK saat ini yang bukan hanya keterbatasan anggaran tetapi juga SDM, terus kemudian juga anggaran cenderung menurun, kemudian e-audit yang juga belum berjalan maksimal dan lain sebagainya.

Nah, pertanyaan saya jika Bapak Benny berhasil masuk di dalam salah satu dari 9 Anggota BPK, kira-kira segala upaya atau strategi yang telah Bapak paparkan tadi termasuk diantaranya adalah penggunaan metode ... (suara tidak jelas) Yang saat ini mungkin masih berada di tahap forside, belum forside ya masih overside bahkan ya. Maka kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan BPK seperti yang Bapak dan kami semua idamkan.

Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Erik silakan.

#### **F-P. HANURA (ERIK ADTRADA RITONGA):**

**Terima kasih Pimpinan.**

Yang saya hormati saya tidak manggil Bapak dengan Sahala Benny Pasaribu, tetapi saya panggil Abang saja, karena ini orang Medan.

#### **Horas Bang.**

Di sini saya singkag saja menanyakan kepada Abang, seandainya Abang terpilih menjadi Anggota BPK, tentu Abang harus melepaskan diri daripada hiruk pikuk politik. Sekarang ini Abang mencalonkan diri menjadi Anggota BPK yang memilih Abang ini adalah orang politik semua. Di Komisi XI DPR RI ini tidak ada orang yang tidak orang politik, karena bisa masuk ke DPR RI ini tentu dari jalur politik, dari DPD ada juga ya.

Yang ingin saya tanyakan Abang, apakah bisa Abang nanti memimpin lembaga BPK yang paling disegani mungkin di Indonesia karena yang Abang pimpin ini adalah lembaga yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini, untuk melepaskan diri Abang daripada yang namanya politik. Karena kalau tidak bisa melepaskan itu saya yakin juga mustahil BPK ini berjalannya pasti begini.

Mungkin sekian.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kembali.  
Ibu Elviana silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Benny Pasaribu.**

Bapak itu Sahala itu tidak top, Benny Pasaribu saya sering mendengar nama Bapak, di PDIP kan sebelumnya.

Pak Benny, makalah Bapak bagus tidak ringan banget dan mudah untuk dipahami. Saya langsung saja masuk ke visi dan misi Bapak, akan meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan. Di halaman berikutnya Bapak juga mengakui jumlah auditornya terbatas. Menarik tadi Bapak bilang revolusi industry 4.0 itu belum bisa diterapkan hal audit mengaudit, karena terancam serangan cyber. Lalu apa yang dilakukan gitu Pak, saya belum mendengar secara jelas tadi nambah auditor dalam waktu 5 tahun kedepan saya pikir juga tidak, toh anggaran BPK semakin lama semakin turun. Bukan kami yang menurunkan, memang disetting oleh disananya, disini Sekjennya juga tidak minta tambahan, anggarannya turun terus, jumlah yang diaudit juga turun terus. Nah, apa yang akan Bapak lakukan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu, ada 5 pertanyaan tadi kelihatannya gampang, mudah-mudahan jawabannya juga mudah.  
Kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. SAHALA BENNY PASARIBU, M.Ec.):**

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Kelihatannya saja gampang ini Pak, pertanyaan ini sangat dan berbobot dan memang Komisi ini dari dulu saya amati memang begitu. Seolah-olah simple akan tetapi sebenarnya isinya dalam dan luas, maka saya sendiri butuh waktu banyak untuk menjelaskan ini. Tapi karena terbatas waktu kita barangkali saya summary-kan saja hal-hal yang penting.

Jadi intinya marilah BPK ini kita perhatikan betul, kita jaga betul, lembaga ini sangat penting dan kenapa saya ikut-ikutan sekarang ke dalam ini karena saya ingin membangun lebih dalam, karena begitu pentingnya bagi bangsa dan negara ini. Ini

satu-satunya lembaga yang diwajibkan untuk mengetahui hampir isi perutnya semua lembaga negara.

Nah, kalau sudah diketahui data basenya itu segudang ini. Kalau itu dipermainkan sembarangan apalagi disimpan juga sembaran menurut saya ini, negara kita ini cepat ketahuan isi perutnya di dunia luar. Dan BPK ini apa saja yang terjadi bahwa ada penipuan, ada korupsi, ada penyalahgunaan, ada markup, ada fiktif, terus ada rencana program, mau kemana bangsa ini bergerak, kira-kira alokasi anggaran kita ini kemana, semua itu ada di BPK.

Oleh sebab itu, saya kira BPK sendiri ini harus kita jaga, maka saya katakan kalau kita mau tidak mau Ibu, khususnya Ibu Elviana mau tidak mau kita harus masuk ke teknologi 4.0. Yang saya bawa konsen disini adalah jangan sembarang masuk kesitu, jangan setengah-setengah harus berikut security systemnya selalu diikuti. Kalau hanya masuk membangun digitalisasi saja itu banyak orang yang ahli, tapi untuk security systemnya saya kira untung ada BSSN sekarang ini, saya kira semakin canggih untuk menjaga jangan sampai ada hacking oleh kekuatan cyber ini.

Teknologi sekarang ini terus terang saja Bapak dan Ibu, kalau kita pelajari pasti Profesor Hendrawan lebih paham dari saya. Ini hampir semua teknologi yang misalkan katanya dari Cina, apa saja yang kita pakai mau HP, mau apa ini, masuk ke tempat tidur kita sudah bisa dia lihat semua apa, CCTV apa lagi. Itu kita pasang diruangan kita tapi dia bisa lihat dari mana-mana, tapi kalau kita buat security system kita dengan bagus mudah-mudahan hanya kepentingan kita sendiri yang bisa kita lihat disitu, orang lain tidak bisa lihat.

Nah, yang kedua mainset dari Anggota atau SDM yang ada di BPK ini masih mainset untuk sebagai auditor. Ya mungkin setingkat lebih sedikit dari Kantor Akuntan Publik, mungkin lebih baik sedikit dari situ, tapi menurut saya itu kurang. Kita harus memiliki visi kenegaraan, kebangsaan, kerakyatan, yang menurut saya tidak cukup hanya pada menyatakan itu WTP akan tetapi harus lanjut pada apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan warga kita, apakah itu sudah dijawab oleh Pemerintah atau lembaga yang ada ini. Dan bagaimana proses menjawab itu, apakah itu dilakukan sudah paling hemat, paling efisien, dengan manfaat atau *outcome* yang bisa dirasakan oleh rakyat.

Saya takutnya kita keluarkan bertriliun-triliun dan ribuan triliun begitu itu, tapi masyarakat itu merasa mana. Misalnya ini soal pupuk saja, saya condong bicara pertanian subsidiya puluhan bahkan bisa ratusan triliun. Tapi kalau saya ke Kerawang selalu saja mana pupuknya Pak. Jangan dulu ke Nias, jangan dulu ke Papua, pupuknya mana Pak, padahal subsidi pupuk itu sudah jelas-jelas ada. belum lagi kita bicara kualitas pupuknya, pupuknya saja belum nyampe. Kalau itu sudah nyampe baru kita bicara kualitas pupuknya, karena pupuk di kita saja bisa banyak manfaatnya daripada pupuk banyak berkarung-karung tapi manfaatnya tidak ada.

Nah, ini menurut saya harus dilihat dalam kaitan itu efisiensi, efektifitas, dan manfaatnya. Nah, auditor kita ini harus diequip dengan kemampuan seperti itu. Dan inilah yang saya maksud dengan, oke kita masuk ke pemeriksaan kinerja dan saya akan keras disana, maka saya sebut perlu satu lembaga baru yang disebut Pusat Analisis Kebijakan yang nanti dibantu oleh beberapa perguruan tinggi, membuat analisis-analisis ekonomi. Jangan-jangan ad acara untuk membuat perijinan lebih mudah, jangan-jangan ada cara membuat kebijakan atau alternative kebijakan yang lebih baik dengan biaya yang lebih sedikit, yang lebih hemat.

Saya kira ini pusat yang menjadi tonjolan kami, maka mau tidak mau saya kira termasuk SDM yang ada di BPKP ini yang bagus-bagus kalau perlu direkrut akomodasi di BPK. Dari Kantor Akuntan Publik itu kalau ada jiwa kebangsaan dan

kenegaraannya tidak salah juga kita pakai mereka untuk melakukan ini, tapi kita harus ada learning proses, harus ada transfer of technology dari kita kepada mereka, tidak cukup kita hanya di BPK saja tetapi yang ada potensi di luar sana yang mampu melakukan audit kinerja dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang secara efektif bisa kalau dilaksanakan bisa menghemat, bisa mengarahkan kebijakan ini lebih tepat sasaran.

Saya kira ini harus dilakukan oleh BPK, maka kalau saya terpilih, dan saya percaya Bapak dan Ibu akan memberikan kepada saya sebagai orang yang boleh nanti dicek masalah integritas, masalah pengabdian, masalah kehidupan saya. Saya kira itu entah kenapa panggilan untuk mengurus bangsa ini lebih tinggi daripada mengurus pribadi. Kebetulan saya punya satu anak saja, dan itu sudah besar dan sudah bertanggungjawab sendiri.

Oleh sebab itu, saya merasa saya akan dedikasikan dengan usia sekarang ini menjelang tua ini untuk memberikan semacam pengalaman hikmat, guidance, hikmat kebijaksanaan ini saya kira penting, apa yang saya pelajari di Komisi ini dulu, apa yang saya pelajari dari kawan-kawan lintas partai, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana menendang bola ini biar bisa sampai ke gawang, bukan sekedar sibuk nendang sana-sini, tapi bagaimana saya kira itu tugas kita sebagai Pimpinan, bagaimana selalu bola itu bisa masuk ke gawang.

Saya kira itu yang pengalaman apalagi ada pengalaman birokrasi yang sa punya dari Pegawai Negeri rendah sampai Deputi Menteri, saya kira pengalaman tekhokrasi ini juga bagaimana menggiring bola ini bisa sampai ketujuan saya kira itu juga pengalaman yang saya pikir saya mohon dihargai.

Nah, saya kembali lagi terima kasih Prof. Hendrawan, Ibu Tutik, Ibu Indah Kurnia, Bapak Erik, dan Ibu Elviana, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Sekali lagi saya pasti tidak akan habis-habisnya belajar, kalau politik ini tidak pernah habis belajar. Kita ketemu ada saja pikiran-pikiran yang baru, dan inilah learning organization atau learning proses itu. Kita menuju perubahan-perubahan dan kita memang hidup kita ini lebih sehat kita itu kalau bisa berubah menuju yang lebih baik. Itu saja sebenarnya yang kita dan saya juga harapkan. Oleh sebab itu, Pimpinan saya hanya dengan waktu yang terbatas ini saya hanya bisa sampaikan saya akan dedikasikan apa yang saya punyai, pengalaman saya, pendidikan saya untuk membesarkan, memperkuat, menjaga kredibilitas daripada BPK ini.

Saya juga minta agar BPK ini nanti yang 9 orang itu sebaiknya itu kolegal dan kolektif dalam mengambil keputusan daripada sendiri-sendiri. Saya kira lebih baik saya mohon nanti ketentuannya itu supaya ini selalu kolegal kolektif, kalau perlu menentukan WTP pun itu ya di plenokan diantara 9 orang itu daripada sendiri-sendiri.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Sahala Benny Pasaribu atas jawabannya yang lugas. Dan kami masih memberikan waktu maksimal 1 menit untuk Bapak menyampaikan *closing statement* sekaligus mau campaign juga boleh Pak.

Silakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. SAHALA BENNY PASARIBU, M.Ec.):**

**Bapak dan Ibu di Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya sangat menghargai apa lagi waktu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu juga telah memiliki dedikasi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Saya tahu bagaimana susahanya untuk bisa terpilih untuk menjadi Anggota Dewan, dan saya tahu persis bagaimana menjaga citra Dewan ini dan saya tahu persis bagaimana susahanya untuk membagi waktu. Kalau saya disini dulu apalagi rekab itu bisa sampai Subuh berulang-ulang bisa 3 hari tidak tidur, perbankan dulu itu BLBI dan sebagainya. Itu mengatur waktu setengah mati apalagi saya merangkap sebagai Ketua Banggar dan Ketua Komisi ini, belum lagi Pansus-Pansus dan perundang-undangan. Saya paham betul Bapak dan Ibu, jadi kalau tidak hadir juga kawan-kawan yang lain, di Paripurna itu kosong itu saya paham, tidur ngantuk sudahlah, saya sudah rasakan itu semua.

Jadi saya juga akhirnya saya pikir ya sudahlah, masa tua saya ini, saya ingin tetap mengabdikan untuk bangsa dan negara ini jika Bapak dan Ibu mengizinkan, saya akan lakukan yang terbaik.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Kita berikan *applause*.

#### **Saudara-saudara sekalian.**

Kita telah sampai pada akhir paparan kita, kami atas nama Pimpinan dan Anggota mengucapkan terima kasih Bapak Dr. Ir. Sahala Benny Pasaribu, M.Ec. atas kehadirannya. Dengan demikian kami persilakan dengan hormat Bapak meninggalkan ruang sidang Komisi XI DPR RI. Bisa berjabat tangan dulu Pak, sebelum keluar ruangan.

Bapak dan Ibu sekalian, rapat kita skors 5-6 menit.

#### **(RAPAT DISKORS)**

Skors saya cabut.

Telah hadir Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T., kalau tidak salah Ketua Fraksi saya dulu.

Kita masuk ke sesi kedua, yaitu mendengarkan paparan visi dan misi, serta rencana kerja BPK jika Bapak Tjatur diberikan amanah. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok paparannya dengan Tata Tertib, maksimal waktu 45 menit, kemudian 15 menit paparan dan 30 menit masuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ini bisa kita dapat semua informasi yang disampaikan.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Tjatur Sapto Edy untuk menyampaikan pokok-pokok pemaparannya.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua,**

*Om swasti astu,*

*Namo budaya,*

**Salam kebajikan.**

**yang terhormat Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,  
yang terhormat saudara-saudara sekalian para hadirin.**

Saya adalah Calon Anggota BPK RI, nama Tjatur Sapto Edy, Anggota DPR R dari tahun 2004 hingga saat ini. Saya berterima kasih sudah diundang oleh Anggota dan Pimpinan Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan suatu gagasan besar menurut saya, dengan visi yang kami beri judul "BPK untuk rakyat". Apa BPK untuk rakyat? Rakyat yang saya maksud di sini terutama diwakili oleh lembaga yang kita cintai adalah DPR RI. Kita ke misi, saya mengajak kita semua membuka era baru, yaitu era baru sinergitas DPR RI dan BPK RI, terutama dalam mewujudkan optimasi penerimaan negara, efisiensi belanja negara, maksimasi manfaat belanja negara, dan minimasi praktek korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Mengapa harus bersinergi? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E dan F pesannya sangat kuat disitu, bahwa meskipun disitu disebutkan mandiri tapi sangat kuat bahwa BPK itu memberikan support kepada DPR RI. Yang pertama karena ibunya BPK itu adalah DPR RI, yang melahirkan BPK baik Undang-Undanganya, maupun pemilihannya di DPR RI. Di luar negeri di dunia ini ada 3 BPK, di dalam Pemerintahan, di dalam DPR RI, dan mandiri. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mengapa sinergitas itu penting? selama ini BPK ada bisnis masing-masing, DPR RI ada bisnisnya masing-masing, bekerja sendiri-sendiri. Dan saya melihat harus saling menguatkan, untuk apa? untuk dalam 4 hal tadi, dari penerimaan, pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara.

Untuk bisa mendapatkan atau mewujudkan DPR RI dan BPK yang kuat kedepan, maka saya ada 3 program utama, yaitu transformasi BPK, reorientasi, dan modernisasi. Kita melihat sekarang BPK selama ini dalam pandangan saya, kita kan setiap tahun menerima 2 kali ikhtisar hasil pemeriksaan. Itu asas konvensionalitasnya sangat kental, yaitu proses pengumpulan dan pengujian buktinya itu berdasarkan kesesuaian fakta dan kemudian dinilai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada gap, kemudian di analisis penyebab kenapa dan terus kemudian direkomendasikan.

Nah, saya punya gagasan bahwa kedepan BPK harus mengubah itu, mengubah konvensionalitasnya itu ditransformasikan menjadi pemeriksaan yang tidak hanya fokus kepada kriteria, pragmanted, dan berorientasi pada masa lalu saja, tetapi harus komprehensif, holistic, relevan, dengan kebutuhan dan orientasi kepada kejadian di masa lalu juga, sekarang dan yang akan datang.

Pemeriksaannya harus komprehensif, yaitu menuntut auditor untuk memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor penting yang relevan terkait dengan lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh atau menjadi pemicu terhadap terjadinya gap antara kondisi dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian pemeriksaannya harus holistic, yaitu pemeriksaan yang end to end dari suatu proses kegiatan dan program untuk dapat memahami keterkaitan masalah, rekomendasi-rekomendasi, penanganan di rancang untuk dapat mengatasi permasalahan secara tuntas. Jadi sampai ke akar-akarnya, sampai tidak hanya fokus kepada kejadian itu saja.

Kemudian reorientasi fokus pemeriksaan, selama ini semester I kemudian baru masuk, kemudian 3 bulan dilaporkan kepada DPR RI. menurut hemat saya harus ada reorientasi masuk tidak hanya diakhir akan tetapi bisa masuk diawal, ditengah, karena waktunya yang menentukan itu terserah BPK, sehingga lebih up to date, lebih bisa mengawal proses entitas pemeriksaan itu lebih dini.

Maka dalam konteks pemeriksaan ini atas pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan holistic memungkinkan BPK mengemas informasi hasil pemeriksaan

berdasarkan isu per sektor program dan tingkat Pemerintahan dan klasifikasi lainnya sehingga tindakan penanganan lainnya atas suatu isu permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terkoordinasi dan terintegrasi.

Yang terakhir adalah modernisasi pemeriksaan, saya mendorong nanti BPK untuk membangun dan mengembangkan sistem inovasi teknologi informasi yang modern dalam pemeriksaan yang terintegrasi dalam BPK dan menjangkau entitas pemeriksaan. Untuk objek-objek pemeriksaan strategis harus dilakukan secara real time khususnya yang sangat strategis bagi penerimaan maupun belanja negara yang strategis.

Dan yang paling menarik dari makalah saya ini adalah output dari itu modernisasi itu saya membayangkan BPK dan DPR RI akan membangun suatu web services, ada BPK membangun DPR RI menjemput, DPR RI mengambil atau BPK mendorong kepada DPR RI. Dan ini haknya ada di Komisi XI DPR RI.

Membangun web services BPK dan DPR RI untuk menyajikan laporan hasil pemeriksaan terbaru tidak hanya per semester tapi yang full, secara komprehensif, holistic dan up to date untuk memperkuat kinerja DPR RI terutama fungsi pengawasan. Dan itu dilakukan didorong kepada DPR RI awal masa sidang.

Bapak dan Ibu, pasti berpengalaman DPR RI ini berpengalaman karena DPR RI itu yang paling kelemahan itu adalah big data dan informasi. Setiap kita rapat dengan mitra kerja data ini seolah-olah hanya dari mitra kerja saja. Saya di Komisi VII DPR RI data migas itu hanya dari Kementerian ESDM saja tidak ada pembanding. Nah, kalau ada web services dari BPK ini, bisa masuk di awal, di tengah, kemudian di setiap awal masa sidang didorong ke DPR RI itu ada dua sistem, pakai CSP atau ... (suara tidak jelas) Itu didorong ke DPR RI, di DPR RI itu punya data pembanding dengan Pemerintah, DPR RI nanti harus kuat, karena nanti Ketua DPR RI nya sahabat kita. sehingga kemampuan DPR RI dan BPK RI itu mengawal APBN, mengawal pengelolaan keuangan negara ini bisa lebih kuat di masa yang akan datang. Pesan Pasal 23 E dan F ini sangat jelas support disitu.

### **Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.**

Output dari web services adalah menguatkan kinerja pengawasan DPR RI. Peningkatan kinerja pengawasan DPR RI akan menjadi lebih efektif karena didasarkan pada data informasi yang handal sehingga DPR RI dapat mengakses objek pemeriksaan BPK seluruh Indonesia dan haknya adalah di Komisi XI DPR RI. Di Komisi XI DPR RI itu menjadi hak, jadi senternya, jadi gerbangnya informasi yang up to date untuk mengawasi objek pemeriksaan seluruh Indonesia, terutama sejauh koridor perundang-undangan yang berlaku.

Jadi seluruh Komisi nanti haknya di Komisi berdasarkan data dari BPK. Kesimpulan dari paparan saya adalah transformasi dan orientasi serta modernisasi pemeriksaan BPK akan menguatkan kinerja BPK itu sendiri. Dan terlebih lagi adalah fungsi pengawasan DPR RI, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua,**  
*Om santi-santi om,*  
*Namo budaya,*

**Salam kebajikan.**

**KETUA RAPAT:**

Baik, luar biasa Bapak Tjatur, tepat 15 menit paparannya, tidak kurang dan tidak lebih.

Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di meja kami sudah ada dari sebelah kiri dan kanan kita mulai dari Bapak Prof. Hendrawan untuk memulai yang pertama.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

**Pimpinan dan rekan-rekan Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Sahabat saya Bapak Tjatur Sapto Edy.**

Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi karena sangat sistematis. Dan figure Bapak Tjatur yang saya kenal sejak bersama-sama di Pansus Century dulu lugas, kalau orang Jawa bilang ceto. Apa yang disampaikan jelas, basis argumentasinya kuat. Jadi tidak heran Pimpinan dan teman-teman kalau Bapak Tjatur juga lulusan dari Perguruan Tinggi yang ternama. S1 dan S2 dari Institute Teknologi Bandung.

Bapak Tjatur ini ada satu masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Tjatur. Dan sebenarnya pertanyaan saya dua, yang pertama kan kita sudah punya BAKN, BAKN ini dalam perjalanannya, dalam Undang-Undang MD3 yang pertama nomor 17 Tahun 2014 itu ditiadakan, kemudian baru dihidupkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang MD3.

Jadi dengan pembubaran kemudian dihidupkan lagi inikan sebenarnya DPR RI sendiri bingung melakukan positioning BPK. Jadi kalau menurut Bapak Tjatur, BAKN ini mau diposisikan seperti apa, karena tadi Bapak Tjatur selalu menyebut muaranya selalu Komisi XI DPR RI. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini yang tadi saya sebut masalah untuk melakukan perubahan inikan aktornya dulu yang dibenahi atau strukturnya. Memang jawaban yang paling atau kombinasi keduanya. Tetapi kan masa kerja kita, masa pengabdian kita inikan terbatas. Itu sebabnya prioritas yang akan diambil itu apa? pembenahan aktor atau pembenahan struktur. Saya kira kita harus membuat atau menentukan titik dobraknya.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Luar biasa pertanyaan Bapak Profesor.

Baik, kita pindah ke sisi kanan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Tjatur Sapto Edy yang sangat saya hormati.**



Tadi presentasi Bapak sungguh lugas, sungguh tegas dan jelas Pak. Jadi di era digitalisasi industry 4.0 ini dalam presentasi Bapak, Bapak ingin memodernisasi pemeriksaan dengan teknologi informasi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana nanti Bapak mengimplementasikan teknologi 4.0 ini sebagai e-audit dalam mengintegrasikan secara konkrit dalam tugas dan kewenangan Bapak melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara kami dapat informasi dari semua yang mengikuti fit and proptest ini bahwa pemeriksaan masih didominasi oleh pemeriksaan keuangan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita pindah ke sisi kiri kembali Ibu Elviana, kami persilakan.  
Maaf, Bapak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,  
Bapak Tjatur yang saya hormati.**

Salah satu pandangan yang perlu kita berikan apresiasi itu adalah bagaimana BPK dengan DPR RI yang Bapak tadi ungkapkan. Saya kira ini hal yang menarik sekali Pak Tjatur dalam kaitan kita bagaimana mengefektifkan pemanfaatan penggunaan anggaran APBN ini.

Kita tahu di DPR RI ini memang sudah tidak banyak, tidak membahas lagi satuan 3, sehingga kita tidak dari pengamatan kita ada program-program sebenarnya tumpang tindih dijabarkan visi Pemerintah itu. Untuk menyelesaikan satu hal itu biasaya berbagai lembaga itu membiayai anggaran yang sama. Dengan melibatkan DPR RI saya kira ini asal waktunya mungkin diperbanyak untuk interaksi saya kira BPK ini bisa efektif untuk melihat sejauhmana pemanfaatan anggaran itu tumpang tindih atau double atau tidak.

Oleh sebab itu, langkah-langkah konkrit yang mungkin bisa dijabarkan dalam kaitan ini kami ingin mendapatkan satu penegasan yang tegas saya kira, apa sebentar regulasi yang harus kita perbaiki atau melalui mekanisme apa yang harus dimuat ataupun konsekuensinya terkait dengan anggaran. Kalau mitra-mitra kami disini kan banyak seperti melakukan FGD, kalau BPK ini bagaimana. Untuk itu, saya minta jawaban yang tegas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Amirul Tamim.  
Kita lanjut ke sisi kanan Ibu Elviana.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T. yang juga saya hormati.**

Bapak Tjatur, ada harapan baru daripada Anggota Dewan kalau teman-teman DPR RI terpilih kesana, karena seperti yang teman Fraksi saya bilang hak pengawasan DPR RI itu nyaris tidak ada lagi, karena tidak ada lagi yang dibuka disini apalagi yang kita awasi. Kita tidak tahu sebaran anggaran di Dirjen Perbendaharaan misalnya, Dirjen Pajak mereka memiliki komputer berapa unit kita tidak tahu.

Namun, problem yang ada di BPK dari tahun ke tahun tidak pernah diperbaiki auditornya kurang, hasil audit hanya berupa administrasi. Terus yang dikejar hanya seakan-akan BPK itu ada hanya untuk mengeluarkan sertifikat WTP. Dan WTP itu kalau Kabupaten kalau dia sudah dapat WTP itu ada sekitar 6 item anggaran yang bisa masuk ke daerahnya. Kalau dia tidak WTP itu terhambat, jadi begitu pentingnya sampai semacam Diklat, semacam Bimbel para Bupati itu menyewa BPK ke daerahnya sehingga opininya WTP. Nah, dalam posisi seperti itu ringkasnya apa yang akan Bapak lakukan jika sekiranya mayoritas dari kami memilih Bapak Tjatur.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terakhir Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

**Yang saya hormati Bapak Tjatur Sapto Edy.**

Terima kasih untuk pemaparannya tadi dan saya senang dengan materi yang bersahaja tetapi isinya padat. Pada setiap halaman saya baca simple dan saya baca dihalaman pertama ini untuk misi khususnya, cara baru sinergitas antara DPR RI dan BPK RI untuk mewujudkan optimalisasi APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kita tahu bahwa BPK ini adalah lembaga yang sangat strategis, kita berharap dia bukan hanya transparan, akuntable, tapi dia juga independent. Untuk akuntable transparan, professional dan semuanya itu pasti BPK bisa membuktikannya, tapi untuk independent Pak. Kita tahu bahwa untuk masalah anggaran dan SDM itu menjadi salah satu tantangan bagi BPK. Dan selama ini BPK tidak bisa mewujudkan secara independent, karena anggaran dari Kementerian Keuangan dan untuk SDM itu dari PAN RB.

Dan kemudian tadi Bapak Elviana sempat menyinggung masalah WTP, jika Tuhan mengijinkan Insya Allah dan kami semua mayoritas memilih Bapak Tjatur. Apa yang bisa Bapak lakukan disana untuk mewujudkan independensi tadi sekaligus bisa mengkorelasi positif dan aktif kan arapat predikat WTP yang selama ini hanya terkesan sebagai yuvoria, ceremonial, dan untuk gagah-gagahan saja menjadi bukan hanya sekedar predikat atau opini tetapi benar-benar terwujud untuk meningkatkan

kesejahteraan. Jadi tidak ada lagi istilahnya WTP, ...(suara tidak jelas) Itu tidak ada lagi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terakhir Bapak Bertu Merlas, kami persilakan.

**F-PD (BERTU MERLAS):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Tjatur, mungkin pertanyaan saya agak sedikit melenceng dari paparan Bapak. Jadi saya ada cerita ini Bapak Tjatur, ada satu daerah yang APBD besar, DAU-nya besar, BPH Migasnya besar, namun dia WTP itu sudah puluhan tahun, tapi penduduknya terus saja tambah miskin saja. Ini pasti ada sesuatu yang salah dengan daerah tersebut.

Yang ingin saya tanyakan Pak, ini ada kriteria yang salah mungkin dari BPK untuk menilai opini dari kabupaten tersebut. Saya ingin Bapak memberikan penjelasan singkat kepada saya, kriteria apa yang akan Bapak tambahkan dalam memberikan opini pada suatu daerah, sehingga mencerminkan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, sudah ada 6 penanya.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, PSI.):**

Tambah Pimpinan, sebentar saja.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Siti.

**F-PD (SITI MUFATTAHAH, PSI.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Anggota serta Bapak Tjatur.**

Bapak Tjatur hari ini sebagai salah satu kandidat Pimpinan BPK. Bapak, kalau dilihat dari namanya Tjatur, artinya kalau catur itu dalam bayangan saya itu strategi. Artinya, Bapak pasti mempunyai strategi yang pasti jitu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di BPK. Salah satu masalah yang sangat saya inginkan Bapak untuk mempunyai strategi jitu adalah adanya kasus temuan-temuan yang tidak ditindaklanjuti.

Nah, oleh karena itu kira-kira strategi khusus apa yang tidak pernah dilakukan sehingga yang masih tertimbun saat ini, masalah yang belum terselesaikan saat ini, itu bisa menjadi terselesaikan dengan strategi Bapak. Kira-kira apa yang bisa Bapak

berikan kepada kami agar kami percaya dan yakin bahwa Bapak pasti bisa melakukan nanti seandainya Bapak dipercaya untuk menjadi Pimpinan BPK.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

7 pertanyaan Bapak Tjatur Sapto Edy, kami persilakan untuk menjawab secara ringkas dan juga secara lugas dan jelas. Waktu masih 20 menit silakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

#### **Bapak-bapak dan Ibu Anggota yang terhormat.**

Pertanyaannya sangat menarik dan terima kasih sekali sehingga saya bisa mengelaborasi lebih lanjut.

Dulu saya salah satu yang penggagas BAKN itu Pak, jadi ada Baleg, ada Banggar, ada BAKN. Karena fungsi DPR RI itu 3 plus 2, itu memang untuk memberikan penguatan kepada DPR RI dalam menindaklanjuti pengawasannya. Jadi memang mau tidak mau harus 2 itu, harus 2 double track, strukturnya harus ada, kemudian aktornya juga mempunyai kemauan. Kalau orang DPR RI itu semuanya mampu tapi belum tentu semua mau Pak, karena banyak kesibukan masing-masing di DPR RI, prioritasnya macam-macam.

Jadi saya tidak setuju kalau BAKN ini dibubarkan, dia harus di-*empowering* sebetulnya. Dan *counterpart*-nya BPK harusnya auditor BPK. Jadi kalau Komisi XI DPR RI dengan Anggota BPK, BAKN dengan auditor BPK. Saya membayangkan begini Prof. itu kalau dalam sistem IT itu misalnya BPK ada 20 direktori, itu 3 direktorinya harus untuk DPR RI, sehingga BAKN itulah nanti yang linkange-nya kesitu dengan tentunya kalau untuk Anggota itu dengan Komisi XI DPR RI, tetapi tetap portalnya di Komisi XI DPR RI.

Kenapa begitu? karena suka tidak suka itu Pasal 23E itu jelas menurut saya, jelas pesannya bahwa BPK itu anaknya DPR RI, supporting ke DPR RI BPK kita agak ke Canada-Canada, ke Amerika-Amerika-an, tidak melekat ke DPR RI, mandiri akan tetapi jelas disitu supportnya DPR RI karena yang memilih DPR RI, laporan utamanya kepada DPR RI. Sekarang ini sama-sama bekerja akan tetapi tidak bekerja sama. Nah, kedepan kalau BPK mau kuat, DPR RI mau kuat itu harus sinergi.

Kemudian Ibu Tutik, teknologi informasi sekarang itu suatu keniscayaan. Saya sebentar lagi, kalau di Komisi VII DPR RI sekarang sudah mulai bisa mengetahui lifting minyak di seluruh Indonesia. Saya punya harapan itu kalau dengan BPK itu, itu real time bukan hanya itu. Seluruh Indonesia entitas pemeriksaan itu ada di Komisi XI DPR RI, ada suatu sedikit di ruang Pimpinan atau apa disitu se-Indonesia itu. Tapi yang namanya real time itu tergantung objeknya, kalau lifting migas real timenya itu harian, tergantung entitasnya itu masing-masing yang dinamakan konsep real time itu.

Dengan di situ kita kerjanya bisa dipantau dan pemeriksaannya tidak hanya keuangan, tapi keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Dan status-statusnya itu harus

tahu. Saya dulu di Komisi III DPR RI mengembangkan online itu, saya Pimpinan Komisi III DPR RI tahu ini kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, yang di KPK harus tahu progresnya seperti apa. Ini Komisi XI DPR RI ini pusatnya informasi seluruh Indonesia harusnya disini, karena punya apa? punya BPK itu. Dan Komisi XI DPR RI itu kalau tidak ...(suara tidak jelas) Lagi karena punya *counterpart* BPK, karena BPK itu, itu bisa masuk ke semuanya.

Kemudian Bapak Amirul Tamim, ini penguatan ya memang. Banyak yang tumpang tindih, kalau kita dengan sistem informasi yang real time seperti ini Pak. Saya misalnya riset, riset itu yang tumpang tindih jelas itu. Riset itu ada di Kementerian, di seluruh Kementerian ada riset. Terus yang di LPNK itu ada riset, di seluruh Balitbangda ada riset, di industry semua ada riset, tapi tidak ada yang mengevaluasi ketumpang tindihan itu, 17 triliun itu.

Nah, dengan BPK melakukan mengembangkan yang tadi saya sampaikan tadi itu, itu bisa ketahuan. Makanya audit yang saya sampaikan tadi transformasi itu dan reorientasi itu tidak hanya auditnya terbatas di satu case itu, tapi case-nya itu dicari sampai mana itu, risetnya sampai mana. Sampai bisa naik ke tingkat atasnya atau di Kementerian saja, apakah di Menko-nya saja. Kalau di daerah apakah di Dinasnya saja atau dimana penyalakannya itu, itu audit yang komprehensif itu.

Terus kemudian Bu Elviana, pengawasan DPR RI sudah kecil sejak Satuan 3. WTP itu, itukan ini sekaligus saya menjawab Ibu Indah. WTP itu berdasarkan informasi, informasi yang disajikan oleh si diperiksa. Itu bisa jadi yang ditampilkan itu sesuai dengan prosedur semua dan sesuai dengan standar pemeriksaan. Tetapi banyak kejadian yang tidak mungkin dimasukkan disitu. Maka dengan reorientasi tadi masuknya jangan setelah kejadian semua selesai. BPK itu punya kewenangan masuk di awal perencanaannya benar tidak ini, tumpang tindih dengan yang lain tidak. Terus di tengah, kalau misalnya ada proyek besar yang di Garuda ini yang ditangani KPK. Itu dipelaksanaannya jelas, yang ditunjuk itu yang tidak punya pengalaman sama sekali. Itu kalau BPK masuk di tengah itu bisa dikasih warning, tidak mungkin perusahaan yang belum punya pengalaman sama sekali bisa mendapatkan kontrak triliun begitu, bisa ada *warning* begitu. Dan itu kalau ada laporan ...(suara tidak jelas) Itu bisa ditanyakan di Komisi XI DPR RI ini atau di Komisi-komisi yang lain. Itu salah satu contoh kalau kita mengubah paradigma yang ada sekarang.

#### **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin Pimpinan, pendalaman.

Dengan kata lain, jika Bapak Tjatur terpilih di sana maka program 3 besar tadi, transformasi, reorientasi, dan modernisasi bisa di-*insert* di BPK. Sehingga tidak lagi yang namanya WTP itu hanya semacam opini saja tetapi tidak berujung atau berwujud kepada kesejahteraan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):**

Jadi tadi saya menyambung Bapak Bertu, tidak hanya terpatok dengan kriteria. Yang sekarang inikan ini kriteria, terus kejadian faktanya apa, terus dicocokkan ini ada gap, terus semua diarahkan kesini. Boleh jadi kriterianya salah, kriterianya hanya berdasarkan standar pemeriksaan saja. Ini sama di hukum juga begitu, semua dipatokkan kepada sisi SOP-nya sesuai dengan Undang-Undang-nya, akan tetapi mengabaikan keadilannya, mengabaikan substansinya. Nah, kita harus bisa lebih

masuk jangan-jangan kriterianya ini yang keliru, maka harus ditransformasikan tidak hanya kriteria saja, boleh jadi dievaluasi kriterianya.

Kemudian yang menarik dari Ibu Indah, tentang independensi. Sebetulnya di DPR RI ini juga sama memiliki problem yang sama dengan Kesekjenan. Maka kalau saya Bapak dan Ibu berikan amanah kepada saya, ini bareng-bareng ayo BPK dan DPR RI sama-sama mengindependensikan bareng-bareng. Kalau satu lembaga yang berbicara dengan Pemerintah itu mungkin kurang kuat, tapi kalau dua lembaga ini sama-sama itu saya pasti itu, karena problemnya sama. BPK lebih parah lagi ini setengahnya lagi anggaran DPR RI. Jadi dua-duanya harus melangkah bersama ini, harus sinergi, dan sinerginya BPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar harus menguatkan DPR RI.

Terus kemudian tadi Bapak Bertu betul sekali, di kriterianya ini mungkin salah, karena di kriterianya itu kriteria pemeriksaan saja, kinerja keuangan saja. Saya akan ubah total kalau ada begitu, anggaran disitu harus berbasis kinerja, kinerjanya itu kalau yang sekarang itu nilainya efektifitas saja, harusnya kinerjanya membawa pada peningkatan IPM misalnya. Saya paling sedih daerah-daerah kaya itu bukan hanya kemiskinannya Pak, daerah sumber energinya juga tidak ada disitu, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu listriknya kurang. Ini tidak boleh dikasih WTP kalau begini. Baik di daerah itu, kalau daerah itu banyak, energinya banyak harus utamanya bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Terus kemudian Ibu Siti, Tajtur itu artinya 4 orang Jawa itu Bapak Hendrawan bisa menjelaskan. Nah, ini salah satu yang saya tekankan, kelemahan BPK yang sekarang ini adalah temuan sekedar temuan. Banyak yang mandek terutama di APH, kebetulan saya pernah diberikan amanah selain Ketua Fraksi PAN dulu Pimpinan Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman itu saya bisa sampaikan kepada teman-teman aparat hukum, salah satu kriteria audit aparat penegak hukum adalah menindaklanjuti temuan-temuan BPK terutama yang ada indikasi pidana, karena kalau tidak ada sanksinya juga. Jadi itu Ibu jawaban dari saya.

Terima kasih Bapak Ketua, kalau masih ada saya dengan senang hati, karena saya berbahagia karena malam hari ini bisa duduk di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, tadi masuknya jam 20.05 WIB, ini masih ada 5 menit sebetulnya. Jadi silakan saja Bapak Tjatur mau menggunakan 5 menit atau 1 menit silakan untuk melakukan *closing statement* sebelum acara ini sudah selesai. Sinergi itu yang menarik bagi kita.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.):**

Saya ini DNA saya DNA DPR RI, artinya selama apapun saya diberikan amanah oleh Bapak dan Ibu di BPK RI itu tidak akan selama di DPR RI. Jadi tentu yang saya pikirkan itu bagaimana memperkuat DPR RI, bagaimana teman-teman di DPR RI menjalankan fungsinya dengan baik dan bagaimana teman-teman DPR RI itu nanti terpilih kembali.

Bapak dan Ibu bisa ini nomor HP saya, ini saya tahun 2000 sampai sekarang tidak berubah, 0811982121 in dari tahun 2000 sejak saya menjadi Asistem Menteri Ristek, Presidennya Ibu Mega sampai dengan detik ini berubah. Bapak boleh tanya kepada Anggota DPR RI mana yang 15 tahun Anggota DPR RI nomor HP-nya tidak

berubah. Dan ini seluruh Dapil saya tahu, apalagi teman-teman di DPR RI, tidak pernah ganti HP saya.

Terima kasih Bapak Ketua, Bapak dan Ibu.

Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, kita berikan apresiasi kepada Bapak Tjatur Sapto Edy, tidak percuma dulu walaupun saya lulus duluan di Bandung, beliau lulus kemudian, tapi saya berilmu politik dengan Bapak Tjatur ini.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T. atas kehadirannya dan paparannya. Kita telah sampai pada akhir sesi ini, untuk itu kami persilakan dengan hormat Bapak Tjatur untuk meninggalkan tempat. Dan sebelumnya silakan untuk berjabat tangan.

#### **Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi XI DPR RI.**

Kita telah kedatangan Bapak Ruslan Abdul Gani, S.E., MAK. Ak., CA. sebagai Calon Anggota BPK RI, peserta dalam sesi yang terakhir pada malam hari ini. Bapak Ruslan, kami punya Tatib presentasi maksimal 45 menit total dengan pembagian waktu 15 menit Bapak paparan dan kemudian 30 menit tanya jawab. Bisa saja tanyanya hanya 10 menit Bapak punya kesempatan jawab 20 menit. Atau terbalik kadang-kadang tanyanya 20 menit dan jawabnya 10 menit. Kita mulai jam 20-53 WIB nanti akan selesai 45 menit kemudian.

Waktu dan tempat kami persilakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., Ak., CA.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.**

Saya Ruslan Abdul Gani, mencoba menyampaikan makalah yang sudah saya buat untuk dalam rangka syarat pencalonan Anggota BPK RI. Baik, akan saya mulai.

Paparan saya atau makalah saya ini saya beri judul "penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan guna mempercepat tercapainya tujuan negara". Dari latar belakang yang saya buat bahwa dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain 4 point, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kaitannya dengan paparan saya ini, point dua yang memajukan kesejahteraan umumlah yang banyak terkait dengan substansi dari permasalahan yang akan saya sampaikan.

Kehidupan bernegara kita yang didasari dari RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional nanti diturunkan ke RPJM (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah). Di mana dalam RPJM itu sudah mengandung visi dan misi program dari seorang pemimpin negara atau pemimpin negara atau Presiden yang terpilih. Nanti dalam pelaksanaan Pemerintahan, jalannya Pemerintahan, apa visi dan misi dan program Presiden inilah yang akan dituangkan di dalam RAPBN atau dalam Rencana Pembangunan Tahunan. Di mana nanti semua kegiatan dari seluruh institusi negara ini atau penggunaan uang negara melalui RAPBN.

Nah, dari sinilah dimulai apa yang ingin saya paparkan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang paling banyak terkait dengan memajukan kesejahteraan umum yang dituangkan dalam RAPBN ini. Di mana ada lembaga legislative dalam hal ini DPR RI, DPD yang berkewajiban untuk bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negaranya.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan dipimpin oleh Presiden untuk menjalankan, mengelola keuangan negaranya. Dan ada BPK yang sebagai lembaga yang bertugas, berkewajiban untuk memeriksa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang dalam hal ini dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat didukung oleh laporan semua LKKL, lembaga keuangan Pemerintah lainnya atau lembaga dan departemen lainnya.

*Next*, dari dasar sisi BPK di mana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomotr 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga-lembaga negara lainnya, Kementerian atau setingkat kementerian, Bank Indonesia, disitu juga ada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, itu sudah ada dibentuk Badan Layanan Umum atau lembaga badan lain yang ikut atau terlibat dalam pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang itu BPK berhak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat dan semua instansi lainnya tadi yang mengelola keuangan negara yang di mana dalam hal ini adalah mandatori atau kewajiban yang biasanya dilakukan oleh BPK setiap semester I setiap tahun berdasarkan hasil laporan yang telah selesai dibuat oleh masing-masing Satker.

Selain itu juga BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimana kalau secara definisi pemeriksaan kinerja ini memberikan simpulan atas suatu kegiatan dari aspek ekonomi, efektif dan efisiensinya. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan yang ditetapkan, karena pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini realnya menjadi dua, pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk atas kepatuhan atau sudah lebih spesifik lagi pemeriksian investigative.

*Next*, dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Yang paling utama seperti nomor 1, disitulah terlihat salah satu pilarnya BPK dalam hal ini independensi yang menentukan objek pemeriksaannya apa yang akan diperiksa, instansi apa yang akan diperiksa, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan dilapangannya serta laporan yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Kalau point berikutnya adalah tehnis pemeriksaan dilapangan seperti permintaan keterangan, memeriksa di tempat dan segala macam sampai point 10. Di antara lain juga di point 10, ada memantau penyelesaian kerugian negara karena untuk penetapan terkait kerugian negara atau daerah ini terutama terhadap bendahara, baik bendahara negara atau bendahara daerah, yang mengelola



keuangan negara atau keuangan daerah itu BPK punya kewajiban untuk menetapkannya. Kalau untuk pegawai lain seperti BUMN, BUMD atau pegawai non bendahara itu BPK hanya memantau apa yang ditetapkan oleh bisa putusan pengadilan atau yang sudah diputuskan oleh Majelis Kerugian Negara atau Kerugian Daerah.

Terkait dengan judul tadi hubungan dengan lembaga perwakilan dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini BPK secara apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang, dalam perencanaan dari tahap awal pemeriksaan. Merencanakan pemeriksaan dapat memperhatikan permintaan saran dan pendapat dari lembaga perwakilan yang biasanya disampaikan dalam bentuk pertemuan konsultasi, mempertimbangkan informasi dari Pemerintah, bank sentral dan masyarakat. Nah, masyarakat ini biasanya yang sampai saat ini yang lebih banyak berupa seperti pengaduan. Cuma kalau kedepan mungkin bisa dalam bentuk lain, memang dalam bentuk hubungan timbal balik antara BPK dengan masyarakat atau lembaga masyarakat organisasi masyarakat.

Dari sisi hasil pemeriksaannya BPK menyampaikan hasil pemeriksaan ini ke lembaga perwakilan dan ke Presiden sebagai Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau pemeriksaannya itu dilakukan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke Kepala Daerah.

Selanjutnya, mengenai peranan BPK. Di mana pada saat ini menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan keuangan negara dan penyalahgunaan yang berimplikasi pada terjadinya kerugian keuangan negara. sekaligus berperan mengawal penggunaan keuangan negara itu biar tepat sasaran, efisien, dan berguna secara optimal. Jadi keuangan negara dipergunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan negara dan Pemerintahan, sehingga hasilnya tepat pada sasaran terselenggaranya program dan memiliki manfaat optimal bagi masyarakat atau dalam hal ini rakyat.

Dari apa yang telah disampaikan tadi saya tambahkan pada tahapan berikutnya adalah area-area yang menjadi peningkatan atau percepatan terkait dengan sinergi antara BPK, Pemerintah dan lembaga perwakilan. Diharapkan perencanaan audit atau strategi yang selama ini bisa dimulai dari *bottom up*, *top down* dapat juga melibatkan dari semua stakeholder, sehingga proses perencanaan pemeriksaan dapat menjawab keinginan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memetakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, jadi bukan hanya apa yang jadi rutinitas pemeriksaan seperti pemeriksaan mandatory, pemeriksaan keuangan negara.

Dari pemeriksaan itu ada hal khusus di mana terkait pemeriksaan yang mengandung unsur pelanggaran hukum. Di mana diatur bahwa BPK harus melaporkan permasalahan hukum dari hasil pemeriksaannya. Di mana dari kerja sama lembaga perwakilan, lembaga yudikatif, maaf dalam paparan slide ini sebenarnya ada satu lagi point Pemerintah yang dalam makalah.

Penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi dari hasil sinergi itu, diharapkan dapat menjadi tercapainya pelaksanaan penyelenggaraan bernegara yang lebih optimal, sehingga tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang mencapai masyarakat yang sejahtera, lebih berpeluang untuk dicapai.

Dalam proses yang ada sekarang peran dalam perencanaan pembangunan masyarakat bisa terlibat dari melalui Musrenbang, DPR dapat masukan dari masyarakat, BPK merencanakan dalam merencanakan pemeriksaannya. Di situ juga dapat BPK selain secara aturan dapat menerima masukan seperti tadi dalam

melakukan perencanaan pemeriksaan yang antara lain pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan, kinerja dan PDPT tadi.

Dari kondisi yang ada itu, saya membuat rencana aksi antara lain hal-hal yang memperbaiki atau merubah dari kondisi yang sebelumnya. Kalau dari sisi institusi BPK-nya mengembalikan kemandirian lembaga negara, baik disisi anggaran maupun dari sisi sumber daya manusia, karena berdasarkan Undang-Undang-nya seharusnya BPK mempunyai kemandirian dalam hal anggaran dan pembangunan dan sumberdaya manusianya.

#### **KETUA RAPAT:**

Satu menit lagi Pak.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Sehingga diharapkan kalau bisa dikembalikan dari Undang-Undang BPK sendiri, BPK akan mempunyai independensi dari sisi anggaran dan sumberdaya.

Point berikutnya yang bisa diharapkan ke depan bisa dilakukan peningkatan lagi komunikasi antar lembaga negara dalam suatu aksi rencana atau agenda bersama, baik dari sisi awal, dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai dia bertahap laporan atau pertanggungjawabannya. Antara lain hal-hal yang bisa dilakukan mungkin lebih meningkatkan lagi saluran formal dan informasi, seperti apa yang sudah ada sekarang karena seperti pada periode sebelumnya sempat dilaksanakan pertemuan informal antara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara per bulan, disitu mungkin bisa sudah ada pembicaraan semiformal yang nanti akan diformalkan lagi ke dalam saluran seperti kemarin ada pembahasan atas hasil laporan keuangan antara BPK dengan salah satu organ DPR RI.

Dari sisi internal sendiri BPK juga secara internal dapat memulainya dari Renstra BPK sendiri yang lainnya akan dibuat untuk tahap selanjutnya sesuai dengan kelanjutan yang sebelumnya. Ada juga kita dapat melakukan perbaikan dari *international best practice* dalam hal untuk kita yang saat ini sudah dilakukan tapi nanti dapat lebih ditingkatkan lagi, seperti memanfaatkan hasil dari kita sebagai keanggotaan dari *international supreme audit* atau organisasi BPK sedunia. Di mana hasil rapat-rapat atau diskusi di dalam bisa dapat diputuskan hal-hal yang dapat diterapkan oleh hampir semua anggotanya. Mungkin bisa dicontohkan pada saat ini kita sudah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan di sector public, keuangan di sector public mengenai pemeriksaan lingkungan hidup. Dan mungkin ke depan bisa jadi sesuai perkembangan yang dibuat oleh asosiasi atau lembaga tersebut, kita bisa menerapkan yang lain dalam hal ini mungkin BPK dimulai dari memanfaatkan itu sebagai bagian atau perbaikan dari standar pemeriksaan keuangan negara yang memang harus dikeluarkan menjadi kewajiban BPK untuk membuatnya.

Point terakhir, manajemen resiko di BPK. Di mana hal paling penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPK sendiri adalah BPK harus dapat menjaga kualitas yang dari hasil pekerjaan mereka dalam hal ini laporan hasil pemeriksaan, sehingga dapat diterima oleh semua *stakeholder*. Jika kualitas itu dapat dijaga secara konsisten bahkan ditingkatkan lagi.

Adapun yang terakhir adalah peran yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi Anggota BPK. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah paling tidak dari sisi internal organisasi BPK, bisa dimulai dari bagian terkecil atau auditorat yang menjadi tempat saya berada nanti, misalnya saya ada di AKN 7 saya bisa memulai

dari sana. Selanjutnya yang lebih luas lagi, mengajak semua pihak dari BPK entah di AKN lain dan seluruh pemeriksa.

**KETUA RAPAT:**

Disingkat Pak, waktunya sudah habis.

**CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Yang terkait lagi dengan menjaga kepercayaan masyarakat atas kualitas BPK, maka saya akan berusaha menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK di mana akan menerapkan system penggalan yang terukur di setiap lini atau tingkatan terkait pemeriksaan, sehingga dapat menjaga kualitas atau terciptanya *quality insurance* atas hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan BPK.

Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ketua.  
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih Bapak Ruslan Abdul Gani atas paparannya.

Kita masuk kesesi kedua, yaitu pendalaman atau tanya jawab. Di meja kami sudah ada beberapa daftar penanya, kita mulai dari sisi sebelah kanan silakan ke Ibu Elviana yang pertama, kemudian siap-siap sebelah kiri Bapak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan serta Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Ruslan Abdul Gani yang juga saya hormati.**

Jadi Bapak merupakan calon yang kesekian dari pegawai, aktif di BPK yang mencalonkan. Usia Bapak baru 49 tahun, masih bisa menjadi auditor utama. Bapak sekarang baru eselon II ya Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Belum, saya fungsional.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Oke, saya tertarik dengan kemandirian BPK Pak. Memang dalam pertemuan-pertemuan informal yang beberapa teman BPK mengatakan minta dikembalikan pengangkatan ASN di BPK itu tak lagi oleh Menpan RB, karena kalau seperti itu ketergantungannya, nasibnya juga tergantung kesana. Sementara di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu tidak oleh Menpan RB Pak, penetapan pegawainya. Di sini

Bapak bilang agar dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu pengangkatannya tidak oleh Menpan RB. Karena memang ini diusulkan untuk revisi Undang-Undang BPK.

Bapak sudah tahu persis baik dan buruknya BPK dengan system yang ada sekarang. Apa hal baru yang akan Bapak lakukan ketika terpilih menjadi Anggota BPK dalam kondisi anggaran yang baru turun diajukan oleh Pemerintah ke Komisi XI DPR RI, jumlah auditor yang kurang, dan ASN-nya tidak menjamin.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Silakan Bapak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan, Bapak Ruslan Abdul Gani yang saya hormati.**

Sementara ini sebagai auditor ya Pak, sudah pengalaman sekian tahun. Jadi terlibat dalam kaitan memberikan opini WTP. Dalam pengalaman yang cukup panjang, lalu wacana kita ini bagaimana menyelematkan keuangan negara, konotasi menyelamatkan keuangan negara ini selalu diartikan dalam arti sempit, hanya bagaimana itu tidak dikorupsi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat penyelamatan uang negara ini, kalau korupsi itu mungkin dari satu total proyek mungkin sekian persen bisa dikorupsi. Tapi bisa saja total proyek yang ditangani itu tidak efektif, tidak kena sasaran, saya kira itu adalah kerugian negara yang paling besar.

Pengalaman yang kita lihat biasanya dalam penyusunan anggaran itu ini mungkin karena BPK tidak selalu melihat dari aspek pemeriksaan kinerja, sehingga tidak melihat itu bagaimana proses perencanaan itu pengusulan anggaran dan lain sebagainya. Kalau dicermati dan dibuka dokumen, sebenarnya para pejabat-pejabat itu atau pelaku-pelaku di birokrasi itu hanya nomenklaturnya itu hampir sama merubah angka dari tahun ke tahun. Sehingga program yang harusnya dicapai visi, misi, apakah itu RPJMD, RPJMNas itu biasanya tidak terarah.

Oleh sebab itu, saya ingin menanyakan pandangan Bapak terkait itu, apakah kerugian negara hanya karena orientasi jangan salah gunakan tetapi menurut hemat saya kerugian negara paling banyak itu karena proyek yang tidak tepat, mubazir dan lain sebagainya.

Yang kedua, apakah ini dicermati kalau di bidang konstruksi biasanya itu pembagian anggaran itu dari anggaran yang diberikan ke masing-masing unit kerja itu ya itu alokasinya dibagi secara adil, lembaga ini kamu begini, lembaga ini begini. Aspek konstruksi itu diabaikan, sehingga kalau kita lihat beberapa pengalaman terakhir kan banyak jalan dan jembatan yang ambruk. Itu analisa anggaran itu bukan menyesuaikan dengan konstruksi akan tetapi analisanya menyesuaikan dengan anggaran, sehingga mengabaikan aspek-aspek konstruksinya.

Ini pandangan Bapak dalam pengalaman itu, apakah itu masuk dalam kajian audit atau hanya melihat sisi administrasi bahwa ini sesuai dengan pos anggaran dan sebagainya sehingga bisa di WTP.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Amirul.

Silakan Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang masih bertahan di tempat ini untuk melakukan tugas konstitusi fit and propertest.**

Bapak Ruslan Abdul Gani merupakan peserta atau kandidat yang terakhir untuk hari ini, tetap semangat ya Pak, kami semua juga masih semangat, dan terima kasih untuk presentasi yang bagus Pak.

Jadi begini Pak, BPK itu kan diharapkan atau memang kita tahu bahwa dia adalah suatu lembaga yang diharapkan professional, berintegritas, kredible, akuntable dan lembaga independent. Nah, kalau Tuhan mengizinkan dan kami semua mayoritas memilih Bapak Ruslan Abdul Gani untuk ada disana sebagai salah satu Pimpinan. Bagaimana Bapak Ruslan mampu menciptakan benar secara real tentang independent itu Pak. Termasuk di dalamnya adalah anggaran dan SDM yang kita tahu itu adalah tantangan dari BPK saat ini. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, dengan tugas yang begitu berat dan kompleks entitas yang diaudit juga tersebar di seluruh NKRI.

Yang kedua, lalu ada slogan bahwa WTP kok OTT seperti itu ya Pak. Meskipun sudah ada penjelasan tidak jaminan tidak ada korelasi bahwa WTP dijamin akan tidak ada lagi tindakan-tindakan yang tidak proper seperti korupsi dan lain sebagainya.

Tapi apabila Bapak Ruslan Abdul Gani berada disitu apakah mampu membuat korelasi positif dan aktif antara WTP itu bukan hanya sebagai salah satu ceremonial rutinitas atas capaian untuk semacam uuforia. Setiap entitas yang mendapat WTP itu kan dirayakan semacam award bahkan penghargaan dan kadang-kadang mungkin dipakai sebagai sarana untuk mengklaim minta insentif dan lain sebagainya. Apa yang bisa Bapak lakukan agar WTP itu memang benar-benar berkorelasi kepada peningkatan kesejahteraan, karena didalamnya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang tidak proper dari pemangku kepentingan yang ada di entitas yang mendapatkan WTP tersebut.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Ruslan Abdul Gani yang saya hormati.**

Bapak saat ini sebagai auditor keuangan negara, jadi Bapak ada di dalam. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, kita tahu penyelesaian tindaklanjut dari rekomendasi pemeriksaan BPK itu dalam hal ini, diantaranya Pemda yang tidak mempunyai komitmen, kemudian peraturan. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap BPK, artinya BPK sudah mulai tergerus kepercayaannya di mata masyarakat. Nah, terobosan apa Pak, yang akan Bapak lakukan ke depan seandainya Bapak terpilih nanti sebagai Anggota BPK, agar kembali citra daripada BPK itu dipercaya kembali oleh masyarakat.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sisi kanan tidak ada lagi ya.

Pak Ruslan Abdul Gani ada 4 pertanyaan yang Bapak harus jawab secara komprehensif dan tepat sasaran.

Kami persilakan waktu Bapak cukup panjang, bisa dimanfaatkan sampai 13 menit. Silakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Terima kasih.

Saya mencoba menjawab berurutan dari Ibu Elviana, terkait dengan Undang-Undang BPK, mengenai hal penerimaan pegawai. Memang penerimaan pegawai tetap dilaksanakan oleh BPK, tapi ada hal-hal mendasar seperti bisa disampaikan kuota. Misalnya kita membutuhkan sampai 1000 orang pemeriksa, SK pengangkatan pegawai dari Menpan RB. Selanjutnya, kadang karena keterbatasan dan ini juga terkait langsung dengan anggaran Pemerintah yang ada sulit untuk memenuhi 1000 itu, biasanya mungkin hanya separuh atau sebagian yang bisa dijadikan kuota penerimaan pegawai pada tahun yang bersangkutan.

Jadi memang dalam kondisi yang ada sekarang ini, sumber daya manusia BPK itu belum sampai di titik optimal. Di kaitkan dengan objek pemeriksaan yang ada, pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga kita dalam operasional atau dilapangan melakukan kebijakan-kebijakan tersendiri. Mungkin yang seharusnya satu tim pemeriksaan di Pemerintah Daerah tingkat II seperti teman-teman diperwakilan, mungkin yang idealnya 5 atau 6 orang hanya bisa dilaksanakan oleh 3 orang, karena memang tidak ada sumberdaya yang bisa digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

Selanjutnya pertanyaan kedua, apa hal baru yang akan dilakukan jika terpilih. Mungkin bisa dikaitkan langsung dengan yang tadi, sekarang ini sudah kita coba untuk mengurangi jarak antara keberadaan SDM yang ideal dengan kebutuhan yang angara lain dengan memanfaatkan Kantor Akuntan Publik. Jadi kita sudah mulai menggunakan Kantor Akuntan Publik mewakili BPK dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan di Pemerintah Daerah. Posisi terakhir seingat saya ada penjelasan dari teman sedikit sudah ada 40 daerah tingkat II yang dilakukan pemeriksaannya menggunakan Kantor Akuntan Publik.

Nah, inilah mungkin yang masih bisa yang paling cepat dan memungkinkan dipindahkan pemanfaatannya untuk menutup gap tadi yang ada. Cuma ada

hambatannya bahwa tidak semua auditor yang berada di KAP terbiasa dengan pemeriksaan keuangan negara, mereka biasa untuk perusahaan-perusahaan komersil bukan sector public, mereka lebih sector private. Nah, kita harus melakukan pendidikan pelatihan lagi.

Dan yang hambatan yang real memang dirasakan selama ini memang berbeda, kalau dalam hal terutama untuk pemeriksaan dari sisi kepatuhan atau buku 3 yang biasa kita sebut, karena ada buku 1 adalah mengenai pengendalian intern, buku 2 adalah opini, buku 3 adalah kepatuhan temuan-temuan seperti PDPT. Dilapangan mereka akan lebih sulit bergerak karena memang tanggapan dari objek yang diperiksa berbeda kalau yang melakukan itu adalah BPK. Jadi kalau KAP memang langkah mereka lebih sempit tidak seleluasa itu. Jadi itu yang menjadi ganjalan teman-teman KAP, makanya kadang untuk sisi kepatuhannya mereka tidak terlalu dalam atau tidak terlalu luas jangkauannya.

Nah, kalau ini agak sulit karena kita memang dari sudut pandang orang kan, dia mau melihat apa susah dibedakan. Kalau pakai baju BPK beda, padahal mungkin secara kemampuan kemungkinan besar sama. Karena memang "ah tidak dianggap", kurang lebih mungkin kalau pakai kalimat sehari-hari tidak dianggap. Jadi akan sulit mendapatkan informasi, jadi yang pasti itu, karena kalau masalah kompetensi atau kemampuan selain sama bisa ditingkatkan melalui Diklat atau yang dilakukan oleh BPK. Jadi memang ada syarat bahwa partner atau KAP yang menandatangani juga sudah tersertifikasi oleh BPK, demikian juga dengan tim kebawahnya, dari supervisor sampai ke anggota timnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke Ibu Elviana.

Yang kedua dari Bapak Amirul Tamim, mengenai menyelamatkan keuangan negara, apakah hanya terkait dengan korupsi. Ini saya sangat setuju dengan Bapak, karena sebenarnya makalah yang saya sampaikan adalah bahwa tidak Cuma terkait dengan korupsi, bahwa tidak efisien dan tidak efektifnya itu bisa bernilai jauh lebih besar dari yang dikorupsi, yang ditangkap tangan atau kita nyatakan sebagai lebih bayar, kurang volume dan segala macam.

Mungkin bisa dianalogikan begini, kita membangun sekolah tinggi tehnik elektro di Kabupaten Puncak Jaya, bangunanya ada, fasilitasnya ada, siswanya tidak ada, pesertanya tidak ada. Mungkin akan lebih tepat kalau dibangun sekolah atau lembaga pendidikan terkait dengan pertanian, perikanan, yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat. Kalau untuk sekolah tinggi elektro atau kedokteran lebih sulit. Nah, itu akan jauh lebih besar nilainya dari sisi pemanfaatan keuangan negara tadi, kalau mungkin kita bandingkan dengan satu proyek dengan nilai 10 miliar, betul yang Bapak bilang tadi yang dikorupsi itu paling 50% sudah susah setengah mati untuk mengkorupsinya. Akan tetapi kalau inefisiensi, pemborosan tadi bisa 100% seperti yang saya contohkan tadi.

Nah, karena ini dimulai dari perencanaan kegiatan yang dianggarkan di APBD, kita belum mencapai kesana memang selama ini kalau hanya dengan PDPT. Jadi memang dengan kinerja kita bisa melihat satu rangkaian, satu siklus kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Dan pertanyaan kedua, dari sisi anggaran yang dibagi secara adil ke semua Satker. Pandangan terkait tersebut, ini bisa kita sebut realitas yang ada. Jadi anggaplah satu Pemerintah Daerah dia punya 30 Satker, total APBD pada saat itu 150 miliar. Yang paling gampang itu kecuali yang diatur oleh Undang-Undang, seperti bahwa berapa persen untuk pendidikan, ya sudah dibagi. Untuk meng-*ajust* dari masing-masing ini terhadap anggaran yang sudah diterima, hasil bagi rata tadi dihubungkan dengan program kerja mereka repot. Jadi mungkin bisa saya contohkan

Satker PU dia punya 50 rencana kegiatan yang nilainya mungkin jadi 50 miliar. Begitu itu dipotong karena untuk memenuhi sama rata tadi, dijadikan 30 miliar. Kalau dari 50 miliar jadi 30 miliar disamakan ke dalam kegiatan yang dilakukan yang paling mudah itu bisa jadi karena kondisi waktu dalam proses pembahasan RAPBD-nya, ya sudah dipotonglah dari rencana misalnya 10 kegiatan pokoknya sama dengan dapat 30 miliar dari 50 miliar, ya sudah potong mungkin jadi 3, mungkin jadi 7.

Penyesuaian ke dalam detail yang lebih rinci akan sangat memakan waktu. Potong dari golondongan yang diterima dipotong, inilah yang nanti akan realnya, pelaksanaannya juga akan jadi repot. Kalau misalnya mereka seperti membagi berapa infrastruktur atau bangunan berapa penduduk. Mungkin dari barang pendukung yang direncanakan seperti meja kursi 10-20 dipotong saja langsung jadi 5 atau 10. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawabkan.

Untuk pertanyaan yang dari Ibu Indah Kurnia, menciptakan kurang lebih independensi terkait dengan anggaran dan SDM.

#### **KETUA RAPAT:**

Waktu tinggal 2 menit.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Oke, ini sesuatu hal yang cukup sulit karena itu tadi anggaran dan SDM ini pada saat ini belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan melibatkan pihak-pihak diluar BPK. Jadi memang harus ada komunikasi, pembahasan yang intens, untuk menyelesaikan ini. Otomatis kadang paling tidak dari sisi pandangan masyarakat ya susah, BPK tahun ini sibuk negosiasi dari rencana 1 triliun dipotong Depkeu anggarannya jadi 500 miliar, negosiasi lagi jadi 750 miliar, buat apa saja. Paling tidak secara pemikiran orang awam "oh, mungkin ada yang dinego", otomatis pada saat itu independensi akan berkurang dari sisi masyarakat yang mempertanyakan hal itu. Makanya tadi saya bilang ini termasuk hal yang sulit karena melibatkan pihak-pihak lain dan pandangan orang lain yang tidak bisa kita saklek aturannya harus begini.

Mungkin untuk memanfaatkan waktu saya coba menjawab pertanyaan yang kedua, WTP dihubungkan dengan korupsi atau tidak proper. Mungkin seperti penjelasan yang selama ini sudah dijelaskan, bahwa memang WTP adalah opini. Kegiatan korupsi ini adalah sebenarnya bagian dari memanfaatkan laporan keuangan yang mendapatkan opini ini tadi. Tapi bisa saya sampaikan bahwa memang pemberian opini atau pelaksanaan audit dalam hal ini laporan keuangan, sampai dapat pemeriksa bisa menyimpulkan berkeyakinan metodologi yang dipakai itu adalah penggunaan sampel. Karena berdasarkan hukum manfaat antara waktu, sumber daya, uang, kalau kita menggunakan populasi dengan menggunakan sampel akan sangat berbeda. Nah, ini yang mungkin masuk dari wilayah keterbatasan audit. Karena audit yang umum dilakukan tadi karena keterbatasan anggaran, waktu dan SDM, memang akan menggunakan sampel.

Pelaksanaan dilapangan okelah kita menggunakan sampel, biasa pun itu akan kita bagi lagi kluster. Jadi mungkin transaksi terendah 100 juta, transaksi tertinggi 100 miliar, akan kita bagi akhirnya kita kluster lagi yang 50 miliar sampai 100 miliar, 25 sampai 50 atau di bawah itu. Masing-masing nanti kita ambil lagi kita pilih lagi dengan berbagai metode, mana yang sampel yang mewakili dari 3 kluster ini.



Pada saat cakupan atau hasil yang diambil dari kluster ini memang tidak ketemu dengan “oh, ini proyek yang dimainkan”, ya itulah tadi masuk dalam wilayah audit konstrim, keterbatasan audit. Memang tidak akan bisa nyambung, tapi dari hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa sudah punya keyakinan yang cukup dari bukti dan cara mendapatkan bukti untuk memberikan opini. Makanya opini masih bisa diterbitkan, Cuma masyarakat masih selalu menghubungkan langsung, “wah WTP itu kan opini paling baik kok masih ada korupsi”. Memang tidak bisa *head to head* dibandingkan. Jadi itulah mungkin memang masih ada gap yang terjadi.

**KETUA RAPAT:**

Kita sudah habis waktu.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):**

Pak, satu menit saja.

Pak, ini Bapak kan salah satu pejabat karir, sekarang auditor utama di BPK. Saya hanya satu opini pribadi Bapak, banyak politisi yang masuk menjadi Anggota BPK. Sebagai orang dalam dan pejabat karir apa pandangan Bapak, grundelan di internal itu masuknya politisi sebagai Anggota BPK. Saya ingin Bapak menjawab dengan jujur.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan pertanyaan ekstra Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Baik, saya akan coba jawab.

Yang paling pasti dirasakan kalau itu adalah kita tidak menyebut politisi, mungkin saya bagi saja orang dari luar BPK. Oh, politisi khusus politisi ya, yang pasti kita mungkin ini dari sisi saya pribadi. Karena orang datang mungkin kedekatan emosional Pak, yang biasanya akan kurang. Tapi kan itu pasti ada peluang untuk mencair dengan berjalannya waktu, karena kan satu periode 5 tahun. Cuma yang pasti dari awal ya beda ini kalau mungkin dari orang dalam kita pernah jadi anak buah dia, kita pernah satu tim sama dia, mungkin kita bisa paling tidak bertegur sapaanya jadi lebih nyaman, kecuali memang kenal dari luar.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita sudah menuntaskan seluruh acara kita khusus untuk Bapak Ruslan Abdul Gani, kami berikan kesempatan setengah menit untuk menutup statementnya berupa *closing statement* atau *soft campaign*. Waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (RUSLAN ABDUL GANI, S.E., MAK., AK., CA.):**

Mungkin *closing statement* saya tidak banyak. Saya melangkah untuk mengikuti proses seleksi ini mungkin hanya bisa saya jawab saya hubungkan dengan doa saya saja. Siapa tahu kalau saya jadi Anggota BPK, saya bisa berbuat lebih banyak secara nilai atau pengaruhnya kepada orang banyak daripada saya sebagai pemeriksa yang ikut di satu tim dengan saya di dalam posisi yang mungkin istilah orang helicopter view kita sudah berbicara di tataran kebijakan yang akan berpengaruh lebih luas daripada saya hanya. Mungkin saya bisa membuat kebijakan, paling tidak yang disebut justment auditor. Hanya Cuma dalam proses pemeriksaan itu saja, mungkin tidak berpengaruh kepada tim yang lain atau apa.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, mari kita berikan applause buat Bapak Ruslan Abdul Gani, S.E., MAK., Ak., CA.

**Bapak dan Ibu sekalian.**

Kita telah mengakhiri acara kita dengan *statement closing* dari Bapak Ruslan tadi. Dengan demikian acara telah selesai dan dengan hormat kami persilakan Bapak Ruslan Abdul Gani untuk meninggalkan ruangan dan kami berikan kesempatan untuk berjabat tangan.

Sekaligus juga sebagai Pimpinan Rapat saya nyatakan rapat ini kita tutup dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.40 WIB)**

**Jakarta, 5 September 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soedjarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**